Seri Jalur Rempah untuk Penguatan Pendidikan Karakter

KOSMOPOLIS REMPAH JEPARA

Rempah dan Hibridisasi di Pantai Utara Jawa

Arif Akhyat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS
JOGJAKARTA

Seri Jalur Rempah untuk Penguatan Pendidikan Karakter

Kosmopolis Rempah Jepara

Rempah dan Hibridisasi di Pantai Utara Jawa

Penulis
Arif Akhyat

Tim Peneliti
Arif Akhyat
Hastanti Widy Nugroho
Anik Yuniarti

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kosmopolis Rempah Jepara:

Rempah dan Hibridisasi di Pantai Utara Jawa

Penulis

Dr. Arif Akhyat, M.A.

Tim Peneliti

Dr. Arif Akhyat, M.A.
Dr. Hastanti Widy Nugroho, M.Hum.
Anik Yuniarti, M.Si.

Pemeriksa Aksara

Safar Nurhan

ISBN

978-602-244-933-1 (PDF)

Desain Sampul

Putu Sasri Sthiti Dhaneswara

Pemeriksa Akhir

Sisca Fujianita
Kaisar Julizar
Lukman Solihin

Gambar Sampul

van Gelder, W. dan Lekkerkerker, C.
melalui:
https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=MMKB24:068487000

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: https://pskp.kemdikbud.go.id/
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

Cetakan pertama, 2022
PERNYATAAN HAK CIPTA © PSKP/Copyright@2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Grand Zuri

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah karunianya sehingga penerbitan buku hasil penelitian berjudul Kosmopolis Rempah Jepara: Rempah dan Hibridisasi di Pantai Utara Jawa dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini memuat deskripsi mengenai jejaring rempah sejak pra-kolonial Eropa yang berdampak di Kota Jepara dengan pendekatan post-colonial. Sebuah upaya akademik untuk mendekonstruksi pendekatan Indonesia-sentris yang masih menempatkan kolonial Eropa menjadi penggerak utama, primum mobile, dalam sejarah rempah di Nusantara. Buku ini juga merupakan awal sebuah upaya untuk mengungkap masa lalu sebuah kota kecil, Jepara, yang pernah menjadi pusat transit perdagangan dunia, terutama rempah di Pantai Utara Jawa. Diharapkan buku ini dapat mendukung upaya pendaftaran Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia kepada UNESCO.

Dalam kesempatan ini, saya selaku plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada tim atas upaya yang penuh dedikasi, sehingga penulisan dan penerbitan buku ini dapat selesai tepat pada waktunya. Namun, kami memahami bahwa buku ini masih memerlukan masukan dari semua pihak. Akhir kata, semoga penulisan dan penerbitan buku hasil penelitian ini dapat bernilai guna bagi para pemangku kepentingan yang memfokuskan diri pada penelitian mengenai sejarah jalur rempah. Demikian dan terima kasih.

Jakarta, November 2022
Plt. Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

SILATURAHMI NASIONAL
Meneladani mbah Ali Maksum
dalam Berkhidmah untuk
Bangsa dan Negara
Minggu
12 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan, kelancaran atas penulisan buku ini. Berbagai kendala dan persoalan di lapangan terutama ketika menafsir berbagai artefak yang hanya berupa bangunan dan peninggalan artefak yang lain termasuk medalion, teks-teks di situs sampai prediksi letak pelabuhan dengan mempertimbangkan posisi benteng pengawas (Fort Djapara) sering menjadikan penulis hampir putus atas. Kesulitan sumber dan referensi terkait artefak dan bekas pelabuhan yang menjadi petunjuk penting dalam merekonstruksi sejarah rempah di Jepara menjadikan penelitian ini perlu melakukan berbagai interpretasi. Dengan bantuan sumber-sumber lisan, narasi sejarah yang ditulis sejarawan Eropa maupun Asia Timur dan berbagai hasil interviu menjadikan buku ini dapat diselesaikan. Tentu saja, berbagai interpretasi dengan data yang ada tidak mungkin tercapai kesimpulan yang sempurna. Oleh karena itu, buku ini hanya merupakan awal sebuah upaya untuk mengungkap masa lalu sebuah kota kecil, Jepara, yang pernah menjadi pusat transit perdagangan dunia, terutama rempah di Pantai Utara Jawa.

Saat melakukan penelitian ini pendekatan transnasional dan hibridisasi menjadi cara untuk merekonstruksi konglomerasi dan kosmopolis Jepara paling tidak ada dua alasan pokok. Pertama, historiografi rempah yang banyak ditulis sejarawan Barat, terutama Belanda, lebih menggunakan kedatangan Eropa sebagai titik awal munculnya proses sejarah rempah dengan dominasi pelakunya orang-orang Eropa. Kedua, kajian rempah hampir tidak pernah melanjutkan proses-proses hibridisasi pada wilayah tempatan, sehingga sejarah rempah hanya dilihat sebagai sejarah terpisah dan hanya untuk kepentingan Eropa.

Proses penulisan buku ini, penulis sangat terbantu oleh Dr. Hastanti Widy Nugroho, M.Hum. dan Anik Yuniarti, M.Si. yang banyak membantu dalam proses penelitian, terutama pandangan-pandangannya dari perspektif filsafat maupun kajian kawasan. Keduanya memberikan informasi penting

bagaimana pendekatan transnasional dan hibridisasi dapat menjadi cara untuk merekonstruksi konglomerasi rempah Jepara. Berbagai masukan sangat membantu termasuk masukan sumber-sumber sekunder yang sangat berguna dalam memperkuat argumentasi historis. Oleh karena itu, penulis wajib ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hastanti Widy Nugroho dan Anik Yuniarti, M.Si.

Kepada tim lapangan, yang tidak dapat saya sebut satu per satu, terutama Alvin Nabiela Aviceina, yang memberikan sudut pandang perspektif kawasan dan kota dalam merekonstruksi kota Jepara memberikan andil besar dalam merekonstruksi peta jejaring perdagangan yang kompleks menjadi mudah. Dengan membagi dua periode jalur rempah, maka peta dapat dibuat dengan sedikit jelas. Hasil rekonstruksi peta, menjadi mudah untuk menjelaskan bagaimana konglomerasi di Jepara sejak periode awal sampai masa kolonial terbentuk.

Hal yang wajib saya ucapkan, terima kasih tak terhingga kepada tim penyeleksi dan seluruh staf Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan sekaligus sebagai bahan untuk membuat buku ini. Tanpa pendanaan dan masukan para reviewer yang sangat penting dalam proses penelitian sampai hadirnya buku ini, tidak akan hadir buku ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih tak terhingga atas dukungan dana yang sangat bermanfaat dalam kegiatan penelitian yang berlangsung lebih dari enam bulan.

Akhirnya kepada seluruh informan, pembantu penelitian, staf Pemerintah Daerah serta relawan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rumah Kartini kami ucapkan terima kasih. Tak lupa staf Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, staf Arsip Daerah Jawa Tengah yang banyak membantu menemukan arsip dan referensi lain termasuk peta kami ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas rahmat Allah Swt., karya buku ini dapat diselesaikan dan juga atas kesempatan, dukungan dari semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu.

المعهد الإسلامى المنور كرابيك جوغجاكرتا
PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR" KRAPYAK YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **xi**

BAB I
PENDAHULUAN **1**

BAB II
JARINGAN MARITIM DAN PERDAGANGAN JEPARA **11**
A. Aspek Geografis yang Menguntungkan 11
B. Koneksitas dan Struktur Jaringan Perdagangan Dunia 24
C. Sinergi Elite, Monopoli dan Berakhirnya Konglomerasi 46

BAB III
HIBRIDISASI DAN DIALEKTIKA KULTURAL **57**
A. Hibridisasi di Jepara 57
B. Proses Dialektika dan Hibridisasi Budaya 69

BAB IV
HIBRIDISASI DAN BUDAYA KRITIS **105**
A. Hibridisasi dan Munculnya Budaya Kritis 105
B. Kosmopolis Rempah dan Identitas Lokal 111

BAB V
KESIMPULAN **117**

DAFTAR PUSTAKA **121**

BAB I
Pendahuluan

Perkembangan historiografi rempah dalam beberapa tahun sejak kajian Braudel dan dilanjutkan oleh sejarawan berikutnya terkait pertumbuhan kawasan Mediteranian sampai Asia Tenggara selalu dihubungkan dengan jaringan perdagangan yang berkembang di beberapa kawasan, baik di Asia Arab, Eropa, Asia Selatan dan Asia Timur maupun Asia Tenggara (Braudel, 1966; Meilink-Roeloefs, 1962; Kaur & Isa, 2020), Reid, 1993, 2015). Masing-masing kawasan membentuk jaringan sendiri dengan komoditas unggulan masing-masing wilayah. Jaringan perdagangan dengan sistem barter, sistem pertukaran komoditas, sampai munculnya sistem monetisasi menjadi karakter kuat, bagaimana masing-masing kawasan sebenarnya sudah terpola sebagai wilayah kosmopolis yang diikat oleh kepentingan komersial. Kosmopolitan yang terikat oleh jejaring global tersebut tumbuh dan berkembang mengikuti arus ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan kapital dari masing-masing kawasan.

Jika ditelusuri lebih jauh di masing-masing kawasan dengan mempertimbangkan interaksi perdagangan komoditas unggulannya dan terbentuknya jaringan yang lebih luas akibat perluasan pasar, maka hal itu sudah terbentuk pada tingkat lokal dan berkembang terus dalam suatu kawasan jauh sebelum adanya kolonialisme. Untuk kasus Nusantara, sistem perdagangan dari yang paling sederhana, yaitu tukar-menukar barang (barter) sampai pada proses jual-beli berbasis sistem moneter, berlaku sejak periode awal sejarah Nusantara di masing-masing kawasan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pengenalan sistem mata uang pada jaringan perdagangan masa awal kerajaan-kerajaan di Nusantara memberi petunjuk terbentuknya kosmopolitan di Nusantara. Perdagangan pada tingkat lokal dan berkembang pada tingkat kawasan itu seiring dengan perubahan demografi, temuan jalur-jalur baru, baik darat maupun laut, kebutuhan suatu komoditas tertentu, dan peningkatan keragaman komoditas yang laku di pasar, terutama di Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan dan terutama Eropa (Meilink-Roeloefs, 1962).

Perdagangan semula bersifat lokal, terbatas dan barter, berkembang

dan membentuk gugusan perdagangan di suatu kawasan dengan pelaku perdagangan yang semakin beragam berdasar etnisitas, bangsa, asal wilayah serta komoditasnya. Walaupun tidak berjalan cepat, tetapi sistem transaksi dari sistem barter menuju sistem jual beli dengan alat tukar berupa "uang" (monetisasi) tampaknya mendorong percepatan tumbuhnya perdagangan di suatu kawasan yang berjejaring, baik inter maupun antarkawasan. Monetisasi perdagangan pada tingkat kawasan memudahkan untuk melakukan transaksi yang lebih luas dengan melibatkan para pedagang dari berbagai bangsa yang menjangkau pusat-pusat perdagangan.

Pertukaran komoditas melalui sistem pasar semakin berkembang dan membentuk gugusan perdagangan yang dihubungkan dengan jalur darat maupun laut. Masing-masing kawasan membentuk sistem dan pola perdagangan yang menyesuaikan iklim dan alam. Sarana transportasi dan sistem navigasi berkembang seiring dengan jarak tempuh dan muatan barang komoditas yang terangkut. Jenis transportasi hewan, misalnya banyak digunakan di wilayah gurun Persia, Hadramaut, Haramain yang menjangkau wilayah Jazirah Arab yang berhubungan dengan Punisia sejak 1.200 tahun SM. (Hitti, 2006). Cina daratan yang mencapai wilayah pantai Guangzhu dan Macau juga banyak digunakan tenaga transportasi hewan. Begitu juga transportasi komoditas dari Gujarat, Malabar, dan Bengal yang mencapai Pantai Koromandel (Schrieke, 1960). Untuk kawasan Nusantara, transportasi laut dan sungai menjadi sarana transportasi yang penting pada masa awal perdagangan. Banyaknya sungai yang terhubung dengan kawasan produk komoditas rempah yang kemudian disalurkan melalui sarana pelabuhan sebelum disalurkan ke berbagai kawasan menjadi narasi sejarah awal konglomerasi dibangun. Setelah dibuat jalur darat dengan transportasi secara intensif menggunakan hewan, maka terjadi koneksitas ekonomi dari sungai dan laut ke darat atau sebaliknya.

Perkembangan perdagangan kawasan Nusantara tidak lepas dari pengaruh kuat proses dan perluasan jaringan perdagangan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara pada masa awal komersialisasi sudah membentuk sistem perdagangan dengan jangkauan yang luas (Reid, 2015). Jaringan perdagangan tersebut menjangkau Asia Timur, Asia Barat, Eropa, dan Asia Selatan, terutama India yang kemudian mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan subur dan menghasilkan berbagai produk pertanian tropis menjadi "pasar" yang ramai untuk aktivitas perdagangan dari berbagai bangsa.

Kontak-kontak dan sistem perdagangan awal lebih banyak dilakukan oleh para pedagang besar dengan memanfaatkan jalur laut dan kota-kota pelabuhan yang hampir semua kawasan memiliki. Komoditas yang paling banyak diperdagangkan disamping hasil kerajinan, *handicraft*, alat-alat

rumah tangga, keramik dan hasil tambang, juga berbagai komoditas rempah. Pada masa kedatangan para pedagang Eropa, jalur perdagangan dengan komoditas utama rempah ini sering disebut sebagai jalur rempah (*spice route*). Hal itu karena komoditas utama pada masa Eropa lebih banyak didominasi komoditas rempah. Sebagai jalur besar (*groote weg*) yang dilalui pedagang-pedagang dari berbagai bangsa Asia dan juga Eropa pada masa berikutnya, telah mempercepat kemajuan perdagangan antarbangsa di Asia Tenggara. Ramainya perdagangan di Asia dan khususnya di Asia Tenggara dengan berbagai keragaman komoditas serta sistem pasar yang dibangun, baik dengan sistem *barter* maupun jual-beli dengan sistem komersial menjadi karakter perdagangan awal yang penting (Wade, 2015).

Pertemuan berbagai bangsa yang diikat oleh sistem ekonomi berjejaring dunia maritim menjadi penopang kuat adanya proses kosmopolitanisme pada masa modern awal (Reid, 2015). Pada periode 1200-an sampai 1500-an menjadi periode yang menentukan proses yang kuat jaringan rempah setelah kekuasaan "ketimuran" Cina, India, dan Arab mulai mencapai puncaknya dalam hal perdagangan. Munculnya pusat-pusat ekonomi komersial dan kota-kota pelabuhan menjadi saksi bagaimana perkembangan kosmopolis, terutama kosmopolis rempah yang berkembang menjadi daya konsentris motif ekonomi dari berbagai belahan dunia.

Pada saat yang sama, apa yang disebut "*religious revolution*" menjadi titik awal modernisasi dengan berbagai perubahan sosial-budaya pada tingkatan kota dan kawasan (Reid, 2015). Perubahan spasial juga terjadi, yang secara geografis kemudian membutuhkan berbagai sarana teknologi, transportasi dan berbagai sistem komersialisasi yang mendukung proses kosmopolis rempah dengan jangkauan yang lebih luas. Dukungan modernitas tersebut juga yang mempercepat pertemuan berbagai bangsa dari berbagai kawasan. Berbagai motif yang melatarbelakangi proses kosmopolis telah membentuk ikatan-ikatan hibridisasi pada tingkat global maupun lokal. Paling tidak, sampai pada tahun 1688 atau dapat dikatakan pada awal abad XVIII nanti, proses hibridisasi menjadi pengikat kultural pada tingkat lokal sebagaimana sistem kosmopolis ini berjalan.

Lebih jauh, jalur perdagangan dan terutama komoditas "rempah", kemudian menghubungkan dan mempertemukan pedagang-pedagang dari berbagai bangsa di Nusantara. Hal ini bukan berarti, pola perdagangan yang berpusat di kawasan Asia Tenggara menyusut. Namun, justru dengan kehadiran pedagang-pedagang ke Nusantara, identitas-identitas lokal mulai mendapat tempat pada proses kosmopolis yang semakin mengglobal. Aktivitas ekspor-impor berbagai komoditas melalui jalur laut menjadi kebiasaan yang semakin menumbuhkan kawasan Asia Tenggara dan khususnya Nusantara sebagai kawasan yang melakukan konglomerasi dan bersifat komopolis.

Begitu juga, di wilayah Asia dan bahkan Afrika, para pedagang Nusantara, dapat melakukan aktivitas perdagangan dengan pedagang-pedagang Jepang, Tanjung Harapan, Malaka, India, Afrika, Ormuzd, Aden, Cochin, Formosa, Tiongkok, kemudian Filipina (Mohanda, 2020; Wade, 2015). Hal yang unik terjadi di Nusantara, bahwa jalur rempah ini harus melewati pos-pos penting sebagai tempat persinggahan dan jual-beli berbagai komoditas. Dari pos utama, penyaluran komoditas kemudian dilanjutkan dengan perahu-perahu melalui sungai-sungai besar sebagai sarana transportasi memasuki ke wilayah pedalaman. Begitu juga sebaliknya, jika ada produk pedalaman yang akan diekspor melalui sungai dan kemudian dilanjutkan menuju pelabuhan, maka tidak heran, pusat-pusat pertumbuhan kawasan muncul di kota-kota pantai (Sutjipto, 1983). Jalur rempah Nusantara sendiri dimulai dari Samudra Pasai, Barus, Riau Linggau, Padang, Pantai Silebar, Palembang, Banten, Cirebon, Demak, Gresik, Makasar, Buton, Banda, dan Ternate (S.C. Wibisono, 2020). Sepanjang Pantai Utara Jawa sejak abad VII, aktivitas perdagangan tidak hanya terjadi antarpelabuhan, tetapi juga antarpasar yang menghubungkan dengan pusat-pusat perkebunan dan pertanian sebagai sumber komoditas utama di pedalaman (Sutjipto, 1983).

Berbagai komoditas pertanian dan kerajinan menjadi daya tarik hadirnya para pedagang untuk melakukan transaksi sebagaimana beras, lada hitam, cengkih, batu mulia, tembikar, dan barang-barang keramik dari satu wilayah ke wilayah lain (S.C. Wibisono, 2020). Pemanfaatan angin musim dan temuan kompas sebagai petunjuk arah menjadi penting dalam arus besar perdagangan melalui jalur rempah ini (Reid, 2004). Jalur ini tidak hanya mempertemukan berbagai suku bangsa, akan tetapi juga menghasilkan proses diaspora berbagai etnis dengan berbagai tradisi dan jenis “ekonomi kreatif”. Pengaruh kuat jalur ini tidak hanya tepat di jalur rempah, tetapi juga daerah-daerah penyangga yang terdampak oleh aktivitas di jalur ini.

Salah satu daerah penyangga yang perlu mendapat perhatian adalah Jepara. Kota ini memiliki perkembangan sejarah budaya dan ekonomi yang melampaui daerah-daerah lain yang dilalui jalur rempah. Letaknya yang strategis dan memiliki kawasan laut yang cukup baik untuk bersinggah kapal-kapal besar maupun kecil. Pulau Muria, adalah sebutan kota pelabuhan Jepara yang sebelum abad XVI, masih terpisah dengan Pulau Jawa (de Graaf, Pigeaud, 1985; 38). Kota Jepara, tidak banyak diketahui kapan kota ini muncul. Kata Jepara itu sendiri, berasal dari kata “ujung” yang berarti tanah pojok yang rendah, berada di sekitar muara. Tanah ini sering menjorok ke laut yang kemudian disebut “delta”. Dilihat dari fungsinya, posisi tanah seperti itu sering digunakan sebagai pelabuhan. Dalam tradisi pantai, kata “ujung” sering disamakan dengan pelabuhan. Di samping “ujung” juga digunakan “ujungan”, tetapi kata itu jarang

digunakan, namun artinya sama sebagai pelabuhan (Lekkerkerker, 1931).

Dalam pengucapan kata "ujung" dalam bahasa Jawa diambil suku kata terakhir "*Jung*" dan berasimilasi dengan huruf berikutnya. Kata Jepara diyakini dari kata Ujungpara, Juaipara, yang kemudian menjadi Jepara atau Japara. Kata "para" artinya 'pergi sekarang', 'pedagang keliling', 'pedagang eceran' (Lekkerkerker, 1931). Jepara atau Japara maksudnya adalah tanah ujung atau delta yang digunakan sebagai tempat perdagangan.

Sementara Demak yang muncul belakangan, kemudian menjadi mitra Jepara sebagai penghasil padi dan pemasokpadi dengan pengiriman melalui selat Muria sebelum terjadi pendangkalan secara total. Sementara sebelah pantai utara Pulau Muria menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal besar yang berasal dari berbagai bangsa melalui Malaka, Jepara, dan menuju Maluku dan sebaliknya (Pires, 2015). Menyatunya Pulau Muria (Jepara) dengan Pulau Jawa akibat sedimentasi yang sempurna di Selat Muria pada abad XVII, semakin memaksimalkan pelabuhan Jepara sebagai pusat ekspor-impor komoditas dari dan ke seluruh penjuru kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan Eropa. Di sisi lain, juga semakin intensif fungsi pelabuhan untuk pengiriman komoditas dan hasil pertanian ke pelabuhan-pelabuhan Juana, Tuban, Bali sampai ke Maluku serta ke Cirebon, Batavia menuju Malaka (de Graaf, Pigeaud, 1985).

Jepara sebagai wilayah dan sekaligus sebagai "kota" pelabuhan di pantai utara Jawa setelah menyatu dengan Pulau Jawa, tidak hanya terekam sepotong-potong dalam berbagai sumber, baik arsip, sumber tercetak sezaman maupun peta yang muncul pada masa kolonial Belanda, tetapi belum pernah ditulis dalam bentuk tulisan yang komprehensif. Jaringan penting yang pernah muncul dan membangun Jepara dalam rentang waktu yang panjang baik dalam jaringan ekonomi, politik, sosial-budaya, seni, dan bahkan agama seolah hilang dalam kebesaran sejarah kolonial yang mendominasi historiografi Indonesia. Dalam kajian sejarah lokal dengan merujuk pada tema jaringan perdagangan pun, dimensi kolonial sentris sangat kuat. Konglomerasi misalnya, sebagai gejala pertumbuhan ekonomi kapitalistik dengan pusat-pusat pertumbuhan dari berbagai belahan dunia yang muncul pada masa sebelum kolonial Eropa, tidak pernah menjadi tema dan bahan sejarah penting dalam merekonstruksi jaringan ekonomi, khususnya di Nusantara (Wade, 2015 ; Cote, 2003). Konglomerasi yang terbentuk secara historis yang membentuk wilayah kosmopolitan dengan melibatkan berbagai bangsa telah membentuk pola, kecenderungan dan dinamika ekonomi, sosial dan bahkan budaya-keagamaan tidak hanya pada tingkat global, tetapi juga lokal. Jepara yang mengalami konglomerasi sejak abad VII dengan hadirnya pedagang-pedagang lokal sepanjang pantai utara Jawa dan pedagang dari Campa, Cina, dan bahkan pada periode

berikutnya Jepang yang berdampak luas tidak pernah menjadi perhatian para sejarawan.

Sangat tidak mudah menemukan pustaka komprehensif terkait sejarah Jepara yang terhubung dengan kajian-kajian konglomerasi dan jalur rempah dan sutra. Cote, walaupun tidak secara khusus mengkaji konglomerasi terkait jalur rempah pada masa awal, tetapi karyanya menjadi penting bagaimana konglomerasi di Jepara pada akhir abad XIX sampai awal abad XX menjadi kelanjutan proses panjang sejarah Jepara menjadi kosmopolitan rempah (Cote, 2003). Walaupun tidak secara jelas, Cote menggunakan konsep *Colonial legacies* (*batig slot*) yang penting bagi Jepara dengan terbentuknya dunia konglomerasi kultural dengan merujuk pada gejala 'modernisasi" yang muncul dan berkembang ketika para elite Bumiputra mensintesiskan antara "dunia Barat" dan "dunia Timur". Kosmopolitan kemudian menjadi proses kelanjutan konglomerasi karena telah terbentuk struktur dan *stilisasi* sosial-budaya yang kuat.

Schrieke (Schrieke, 1957), lebih jauh memberikan pandangan luas terkait jaringan ekonomi awal Jepara yang tidak hanya dengan wilayah pantai utara Jawa dan antarpulau, tetapi juga antarnegara. Jejaring yang intensif melalui perdagangan menjadikan Jepara muncul sebagai salah satu kota yang teramai di sepanjang pantai utara Jawa (Schrieke, 1957). Hubungan dengan Cina, India, bahkan Eropa membentuk gugusan ekonomi tersendiri yang oleh Schrieke disebut sebagai "daerah otonom" berzona eksklusif.

Penjelasan Scrieke tersebut didasarkan pada argumen bahwa, Jepara bukan sebagai peletup ekonomi dengan komoditas yang cukup. Jepara adalah wilayah yang tidak begitu subur, luas pertanian hanya 49,30 ha pada 1815 dan maksimal mencapai 117,09 ha pada 1900 (Zanden, 1990). Oleh karena itu, Jepara sebenarnya hanya sebagai "Kota Transit" dengan berbagai komoditas yang datang dari luar kota. Jejaring dan letak yang strategis sebagai kota pelabuhan menjadikan Jepara sebagai daerah yang memiliki kemampuan mewadahi arus kapitalisme global.

Apa yang disimpulkan Schrieke awalnya didukung oleh Nagtegaal (Nagtegaal, 1996) bahwa Jepara dan Pantai Utara Jawa memang pada awalnya impor barang-barang pertanian sebagaimana gula, padi, indigo, lada, tekstil, dan candu dari berbagai wilayah produsen. Akan tetapi, pada masa menjelang abad XVIII sampai dengan paling tidak tahun 1900, Jepara justru ekspor komoditas pertanian ke Makasar, Mataram dan Batavia, dan Semarang (Kurasawa, 1996).

Konglomerasi Jepara dan Pantai Utara Jawa semakin tampak ketika memasuki masa liberal tahun 1880-an. Berakhirnya Tanam Paksa, 1870, yang lebih memberikan peluang ekonomi pada kelompok elite, semakin kuat pada masa liberal dengan berbagai kebebasan aturan yang didasarkan pada

Undang-Undang Agraria, *Agrarische Wet 1870* (Furnivall, 1944; Kurasawa, 1996). Di sisi lain, liberalisasi ekonomi justru memperluas dan memperkuat konglomerasi dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh elite (Kian, 2006). Walaupun, cara-cara konglomerasi elite ini sudah dimulai sejak masa sebelum Tanam Paksa diperkenalkan, 1740 (Kian, 2006). Bahkan, Reid lebih jauh menelusuri awal masa modern dengan menunjukkan kontak-kontak perdagangan pada abad XIV dan sebelumnya yang banyak dilakukan kelompok elite (Reid, 1988). Van Niel lebih fokus bagaimana pondasi ekonomi pantai utara Jawa menjadi daya tarik munculnya kolonisasi Arab, Cina, dan Eropa yang kemudian mengubah Pantai Utara Jawa semakin memiliki posisi penting dalam struktur jaringan ekonomi global (van Niel, 2005).

Kesimpulan sejarawan di atas (Reid, 1988; Schrieke, 1957; Nagtegaal, 1996; Kian, 2006; van Niel, 2005) telah memberikan sudut pandang kesejarahan jejak jalur rempah yang mengalami perubahan yang signifikan dalam membangun konglomerasi maupun kontestasi wilayah pantai utara Jawa yang kemudian membentuk wilayah kosmopolitan.

Salah satu aspek penting sejarah konglomerasi Jepara khususnya dan pantai utara Jawa pada umumnya adalah adanya perubahan struktural elite akibat relasi ekonomi yang kompleks dan luas yang mendasar pada jalur rempah (Furnivall, 1944). Kompleksitas itu mengakibatkan pola-pola pluralitas dan sekaligus munculnya kelompok-kelompok elite yang kemudian memainkan peran penting dalam jaringan ekonomi lokal, regional, maupun internasional (Kian, 2006). Proses kapitalisasi yang melibatkan berbagai bangsa itu mencapai puncaknya ketika perdagangan laut dengan jalur-jalur utama, jalur sutra (*silk road*) dan kemudian muncul jalur rempah, mendinamisasi wilayah Asia Tenggara (Reid, 1988). Reid menamakannya sebagai negeri di bawah angin (*The Land below The Wind*). Koneksitas jalur Asia Barat, Asia Timur dan kemudian menuju Asia Tenggara memperkuat dugaan bahwa jalur rempah menjadi "*grand design*" munculnya konglomerasi bagi wilayah-wilayah yang dilalui.

Lebih jauh, pertemuan berbagai bangsa dengan keragaman kepentingan, telah mereproduksi tidak hanya konglomerasi budaya, tetapi lebih jauh melahirkan hibridisasi kultural di Jepara (Cote, 2003). Kewacanaan kolonialisme (*Colonialism Discourse*) kemudian menjadi setting dialektik ketika sinergisitas elite di Jepara telah melahirkan "bangsawan kritis" pada awal abad XX. Hibridisasi kultural yang berkembang di Jepara itu sangat dimungkinkan karena jaringan, ekspansi, intervensi kolonial yang tidak hanya dalam perdebatan sistem kolonialisme yang akan membangun "negeri imajiner" (*Netherlands-Indie*), tetapi juga praktik-praktik kolonial yang lebih mendominasi dan menghegemonik (Locher-Scholten, 1994). Dialektika dalam "komunitas kolonial" di tingkat lokal itu yang kemudian melahirkan

hibriditas dialektik baik dalam bentuk struktur politik kolonial, sistem ekonomi sampai pada pola-pola kultural.

Untuk merekonstruksi perdebatan para ilmuwan di atas, perlu dilakukan kajian-kajian sumber-sumber arsip kolonial, sebagaimana *Atlas van Tropisch Nederland: Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in Samenwerking met den Topografischen Dients in Nederlandsch-Indie* menjadi petunjuk awal bagaimana jalur-jalur konglomerasi tumbuh pada akhir abad XIX dan awal abad XX. *Memori van Overgave (MvO) 1921—1930*, *Memori van Resident Semarang P.J. Bijleveld, 2 Juni 1930* sangat informatif terkait peran Semarang dalam menumbuhkan Jepara pascaperpindahan pelabuhan dari Jepara ke Semarang. MvO itu didukung dengan informasi melalui *Kolonial Verslag* 1890-an dan diteruskan dengan *Indische Verslag* pada tahun 1920-an. Mengkasi kosmopolis pada masa kolonial sangat penting untuk menelusuri jejak konglomerasi prakolonial. Dengan demikian, aspek kronologi konglomerasi dalam rentang waktu yang panjang akan dapat ditelusuri yang akhirnya dapat untuk menjelaskan terbentuknya kosmopolis pada tingkat lokal.

Sebagai kajian sejarah, proses terbentuknya kawasan dengan pola pertumbuhan kapitalisasi yang melibatkan berbagai etnis, komoditas, dan kepentingan sering disebut sebagai proses kosmopolitan itu akan dilihat dalam rentang waktu yang panjang (Cote, 2003; Dobbin, 1991). Sebuah proses global dengan menyatukan berbagai aktivitas berkarakter diversitas lokal menjadi cara bagaimana mengungkap jaringan kosmopolis. Reaksi diversifikasi lokalitas sebagai reaksi terhadap adanya kepentingan ekonomi, sosial, budaya, agama, bahkan politik menjadi salah satu batasan untuk menjelaskan proses konglomerasi sampai munculnya kosmopolitan di Jepara (Ulst, 2005). Reaksi-reaksi itu ditentukan oleh kekuatan daya tawar (*bargaining power*), pelibatan agen-agen pasar, kualitas kontrol komoditas sampai dimungkinkannya pelibatan berbagai variable dalam proses konglomerasi, sebagaimana relasi kapital, kekuasaan, tradisi, dan jejaring (Ulst, 2005). Proses konglomerasi yang kompleks tersebut kemudian membentuk budaya kosmopolitan yang hibrid.

Proses kosmopolitanisme dalam tekanan politik dan ekonomi tertentu, sebagaimana ketika awal kolonialisasi Eropa di Nusantara, memunculkan berbagai reaksi-reaksi, baik berpola resistansi, adaptasi, bahkan sampai kolaborasi (Kartodirdjo, 1973). Hal yang sama ketika kosmopolitanisme itu terjadi pada saat jalur rempah terbuka lebar, tidak hanya praktik-praktik eksploitasi, baik lahan maupun tenaga kerja, tetapi juga adanya proses kolaboratif yang memungkinkan adanya pertumbuhan kapitalisasi lokal yang berproses mereproduksi hibriditas lokal (Furnivall, 1944; Boeke, 1926, 1953; Young, 1995).

Pelibatan kepentingan (*vested interest*) tidak hanya melahirkan konflik, sebagaimana yang sering ditulis sejarawan konvensional, tetapi juga melahirkan sinergisitas antara intervensi global dan entitas lokal yang berproses secara linier, tumpang tindih, akan tetapi saling menyatukan (Lichtenstein. 2013; Weber, 2018). Oleh karena itu, restrukturasi dalam berbagai lapisan baik secara administrastif, strategi maupun bentuk-bentuk mekanisme dengan apa yang disebut kosmopolis dan hibridisasi menjadi strategi bagaimana lokalitas hadir dalam proses global atau berkontestasi secara global (Lichtenstein, 2013).

Kosmopolitanisme dan hibriditasi menjadi batasan teoritik, untuk menjelaskan perubahan-perubahan struktural Jepara pada masa kolonial. Perspektif *postcolonial*, menjadi sangat penting dalam menjelaskan konglomerasi, kosmopolitan, hibriditasi dan kontestasi Jepara. *Postcolonial* dalam penelitian ini tidak meletakkan apa yang disebut oleh Julian Go sebagai "*colonial legacies*" yang menjadi "objek kritik" terhadap hegemoni kolonial atas koloni (*territorial expansion*, *political intervension*) dengan sudut pandang pascakolonial, akan tetapi lebih mengkonvergensi "*colonial legacies*" tersebut dengan aspek-aspek historisitas secara kritis (Julian Go, 2016).

Sudut padang tersebut akan menjadi berseberangan dengan apa yang dikatakan Bhabha bahwa kolonialisme sebagai perpanjangan jaringan pada jalur rempah, telah menciptakan realitas sosial (*a social reality*) yang didukung oleh kekuasaan yang hegemonik dan eksploitatif dengan sistem hierarkisnya yang ketat (Taha, 2019). Realitas sosial yang kemudian disebut sebagai hibriditas itu, oleh Bhabha dinamakan "*Culture in-between*", karena hibriditas yang muncul bukan mengkonvergensi, tetapi lebih membuat penjarakan secara politik. Ini yang oleh Bakhtin disebut sebagai hibriditas organik (*organic hybridity*) (Young, 1995). Pandangan Bhabha tersebut perlu dikritisi dengan membuktikan melalui kajian-kajian lokal, sebagaimana di Jepara dan pantai utara Jawa, di mana konvergensi dan sinergisitas justru mereproduksi konglomerasi dan hibriditas lokal. Pola ini disebut dengan hibriditas dialektik (*dialogizes hybridity*) (Young, 1995) yang mengarah terbentuknya kosmopolis Jepara.

Untuk mengatasi penjarakan itu dan menghadirkan narasi hibridisasi dialektika, maka dibutuhkan analisis historis, yang lebih empiris dengan melihat kausalitas ideologis (*causal ideologies*), sehingga sinergitas dan hibriditas identitas, akan muncul dalam struktur kontestasi yang utuh (Taha, 2019; Philpott, 2000). Dengan demikian, buku ini akan menarasikan kosmopolis sebagai suatu pola "*dialogizes hybridity*", yang mendialektikan unsur-unsur budaya tertentu dengan budaya lain melalui ketersinggungan kultural (*cultural-intersections*) (Young, 1995). Jalur rempah dan

implikasinya dalam hal ini kemudian menjadi *reasonable* dalam membangun hibriditas dengan atas nama kosmopolis dan hibridisasi.

BAB II
Jaringan Maritim dan Perdagangan Jepara

Bab ini menjelaskan awal munculnya konglomerasi yang dibangun atas dasar jaringan perdagangan internasional. Pertemuan berbagai pedagang dan disambut dengan berbagai komoditas lokal menjadikan Jepara menjadi kota pelabuhan penting jauh sebelum munculnya kolonial. Proses ekonomi dibalut dengan kontak budaya semakin memperkuat proses konglomerasi dengan pola jaringan yang semakin luas. Hal ini yang kemudian menjadi penting untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana konglomerasi membentuk kosmopolitanisme pada tingkat lokal.

Kepentingan ekonomi telah menjadikan Jepara mampu melampaui atau paling tidak menyamai kebesaran nama Malaka, sehingga Jepara menjadi kota pelabuhan yang menjadi tujuan para pedagang dari berbagai wilayah setelah bersinggah di Malaka. Di samping itu, Jepara juga penting dalam jaringan ekonomi lokal dengan komoditas yang tidak jauh berbeda dengan komoditas yang dikirim dari dan ke berbagai wilayah dan negara. Di sinilah, fungsi Jepara menjadi strategis dalam proses-proses konglomerasi yang kemudian membentuk kosmopolis di pantai utara Jawa.

A. Aspek Geografi yang Menguntungkan

Jawa merupakan salah satu pulau di Nusantara yang sudah dikenal oleh para pedagang Cina, Jepang, dan Korea sejak tahun 1000—1400. Mereka memperoleh cengkih dari Jawa melalui pedagang-pedagang yang singgah di Jawa. Melalui jalur Laut Jawa, kemudian memasuki kepulauan Maluku dan menelusuri wilayah Zulu sampai menuju Cina, Jepang, dan Korea (Ptak, 1993). Cengkih juga merupakan produk andalan wilayah Maluku, terutama di Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan, dan Ambon. Perdagangan cengkih ini membentuk jalur perdagangan melalui Sulawesi, Sulu, dan kemudian mencapai Cina Selatan. Di sisi lain, cengkih juga menjadi salah satu komoditas yang dikirim melalui Laut Jawa yang kemudian dikirim ke

berbagai wilayah di Jawa dan kemungkinan juga ke wilayah Asia Tenggara (Ptak, 1993).

Cina merupakan pengimpor cengkih terbesar terutama pada masa Dinasti Sung. Jaringan cengkih ini tidak hanya dalam jaringan internal Nusantara semata, tetapi sudah mencapai wilayah lautan Hindia. Cengkih Nusantara menjadi daya tarik para pedagang Cina, Jepang, dan Korea, karena menjadi bahan aromatik untuk berbagai macam kuliner yang digemari oleh masyarakat Asia. Hasil kajian Ptak tersebut, memberikan sanggahan atas kesimpulan bahwa cengkih tidak pernah mencapai wilayah-wilayah lain selain Maluku, sebelum kedatangan Eropa di Nusantara. Cengkih merupakan salah satu kasus penting bagaimana jaringan perdagangan telah menghubungkan berbagai wilayah sebelum kedatangan Eropa. Bukan hanya cengkih yang menjadi komoditas jaringan perdagangan tersebut, juga tekstil dan permata (Ptak, 1993). Tekstil dari Cina ini pada masa kolonial sangat penting dalam memberikan pasokan bahan mentah dan sekaligus bahan jadi tekstil ketika terjadi kelangkaan bahan baku akibat petani Nusantara, khususnya Jawa, ditarik sebagai tenaga kerja perkebunan pada masa Tanam Paksa, yang secara resmi berjalan pada 1830—1870 (Houben, 1994; Breman, 2015).

Tidak ada informasi terkait pentingnya Jepara pada awal jalur perdagangan tersebut terbentuk. Namun pada abad VII, mulai disebut kota-kota di Pantai Utara Jawa, termasuk Jepara sebagai bagian dari jalur perdagangan khususnya dengan Cina, Jepang, dan Korea. Jepara merupakan wilayah yang berada di bawah pengaruh Kalingga dan sekaligus sebagai kota pelabuhan mulai disebut kira-kira antara tahun 618—906. Namun, jika nama itu dirunut dengan mitologi Jawa, maka bisa diperkirakan lebih tua lagi, yaitu sebuah wilayah bersama dengan Juana yang menjadi bagian dari kerajaan Sandang Garba, rajanya para pedagang (*koning der koopleiden*) yang memiliki genealogi dengan Kerajaan Medang Kamulan (A. Supriyono, 2013, 27—39).

Sebagai wilayah kerajaan, Jepara memiliki pengaruh cukup luas terutama untuk jaringan perdagangan di Pantai Utara Jawa. Aktivitas perdagangan yang menggunakan jalur laut dan sungai yang pada masa itu menjadi ciri transportasi barang dan orang jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pada abad XI, orang-orang Campa, Keling, Arya, Khmer, Singhala, Pandikira, Drawida, dan Remen sudah berada di kota pelabuhan Jepara, Tuban, dan Gresik (Kayoko, Shiro, Reid, et. al., 2013: 98). Keberadaan bangsa-bangsa "pedagang" tersebut memberikan stimulus pergerakan barang komoditas dari dan ke Jepara. Otonomi Jepara sebagai "kota" pelabuhan pada masa prakolonial, menunjukkan bahwa wilayah ini sudah menjadi salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelabuhan.

Jepara sebelum abad XV, sebagai wilayah tersendiri terpisah Pulau

Jawa, memiliki gunung yang bernama Gunung Muria dengan hutannya yang lebat dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk yang berada di lereng dan "kota" (Burger, t.t.). Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, Jepara masih merupakan pulau tersendiri yang dipisahkan oleh Selat Muria (Soetjipto, 1983). Keberadaannya tidak hanya memiliki pelabuhan yang cukup luas, tetapi dikelilingi laut yang sangat memungkinkan melakukan jaringan transportasi ke wilayah lain di pantai utara Jawa, sebagaimana Juana, Tuban, dan Gresik. Ketiga pelabuhan yang berpengaruh itu memiliki jaringan ekonomi yang intensif dengan Jepara dalam berbagai komoditas. Dari pelabuhan Jepara dapat langsung menuju Juana, Tuban, dan Gresik melalui Selat Muria. Jarak yang dekat, arus laut yang tidak membahayakan memungkinkan adanya pelayaran dan perdagangan melalui Selat Muria antara Jepara dengan kota pelabuhan di pantai utara Jawa.

Berdasarkan ilustrasi keberadaan Pulau Muria sebelum terjadinya proses sedimentasi, posisi Jepara, Kudus, dan Pati menjadi satu pulau dengan Jepara terletak dalam suatu kawasan pinggir pantai. Jepara di bibir Pantai Utara, sedangkan Kudus dan Pati di bibir Pantai Selatan. Sementara Semarang, berada di bibir pantai Utara Pulau Jawa sejajar dengan Purwodadi dan Rembang. Demak belum muncul dan diperkirakan baru muncul pada abad XV(*stuffmape.garage*). Dengan demikian, Jepara, Kudus, dan Pati menjadi satu kesatuan dalam satu pulau.

Hubungan antarwilayah dibangun atas dasar kebutuhan ekonomi. Berbagai komoditas dikirim melalui laut dan sungai. Terdapat sungai besar yang menjadi penghubung antarwilayah, yaitu Sungai Sayung dan Sungai Juana yang melintas dan memisahkan antara Jepara dengan Demak dan Pati. Setelah sedimentasi, fungsi sungai tersebut sangat penting sebagai jalur transportasi barang dan orang, di samping jalur darat yang sangat terbatas (Soekmono, 1967). Hampir seluruh transportasi ekonomi dilakukan di laut akibat tata letak geografis yang sangat memungkinkan. Kebiasaan aktivitas ekonomi di laut dan sungai menjadi bagian penting bagaimana Jepara pada pascasedimentasi dan tumbuh sampai masa kolonial sebagai jalur transportasi yang strategis.

Peta di bawah menunjukkan ilustrasi posisi geografis Jepara dikelilingi laut yang sangat memungkinkan tradisi kemaritiman melekat di Jepara. Ilustrasi posisi Jepara sebagai wilayah tersendiri lepas dari Pulau Jawa tersebut memang perlu ada kajian mendalam, baik secara geografis, demografis, maupun sosiologis. Kajian arkeologi dan sejarah kemudian sangat penting dalam mendalami wilayah yang tersedimentasi maupun tidak untuk melihat perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Pola perubahan geografis dengan percepatan jaringan pasar yang luas sangat memungkinkan adanya perubahan-perubahan struktur sosial, budaya,

bahkan secara ekonomis ada perubahan orientasi pasar.

Selat Muria yang menghubungkan berbagai wilayah dan kota di pantai utara Jawa memberikan kesempatan pedagang-pedagang berbagai komoditas melakukan transaksi dari dan ke Jepara. Hal ini sangat dimungkinkan karena jangkauan perahu-perahu dan *jung-Jung* dapat mencapai wilayah laut dangkal sebagaimana di Selat Muria tersebut. Terbentuknya kawasan perdagangan di sekitar "Pulau Muria" dan Selat Muria ini kemudian menjadi penyambung penyaluran komoditas dari kapal-kapal besar yang berlabuh di pelabuhan utama.

Gambar 1. Ilustrasi Selat Muria sebelum abad XV
(Jepara dan Selat Muria sebelum terjadi sedimentasi)
Sumber: *stuffmap.garage*

Ilustrasi di atas sesuai dengan upaya rekonstruksi posisi Jepara hubungannya dengan keberadaan kerajaan Mataram Hindu di Medang Kemulan (Soekmono, 1967). Medang Kemulan merupakan wilayah yang berada di pinggir laut dekat dengan Semarang dan Demak yang diperkirakan berada di Distrik Grobogan (Soekmono, 1967). Temuan keramik dan beberapa petilasan candi di bagian selatan diyakini kuat sebagai bukti letak Medang Kemulan sebagai kerajaan Mataram Hindu berada di Distrik Grobogan. Dekatnya dengan Jepara, menjadikan Medang Kemulan ini memberi pengaruh kuat terhadap pembentukan budaya awal di Jepara. Tidak heran, Jepara sebagai kota pelabuhan, unsur-unsur Hindu ini juga terlihat jelas dengan hadirnya candi, gaya arsitektur, motif ragam hias sampai tradisi wayang yang diyakini oleh masyarakat Jepara.

Temuan letak kerajaan Mataram Hindu kuno tersebut semakin meyakinkan bahwa Jepara tidak hanya memiliki letak geografis yang berjalur laut dan sungai yang baik, tetapi juga dekat dan terhubung dengan pusat kerajaan Hindu Jawa, Mataram, pada masa berikutnya. Hal ini menjadi

sangat penting untuk menjelaskan hubungan Mataram Islam dan Jepara pada masa setelah Mataram pindah ke wilayah Selatan Jawa. Ikatan ekonomi yang kuat yang dibangun pada masa kuno ini berlangsung terus, terutama terkait kebutuhan beras dan ekspor ke luar Jawa dan luar Nusantara.

Proses sedimentasi di Selat Muria satu sisi telah menghilangkan jaringan ekonomi laut dangkal di pantai utara Jawa, tetapi di sisi lain mempermudah tumbuhnya jalur darat yang menghubungkan beberapa wilayah sebagaimana antara Jepara dengan Demak, Semarang dan bahkan ke Mataram. Di samping itu, juga wilayah-wilayah bagian timur sebagaimana Pati, Juana, Rembang, Tuban sampai Surabaya juga semakin mudah dijangkau. Ke arah selatan dapat menempuh Purwodadi, Blora, Mataram (Surakarta), Jipang (Bojonegoro) sampai Madiun terhubung. Begitu juga Demak, Semarang, Ambarawa menuju Mataram (Yogyakarta). Ilustrasi di bawah menunjukkan jaringan transportasi dari Jepara ke beberapa wilayah terbentuk setelah proses sedimentasi.

Gambar 2. Ilustrasi ketika Jepara sudah terhubung dengan Jawa bersamaan dengan proses sedimentasi Selat Muria.

Sumber: *stuffmap.garage*

Selat Muria, disebut sebagai selat yang terkait dengan keberadaan Gunung Muria yang merupakan gunung yang terletak di antara Jepara dan Kudus. Gunung ini memiliki ketinggian 4000 kaki (dpl). Dikaitkan dengan lereng bagian utara, gunung ini memiliki keterkaitan dengan Gunung Clering (Tjiliring) yang dekat dengan laut dalam, sehingga dapat dilalui kapal-kapal besar. Lepas batas Gunung Clering, ada Pulau Mandalika yang persis berhadapan dengan Gunung Clering (Eysinga, 1842). Gunung Muria ini diperkirakan muncul pada tahun 33 SM yang masih aktif dan membentuk pulau.

Di samping dikelilingi laut, Jepara juga dikelilingi pulau-pulau penting, yaitu Pulau Mandalika, Pulau Penganten dan Karimunjawa. Hubungan ketiga pulau besar itu sangat penting dalam pengiriman barang-barang dan tempat transit sebelum ke pelabuhan Jepara. Pola perdagangan antarpulau diperkirakan sudah terbentuk dengan berbagai komoditas hasil pertanian, perkebunan, terutama kacang-kacangan dan beras. Begitu juga garam dan kayu jati menjadi komoditas penting menjelang masa kolonial (Eysinga, 1842). Pola perdagangan yang terbangun secara lokal, regional, dan kemudian berkembang luas mengikuti jalur rempah sebelumnya, tetapi konsentrasi tujuannya lebih mengarah ke Eropa. Pada masa kolonial ini, jaringan Jepara masih memiliki jangkauan yang melampaui wilayah lain di pantai utara Jawa sebelum kekuasaan kolonial Belanda memindahkan pelabuhan ke Semarang pada tahun 1770-an.

Jaringan perdagangan yang terbentuk, kemudian menjadikan Jepara sebagai pusat pertemuan pedagang-pedagang dari Asia Barat, Asia Selatan, Eropa, dan Asia Timur, tetapi juga sekaligus sebagai pusat pasar dunia. Jaringan ekonomi pada abad XVI, telah menempatkan Jepara sebagai tempat transaksi dan pertukaran barang dari berbagai negara dengan keragaman komoditas. Berbagai komoditas pertanian, perkebunan sampai kerajinan menjadi komoditas unggulan dalam sistem perdagangan yang menggunakan jalur yang dikenal dengan jalur rempah itu. Walaupun, sampai pada masa kolonial dan pascakolonial, Jepara tidak pernah disebut sebagai tempat penting dalam jalur rempah. Hal ini karena kuatnya pandangan kolonial-sentris yang menempatkan narasi prakolonial sebagai mitos. Padahal, Jepara sebagai wilayah yang menjadi transit dan persilangan jalur para pedagang, tumbuh dengan jejaringan lokal, regional, dan bahkan internasional (Schrieke, 1957).

Kedudukan Jepara sebagai wilayah yang memiliki "otonomi sendiri" dan sekaligus sebagai kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa menjadi penting ketika kota ini menjadi penghubung kota-kota lainnya sebagaimana Kudus, Pati, Juwana, Grobogan, dan bahkan Semarang. Di samping jaringan internasional, jaringan lokal yang terbangun dari titik pertumbuhan Jepara ke daerah dan kota lain di Jawa maupun luar Jawa juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Jauh sebelum orang-orang Eropa memasuki Jepara, orang Cina banyak terlibat dalam jaringan perdagangan yang melibatkan Jepara dengan Makassar, Campa, Malaka, dan Ayutthaya (Reid, 2004). Arus perdagangan, terutama produk pertanian dari daerah-daerah sekitar Jepara dikirim melalui pelabuhan Jepara. Perdagangan antarpulau juga mengalami peningkatan dengan berbagai komoditas dan keragaman daerah asal. Jepara tumbuh sebagai kota bandar internasional yang bermitra dengan

Malaka dan beberapa wilayah Asia Tenggara (Reid, 2004; Furnivall, 1944). Proses munculnya Jepara dengan pola perdagangan seperti itu kemudian mengakibatkan hadirnya keragaman sosial, etnisitas, dan agama di wilayah ini yang membentuk konglomerasi-konglomerasi ekonomi, budaya, bahkan agama.

Posisi kota ini juga diuntungkan karena terletak di lereng Gunung Muria (Moria, Moerija) dan Gunung Clering serta pulau-pulau kecil yang muncul pada abad XIII menjadikan Jepara berpotensi sebagai wilayah yang berjejaring sangat luas (Eysinga, 1842). Di samping wilayah ini terletak di pantai dengan deretan pulau kecil, gunung, tetapi juga terdapat sungai yang melintas dari Sungai Marong, Sungai Gong, Banyaran, Gelis, Japara, sampai Tayu. Terdapat juga sungai-sungai yang menghubungkan dengan Tidunan dan Juwana yang merupakan daerah banyak rawa-rawa yang mengalirkan sungai sampai wilayah Jepara (Eysinga, 1842). Posisi strategis yang dimiliki kota ini kemudian sangat memungkinkan hadirnya pengaruh luar. Pada awalnya, pengaruh kuat yang terjadi berasal dari Hindu yang ditunjukkan dengan adanya bangunan candi dan bangunan yang berpola candi. Kemudian disusul dengan pendirian sebuah pusat kekuasaan (kerajaan) Kalingga pada abad VII—X yang lebih bercorak Cina (A. Supriyono, 2013). Masih perlu kajian serius terkait keberadaan Kalingga di Jepara jika dikaitkan dengan istilah Keling, Ho-Ling. Hal ini tidak hanya menyangkut nama Keling atau Kalingga atau Ho-Ling, tetapi lebih memastikan pengaruh Kalingga dalam sejarah Jepara. Hal itu dikarenakan Jepara pada awalnya merupakan wilayah yang disinyalir kuat merupakan wilayah yang dihuni komunitas Hindu-India (Van der Meulen, 1977). Hal ini didasarkan pada hadirnya orang-orang Hindu Jepara yang bermukim di Malaka pada 1377 (Schrieke, 1960). Bahkan, pada saat itu, di Malaka ada Kampung Jepara dan Keling. Kampung Keling merupakan kawasan khusus yang isinya pedagang-pedagang dari Tuban, Jepara, Sunda, dan Palembang (Schrieke, 1960: 18).

Pada abad IX, pola pelayaran yang berasal dari Arab melengkapi hadirnya Cina dan India di Jawa dengan memanfaatkan Laut Jawa, setelah mereka melewati Malabar, Ceylon, dan Kedah (Kalah Bar), kemudian Sumatra dan Jawa. Pada kesempatan itu, banyak pedagang yang berlabuh di Jepara sebelum meneruskan perjalanan ke Cina dan Campa. Jalur selat Gelasa dan Gaspar yang kemudian tembus ke Selat Malaka menjadi jalur yang paling banyak dilalui kapal-kapal dari dan ke Cina, serta ke India dan Semenanjung Arab. Sebelum abad IX, wilayah Selat Sunda dan Malaka sebenarnya masih di bawah kekuasaan Sriwijaya, tetapi seiring semakin kuatnya Malaka, pengaruh Sriwijaya semakin berkurang pada abad IX (Flecker, 2001). Munculnya Malaka sebagai jalur strategis menuju Nusantara menjadikan wilayah ini sebagai pusat perdagangan dunia. Pada abad X, fungsi

Malaka semakin intensif dalam perdagangan dunia menggantikan Pasai, Brunei, dan Jawa yang sudah terhubung dengan Cina dan Rukyu sebelumnya (Reid: 2015: 68). Munculnya Malaka, jalur rempah mengalami perubahan, yang semula dominasi Cina dan Rukyu Jepang sangat kuat. Segala transaksi yang mengambil tempat di kota-kota pelabuhan tidak pernah lepas dengan kehadiran pedagang-pedagang dari Cina dan Rukyu.

Temuan keramik Cina di Selat Sunda, khususnya yang dibuat dari Guangdong dan Zhejiang di perairan Belitung menunjukkan wilayah ini menjadi jalur perdagangan yang diperkirakan memiliki hubungan dengan Jawa. Begitu juga, orang-orang Arab yang melakukan perdagangan melalui India dan Sri Lanka dengan kapal besar bermuatan 200 penumpang biasa melalui jalur Bangka-Belitung kemudian ke Jawa. Akan tetapi, pelayaran dari Sri Lanka ini tidak semuanya menuju Sumatra dan Jawa. Sebagian ada yang langsung dari Sri Lanka menuju Cina. Kapal-kapal perdagangan dari Arab dan Sri Lanka yang berlabuh di Laut Jawa, diperkirakan termasuk yang bersandar di pelabuhan Jepara, memerlukan waktu lima bulan sebelum kembali ke Sri Lanka atau ke Cina (Flecker, 2001).

Begitu juga antara Jepara dengan Majapahit, di mana Majapahit sebagai penguasa abad XIV, merupakan mitra ekonomi, terutama beras setelah Demak. Peninggalan kerajaan ini masih dapat diketahui dengan berbagai temuan arkeologis yang terdapat di Jepara. Artefak tersebut menghubungkan Jepara (Kalingga) dengan Majapahit terutama aspek perdagangan dan aktivitas ekonomi. Pengaruh kuat Majapahit dalam perdagangan dan ekonomi sangat penting, ketika kebutuhan ekonomi itu ditunjang dengan berbagai fasilitas pelabuhan-pelabuhan penting di pantai utara Jawa sebagaimana Jepara, Gresik, Jaratan. Dukungan kuat juga dapat berasal dari sumber pertanian di atas kesuburan lahan di sepanjang Sungai Bengawan Sala dan Sungai Brantas (Soetjipto, 1983). Begitu juga kebutuhan akan produk kayu jati, melalui Bengawan Sala, pengiriman kayu jati ke Pelabuhan Gresik, Tuban, dan Surabaya dapat memenuhi kebutuhan kerajaan.

Kayu jati sebagai bahan dasar pembuatan kapal-kapal dan perahu di Juwana, pembangunan pelabuhan, rumah hunian dan peralatan rumah tangga menjadikan hasil hutan ini mendapat perhatian. Pada masa kekuasaan Pati Unus, penguasa Jepara yang dalam tulisan Pires menceritakan kondisi pelabuhan Jepara yang penuh kapal berlabuh dalam hal ini menujukkan bahwa Jepara menjadi kota pelabuhan besar dengan kebutuhan kapal-kapal besar sebagai alat transportasi niaga. Jaringan pelabuhan Jepara ini terhubung dengan Batavia, Malaka, Bali, Maluku, Monombay, Bangka dan beberapa wilayah lain sampai ke wilayah Zulu (Pires, 2015). Begitu juga, banyak dibutuhkan perahu-perahu yang mengangkut hasil pertanian dari sungai-sungai yang mengalir sekitar Jepara.

Dilaporkan pula, di pinggir pantai banyak *jung-Jung* yang berlabuh yang menunggu untuk mengantarkan barang atau orang melalui sungai-sungai. *Jung-jung* ini merupakan perahu pengangkut kecil yang sering digambarkan sebagai perahu buatan orang-orang Cina atau milik orang Cina. Banyaknya kebutuhan alat transportasi laut, baik perahu maupun *jung* menyebabkan kebutuhan akan bahan dasar alat transportasi itu, yaitu kayu jati menjadi produk yang sangat penting pada masa abad XV. Kapal-kapal itu mengangkut produk obat-obatan, lilin, madu, besi, beras, dan produk pertanian lainnya sebagai bahan makanan (Pires, 2015).

Jepara sebagai kota pelabuhan di pantai utara Jawa cocok untuk berlabuhnya kapal-kapal besar maupun kecil. Namun, beralihnya Malaka di bawah "Gubernur India", Alfonso de Albuquerque, mengakibatkan segala potensi ekonomi Jepara diperuntukkan untuk melakukan penyerangan ke Malaka. Diperkirakan jumlah kapal yang berangkat sekitar 100 kapal besar dengan muatan sekitar 200 ton. Hanya tersisa 7 kapal yang dapat kembali ke Jepara dan lebih dari 1.000 orang terbunuh dan banyak lagi yang tertangkap (Pires, 2015: 262).

Kekalahan Jepara mulai meredupkan tata niaga dan menjadi wilayah yang sedikit terisolir. Namun, karena wilayah ini termasuk memiliki lahan subur, dengan luas dataran kira-kira 3—4 *league* (sic), maka Jepara tetap menjadi daerah untuk melanjutkan perdagangan walaupun dalam batasan yang bersifat lokal dan regional. Hasil pertanian lebih banyak dari pertanian basah, baik beririgasi maupun tadah hujan, serta memiliki jenis hewan, di dalam beberapa catatan tidak disebut jenis hewan apa, tetapi memiliki daging dengan rasa yang berbeda dengan jenis hewan yang sama di daerah lain.

Pada abad XV, kota pelabuhan Jepara, Demak, Gresik, dan Surabaya, di bawah penguasa Islam. Mereka termasuk "golongan menengah" yang aktif, tidak hanya menjalankan perekonomian dengan membuat jaringan perdagangan internasional, tetapi juga menjadi penguasa lokal yang berdarah campuran (de Graaf dan Pigeaud, 1985: 13). De Graaf dan Pigeaud lebih menunjukkan aspek genealogis penguasa Islam di pantai utara Jawa dengan Hindu Majapahit dan bahkan dengan Cina. Pola perekonomian dan perdagangan penguasa baru Islam juga disinyalir merupakan kelanjutan pola sebelumnya, sistem ekonomi Hindu dan Cina. Oleh karena itu, ketika Jepara mulai mendapatkan tekanan Demak, Jepara mulai bergeser dengan mengandalkan ekonomi agraris yang pernah dibangun dan menjadi sumber ekonomi beras pada masa Majapahit. Hal ini juga diteruskan pada masa Demak. Kebutuhan beras juga selain dari wilayah Demak sendiri, tetapi tidak jarang, beras diimpor dari Jepara. Banjir dan kekeringan di Jepara menjadi salah satu sebab kebutuhan beras dan atau bahan makanan lainnya harus diimpor dari luar Demak, terlebih pada abad XIX (Suryo, 1989)

Di samping jaringan perdagangan antardaerah dengan pola monopoli, sebagaimana beras pada masa Majapahit maupun Demak, Jepara juga diuntungkan dengan letaknya yang di sepanjang pesisir utara Jawa dan memiliki gelombang laut yang landai. Hal ini menjadi daya tarik kolonial Belanda yang pada tahun 1602 terjadi kedatangan kelompok dagang VOC (*Vereeniging Oost Indie Compagne*). Kehadiran VOC ini sebenarnya merupakan proses formal bagaimana kolonial Belanda memasuki wilayah kekuasaan Mataram di wilayah pantai utara Jawa. Pada abad XVI, para pedagang Belanda sebenarnya sudah banyak yang melakukan aktivitas perdagangan, masih berupa perdagangan yang bersifat *barter* (Kian, 2006: 8). Hanya beberapa orang Belanda membawa tekstil dan candu yang ditukar dengan beras, kayu manis, dan rempah-rempah. Pelabuhan Jepara, Gresik, Surabaya, dan Sedayu merupakan pelabuhan yang menjadi pusat pertukaran barang-barang. Oleh karena itu, Demak, Jepara, dan Gresik dijadikan sebagai pelabuhan utama bagi VOC untuk pengiriman barang-barang yang akan diekspor.

Kesepakatan yang diperoleh setelah beberapa kali mengalami kegagalan ketika bernegosiasi dengan Sunan, akhirnya VOC memperoleh hak-hak otoritas untuk mengawasi dan memiliki hak penuh atas kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa dari Amangkurat I. Pada 1680-an, VOC praktis dapat menguasai dan memiliki hak otoritas penuh atas wilayah Demak, Jepara, Pemalang, dan Kudus tanpa melalui prosedur kesepakatan yang rumit dengan Amangkurat I (Kian, 2006: 29). Hal ini berbeda dengan wilayah pantai utara lain sebagaimana Semarang, yang secara jelas didasarkan pada kesepakatan antara pihak VOC dengan Amangkurat II tanggal 28 Februari 1677 (Akhyat, 2020). Kesepakatan antara VOC dan pihak Amangkurat I, berakibat pada pembukaan lahan-lahan pertanian komersial secara leluasa di Jepara, Kudus, Pemalang serta Demak dengan produk utama tebu. Setelah kuat kedudukan VOC di pantai utara Jawa, maka kemudian VOC mendirikan benteng, salah satunya benteng Jepara (*Fort Djapara*) pada abad XVI (Kian, 2006: 29). Dengan demikian, secara resmi pada 1816, VOC benar-benar menguasai Jepara sebagai pelabuhan utama untuk produk-produk ekspor (Kian, 2006:30).

Dikuasainya Jepara dalam bentuk monopoli perdagangan dengan menggunakan jalur pelabuhan Jepara, VOC dapat leluasa melakukan pelebaran usaha ekonomi komersial dengan membuka beberapa perkebunan dan beberapa pelabuhan kecil sebagai tambahan pintu masuk berbagai komoditas. Dua orang yang berpengalaman dalam bidang pertanian indigo, kemudian dipercaya untuk mengembangkan indigo di Jepara. Mereka itu adalah Dirk Slootman dan Abaraham Torop (Kian, 2006: 60). Perkebunan indigo ini tidak hanya di Jepara, tetapi diperluas sampai wilayah

Pekalongan, Wiradesa, Pemalang, Brebes, Kudus, dan Pati. Ekonomi indigo ini berkembangan pesat pada abad XVIII. Harga indigo di Jepara termasuk yang paling murah dibanding dengan Pekalongan dan Tegal. Harga indigo per lb di Jepara 44—50 *strives*, sedangkan di Pekalongan mencapai 140—170 *strives* dan Tegal mencapai 140—180 *strives*.

Permintaan indigo di Batavia meningkat, begitu juga untuk kepentingan Jepara, Kudus, Pekalongan, Pati, dan Tegal. Hal itu disebabkan pada tahun 1770-an, kenaikan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan kain meningkat. Indigo sebagai bahan dasar pewarna kain yang sangat penting pada masa VOC untuk beberapa kebutuhan. Pola kewajiban menanam indigo diserahkan kepada masing-masing bupati sebagai penguasa lokal, baik dalam persiapan lahan, tenaga kerja sampai persiapan teknis upah. Perkebunan indigo ini kemudian semakin terdesak oleh gula, ketika secara terang-terangan para pemilik saham VOC (*the gentlemen seventeen*) yang kerkedudukan di Batavia meminta dikirim gula sebanyak 3.000 *kanassers* (paket kiriman?) atau 1.125.000 Ib.

Pada 1770-an, sebelum pelabuhan pindah ke Semarang, Jepara sebenarnya sedang mengalami puncaknya aktivitas perdagangan. Permintaan hasil pertanian meningkat tidak hanya indigo dan gula juga berbagai komoditas palawija dan kayu jati. Hal penting pada abad XVII sampai awal abad XVIII bagi Jepara adalah peningkatan produksi beras yang pada perkembangannya menjadi salah satu penyebab padatnya lalu lintas laut melalui pelabuhan Jepara. Beras tidak hanya sebagai komoditas utama, tetapi juga menjadi bagian dari monopoli ekonomi baik oleh VOC maupun penguasa Mataram (Soetjipto, 1983). Peningkatan permintaan beras dan berbagai macam produk rempah juga memberikan perluasan jangkauan perdagangan sampai ke wilayah luar Jawa (Soetjipto, 1983). Dengan didukung fasilitas transportasi laut dan komoditas yang laku di pasar, Jepara menjadi daya tarik tersendiri. Selama abad XVII sampai awal abad XVIII, posisi Jepara bagi VOC merupakan pintu bagi keluar masuknya berbagai komoditas komersial (de Graaf dan Pigeaud, 1984: 52).

Bentuk monopoli oleh VOC atas wilayah sepanjang pantai utara Jawa memunculkan reaksi dari Mataram. Jepara sebagai sumber ekonomi beras bagi Mataram terganggu akibat penguasaan dan monopoli VOC. Bahkan, Mataram pernah melarang ekspor beras ke Jepara dan wilayah Pantai Utara lainnya akibat kuatnya VOC di Pantai Utara Jawa. Di samping juga dilaporkan bahwa di wilayah Mataram sendiri kekurangan beras, terutama pasca-Perang Jawa 1825—1830 (Carey, 2008). Oleh karena itu, Mataram kemudian melakukan serangkaian penyerangan ke pos-pos perdagangan yang dimonopoli VOC, terutama di Jepara (Vlekke, 1959). Akibatnya, beberapa orang Belanda meninggal dan beberapa kegiatan ekspor-impor

sempat dihentikan, baik ke Jepara sendiri maupun ke Batavia.

Penguasaan Jepara oleh Mataram pada abad XVI, menjadikan Jepara lepas dari jalur perdagangan yang semula dijalankan oleh VOC sampai akhir abad XVI. Posisi lemahnya Jepara karena penyerangan Mataram, dimanfaatkan oleh VOC dengan menempatkan Semarang sebagai pusat kegiatan ekspor-impor baru. Hadirnya Semarang sebagai kota pelabuhan baru di bawah VOC pada abad XVIII, memberikan peluang Cina muncul kembali sebagai pelaku ekonomi utama dengan tidak hanya berhubungan dengan posisi Semarang sebagai pelabuhan dan peluang baru, tetapi juga Jepara. Lebih dari 150 tahun Cina hadir di Jepara mulai muncul kembali atas kesempatan yang diperoleh melalui VOC (de Graaf dan Pigeaud, 1984: 118).

Munculnya Cina di Jepara sangat berarti ketika mereka tidak hanya melakukan aktivitas ekonomi yang pada abad XIX sudah menguasai ekonomi gula dan candu, tetapi juga mendirikan beberapa tempat ibadah "der Mooren Tempel" (masjid) yang sudah dibangun sejak tahun 1660 (de Graaf dan Pigeaud, 1984: 150). Beberapa sumber menyebut Masjid Jepara itu berdiri sejak masa Kalinyamat, tetapi banyak yang mengartikan mirip pagoda daripada masjid. Masjid ini tersusun lima tingkat, dengan menempatkan beberapa ornamen dan memiliki ruang yang langsung ke lantai dasar. Masing-masing tingkat dapat diakses dengan tangga yang dipasang pada masing-masing tingkat, sehingga dari setiap tingkatan dapat langsung melihat laut (de Graaf dan Pigeaud, 1984: 150). Sejak sepeninggal Kalinyamat, Jepara langsung di bawah Mataram yang secara de jure harus menjadi *vasal* Mataram.

Sebagai *vasal* Mataram, Jepara tidak berkembang sebagaimana ketika kota ini masih bebas di bawah penguasa syahbandar. Kota Jepara yang memiliki jaringan internasional ternyata hanya dipimpin oleh seorang syahbandar (Gustami, 2000: 129). Tugas syahbandar lebih sebagai petugas pabean yang mengatur penarikan bea cukai bagi kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Di samping jalur transportasi laut yang menguntungkan bagi Jepara yang selalu aktif dalam pelayaran dunia, juga didukung oleh jalur sungai.

Pada abad XVII, kondisi alam dengan kesuburan lahan sebagai lahan pertanian, hutan jati dengan produktivitas yang berlimpah dan didukung dengan jalur transportasi melalui sungai sangat baik, maka hubungan Jepara dengan pusat-pusat produksi pertanian dan kayu jati, misalnya, semakin intensif dan hal ini sangat mudah terhubung dengan pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya. Jalan darat juga mulai terhubung, walaupun dengan kondisi yang tidak sempurna, sehingga pengiriman hasil pertanian ke pelabuhan-pelabuhan dapat melalui jalur darat (Soetjipto, 1983). Hubungan ekonomi di Pantai Utara Jawa dengan memanfaatkan kota-kota pelabuhan

di sepanjang Pantai Utara Jawa menjadi semakin masif ketika jalur darat yang semula merupakan jalan kecil dengan fasilitas terbatas mulai diperlebar dengan menghubungkan berbagai tempat di Jawa pada masa kolonial Belanda (Soetjipto, 1983).

Konglomerasi Jepara semakin luas, ketika hubungan ekonomi yang dibangun dengan memanfaatkan jaringan transportasi laut dan sungai didukung dengan terbentuknya jalur darat. Penguasa Jepara pada masa itu, Pati Unus, menjalin hubungan ekonomi dengan Malaka, terutama dan beberapa pusat perdagangan di Tuban, Gresik, Cirebon, Batavia, dan bahkan sampai wilayah Maluku dan Madagaskar (Schrieke, 1960: 19). Dari semua jaringan perdagangan Jepara, yang paling mendapat perhatian adalah Malaka. Hubungan dengan Malaka sangat kuat dan Jepara menjadi pengekspor beras utama ke Malaka (Schrieke, 1960). Selain beras, berbagai komoditas yang tidak hanya berasal dari Jepara, juga menjadi komoditas yang diekspor melalui Jepara (ANRI, 2017). Kebutuhan akan percepatan dan efisiensi jaringan perdagangan ini kemudian membentuk kawasan khusus di Malaka yang disebut dengan Kampung Jepara, bersamaan dengan munculnya Kampung Upih dan Ipih yang lebih beragam asal pedagangnya (Schrieke, 1960: 16). Pertemuan para pedagang Jepara dengan berbagai pedagang Nusantara yang ada di Malaka diperkirakan muncul sejak tahun 1377.

Keterlibatan pedagang Jepara dan pedagang Hindu Jawa yang lain diperkirakan juga tidak hanya datang ke Malaka, tetapi juga Singapura dan bahkan sampai Gujarat (Schrieke, 1960: 16). Jangkauan luas para pedagang Jepara dan Jawa ini kemudian menjadi bukti bahwa Jepara khususnya dan Jawa pada umumnya, tidak hanya menjadi daerah tujuan untuk mendapatkan berbagai komoditas, tetapi juga secara aktif, pedagang Jepara ini melakukan "perjalanan ekonomi" keluar dari kawasan Nusantara. Pada masa Mataram Islam, misalnya, dengan jaringan transportasi, laut, sungai, dan darat, Jepara menjadi pelabuhan utama ekspor beras dari Mataram (Soetjipto, 1983). Transportasi darat ini dimungkinkan dengan menggunakan *cikar*, *gerobag* atau dipanggul atau di-*gendhong* atau dipanggul (Soetjipto, 1983). *Cikar*, sebagai moda transportasi hasil pertanian yang lazim digunakan di Jawa. Sebuah bentuk *gerobag* tanpa kursi yang ditarik satu atau dua sapi atau kerbau. Hal itu dikarenakan *cikar* hanya khusus untuk angkutan barang. Berbeda dengan *cikar*, *gerobag* merupakan *cikar* dengan tambahan kursi. *Gerobag* ini bisa ditarik sapi atau kerbau, tetapi yang lebih umum ditarik kuda. Untuk *gerobag-gerobag* yang berada di daerah perkebunan, biasanya ditarik sapi atau kerbau karena untuk mengangkut hasil perkebunan atau barang-barang milik kepala desa. Sementara dokar (*dog* dan *cart*) baru muncul pada tahun 1877 di Surabaya (Soetjipto, 1983)

Bentuk dan jaringan transportasi yang mendukung bagi kelancaran

pengiriman barang tersebut menjadikan Jepara memiliki peran penting sebelum masuknya kolonial. Posisi yang strategis tersebut membuat Jepara menjadi tujuan berbagai bangsa maupun etnis untuk melakukan aktivitas ekonomi, budaya, agama, bahkan politik. Posisi Jepara semakin penting, ketika pada abad perdagangan dunia (*an age in commerce*) melibatkan Jepara sebagai salah satu jalur perdagangan dunia berporos Asia, Eropa, dan Afrika (Reid, 1988 ; Amirell, 2015). Jalur-jalur perdagangan tersebut memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang kuat bagi Jepara (Reid, 1988 ; Hall, 2011). Jepara menjadi sebuah kawasan persimpangan dan tempat transaksi berbagai komoditas pertanian, tambang, *handicraft*, peralatan rumah tangga, dan bahkan perbudakan (Eysinga, 1842). Ramainya perdagangan di Jepara menjadikan daerah ini sangat strategis sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dari Eropa yang menuju ke wilayah kepulauan Aru, memutar dan bertemu lagi di Wilayah Zulu (Warren, 1981)

Sebagai tempat persinggahan dan pertukaran komoditas dari berbagai negara, maka posisi strategis tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan dan perubahan kota ini terutama dalam hal pembentukan heterogenitas penduduk, budaya, agama, arsitektur, dan seni. Berbagai etnis, termasuk Eropa, Asia Barat, Haramain dan Hadramaut, juga Persia, Asia Selatan, Asia Timur dan bahkan etnis-etnis Nusantara masuk ke wilayah Jepara dengan karakter masing-masing bangsa dan etnisitasnya. Berbagai gaya dan *stilisasi* karya seni, arsitektur, dan persoalan budaya dan agama tidak dapat dijelaskan tanpa memberikan posisi "keasingan" etnisitas, agama, budaya dalam proses menjadi lokal.

Sampai saat kedatangan VOC, Jepara menjadi pusat perdagangan di Pantai Utara Jawa, terutama gula, madu, lilin (*bees wax*), unggas, burung, hasil ternak yang dibawa ke Eropa melalui Palembang (A Collection of Voyages, 1701). Ratusan orang Eropa memasuki kota dan mereka melakukan aktivitas perdagangan termasuk perdagangan budak(Eysinga, 1842). Pada masa VOC, lepas dari konflik politik dan penyerangan-penyerangan sebagai sebuah rentetan konflik pada masa sebelumnya, yaitu masa Portugis, Jepara semakin memiliki peran yang penting dalam persilangan budaya dunia (*A Collection of Voyages*, 1701). Kelanjutan proses pertemuan antaretnis melalui jaringan perdagangan ini berlanjut memasuki persoalan lokalitas yang kemudian membentuk tradisi dan budaya tempatan yang khas Jepara.

B. Koneksitas dan Struktur Jaringan Perdagangan Dunia

Letak strategis Jepara (Hoejoeng Poro, *Jung* Mara) yang berada di lereng Gunung Muria memberi ruang *landscape* kesuburan bagi berbagai komoditas. Letaknya yang berada di lereng gunung dan menjulur sampai ke tepi laut memiliki tanah subur banyak ditemukan berbagai tanaman kopi, indigo,

kacang terutama yang berbatasan dengan pegunungan Clering (Tjiliring) di sebelah barat Muria. Lembah Muria dan Clering banyak hamparan sawah dan buah-buahan karena aliran sungai dari Muria cukup sebagai air irigasi. Sungai Marong, Sungai Gong, Sungai Banyaran, Sungai Gelis, Sungai Japara, dan Sungai Tayu memberikan asupan air irigasi sepanjang tahun. Menurut Tome Pires, Jepara hanya merupakan wilayah kecil, tetapi memiliki pelabuhan yang sangat indah dan kesuburan tanah yang cocok untuk padi dan palawija.

Pedagang-pedagang berdatangan dengan kapal kecil, perahu dan *jung* sampai kapal besar dengan bobot mencapai 200 ton. Perahu bisanya dimiliki dan dikonotasikan dengan orang Bumiputra atau Jawa, sedangkan j*ung* merupakan jenis perahu dengan kepemilikan dan dijalankan oleh pedagang-pedagang Cina (Soetjipto, 1983). *Jung-jung* yang berasal dari Jepara banyak yang mencapai pulau-pulau kecil di dekat Palembang. Letak strategis Jepara dalam bentang jangkauan dengan beberapa wilayah atau kota lain di Jawa digambarkan memiliki letak dengan skala jangkauan yang sesuai dengan keseimbangan jarak antarwilayah. Artinya, untuk mempertimbangkan letak yang memiliki keterjangkauan dengan wilayah atau daerah lain, Jepara memiliki letak yang strategis. Peta di bawah ini menunjukkan skala jarak antarwilayah yang menunjukkan Jepara berada di posisi yang sangat strategis.

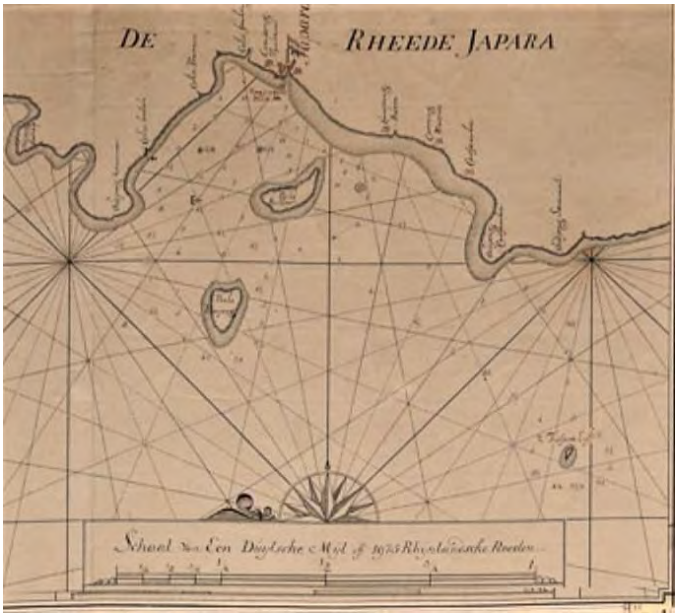

Gambar 3. Skala Pemetaan Letak Geografis Jepara di Pantai Utara Jawa
Sumber: J. Schmalts, "*Carte* de La Rade de Japara", 5 Agustus, 1800.

Jika ditelusuri sejak masa Majapahit, posisi Jepara menjadi salah satu pintu masuk-keluarnya barang-barang komoditas melalui pelabuhan Jepara. Mekanisme manajemen yang diberlakukan adalah dengan membentuk dan menempatkan setiap kelompok pedagang berdasarkan asal-usul bangsanya masing-masing. Untuk mempermudah tata kelola pelabuhan yang sangat sibuk tersebut, maka ditunjuk seseorang sebagai agen transaksi dalam proses perdagangan. Sebuah inskripsi Majapahit menyebut agen transaksi itu memiliki sebutan sesuai dengan masing-masing bangsa yang diwakili, misalnya juru cina, sebagai perwakilan kelompok pedagang dari Cina, juru barata, sebagai perwakilan kelompok pedagang dari Eropa dan juru kling, sebagai perwakilan kelompok pedagang India. Kelompok perwakilan perdagangan dari masing-masing bangsa ini disebut Mangilala Drwya *Haji*, kelompok bisnis asing di Jawa (Wisseman, 1978). Jika dilihat dari fungsi kelompok tersebut, maka sangat mungkin, Jepara tidak hanya sebagai wilayah transit dengan pelabuhan besar dan puluhan kapal besar yang berlabuh, tetapi juga aktif melakukan perdagangan internasional. Hal ini menjadi dasar proses kosmopolis yang telah tumbuh sejak abad ke VIII dan berkembang sampai abad XIV (Wisseman, 1978).

Kelompok pedagang Cina gelombang kedua diperkirakan sudah hadir tahun 1130, dengan misi utama melakukan perdagangan dan mencari pasar baru di Kawasan Asia Tenggara. Bukti-bukti hadirnya pedagang-pedagang Cina dapat merujuk temuan koin-koin Cina yang diperkirakan dari Zhonghe yang memanfaatkan jalur rempah yang sudah ada. Akan tetapi, juga ada yang menafsir koin Jian Yian dari Zhonghe itu diperkirakan tahun 1118 (N.H. Koh, 2010). Di samping koin Jian Yiawn, juga ditemukan berbagai keramik yang diperkirakan dibuat pada masa Dinasti Song dan Yuan abad ke-XII dengan jenis keramik putian dan *juko* (mangkok hijau). Keramik *juko* ini juga ada kemiripan keramik *juko* (*shuko*) di Jepang. Di samping mangkok, juga ada vas bunga dan kendi dari Quanzhou (N.H.Koh, 2010). Bahkan, pada sumber-sumber Cina menyebut, banyak pelayaran pedagang-pedagang dari Jepara pada abad XII—XIII mencapai wilayah pantai Cina untuk sebuah perdagangan keramik dengan jenis keramik *Qingbai* dan *Longquan* (Jun, 2015). Jejaring dengan Asia Timur ini kemudian yang berpengaruh kuat dalam pembentukan kosmopolitan awal.

Kehadiran pedagang-pedagang Cina ke Jepara sejak abad VII itu memperluas jaringan perdagangan dan hubungan politik ekonomi pada tingkat lokal dengan berbagai aktivitas eksplorasi ekonomi, terutama beras dan gula, di samping komoditas keramik dan logam. Pada masa kekuasaan Pati Unus, abad XVI, Jepara hanya berpenduduk 90-100 orang, akan tetapi dengan sarana perdagangan dan pelabuhan yang memadai, Jepara memiliki daya tarik bagi orang-orang Eropa, Asia Timur, Asia Barat, dan beberapa suku

Nusantara (Pires, 2015; Vlekke, 1959; Pigeaud dan de Graaf, 1976). Hubungan dengan Malaka sebelum dikuasai Portugis tahun 1511, Jepara telah menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai pedagang dari Eropa, Asia Timur, Asia Barat, dan bahkan Asia Selatan. Peta di bawah menunjukkan hubungan yang kuat Jepara dengan berbagai pedagang dari beberapa kawasan sampai abad XV.

Gambar 4. Hubungan Jepara dengan berbagai kota utama di Nusantara dan Asia pada abad VII—XV
Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Rekonstruksi peta di atas memberikan penjelasan hubungan ekonomi Jepara yang tidak hanya sebagai transit semata, tetapi juga aktif melakukan kegiatan ekonomi ekspor-impor dengan pedagang dari berbagai wilayah. Jalur perdagangan yang menuju Asia Selatan lebih banyak dilakukan melalui transit di Batavia sebelum melanjutkan ke Gujarat, Bengal, Malabar, dan Koromandel. Begitu pula sebaliknya, para pedagang Asia Selatan dapat langsung ke Batavia, kemudian menuju Jepara sebelum melanjutkan ke Maluku, Flores, Bali, Malaka dan bahkan ke Champa, Guangzhou, dan Macao. Memang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa para pedagang Gujarat, Bengal, dan Koromandel yang akan melakukan perdagangan ke Jawa atau Jepara singgah di Malaka dahulu, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam peta ditunjukkan ketidakterkaitan secara langsung hubungan perdagangan antara pedagang dari Asia Selatan dengan Jawa atau Jepara.

Sementara untuk wilayah Nusantara sebelum ke arah Asia Timur, hubungan dagang Jepara lebih banyak mengacu ke Malaka, sebagian transit

ke Bangka, Palembang, Bali, Flores, Maluku, sebelum menuju ke Laut Filipina, Taiwan, dan Nagasaki. Untuk jalur lain, menuju Champa melalui transit di Johor. Hal yang menarik dengan Guangzhou dan Macao di mana keduanya menjalin hubungan dengan Jepara tidak hanya melalui hubungan perdagangan, tetapi juga menjalin hubungan melalui perkawinan terutama pada abad XV dan XVI (de Graaf dan Pigeaud, 1984). Di samping itu, juga adanya proses konversi agama dan/atau memang merupakan hubungan ekonomi yang diikat oleh hubungan keagamaan antara Cina dan Jepara khususnya dan Jawa pada umumnya (de Graaf dan Pigeaud, 1984).

Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan akan berbagai fasilitas dan kebutuhan sosial meningkat. Perkawinan antaretnis mulai terjadi, bahkan semakin kuat pengaruhnya ke persoalan sosial dan budaya. Munculnya "perkampungan" *pecinan* yang pada masa kolonial semakin dipertegas keberadaannya, menunjukkan bahwa orang-orang Cina tersebut mulai membangun komunitas menetap di Jepara. Hal ini, dalam perkembangannya memberikan pengaruh pada bentuk-bentuk arsitektur, sebagaimana arsitektur kompleks *pecinan*, Masjid Mantingan, Jepara, *bedug* di serambi Masjid dan peletakan makam di belakang masjid (Handinoto dan Samuel Hartono, 2007). Untuk yang terakhir ini, masih perlu dikaji karena pengaruh Cina di dalam arsitektur masjid Mantingan, *bedug*, dan makam itu belum dibuktikan dengan membandingkan pola yang sama untuk masjid lain. Paling tidak, informasi itu sangat penting bahwa Jepara merupakan wilayah kosmopolis rempah yang telah memproduksi hibridisasi budaya pada tingkat lokal. Pada masa kolonial, konglomerasi Cina berkembang pada jejaring ekonomi perkebunan, terutama tebu, kopi, dan candu (*opium*). Ekonomi candu ini menempatkan Jepara bersama dengan Rembang menjadi pintu masuk-keluar perdagangan candu di Pantai Utara Jawa sebelum Semarang menjadi pelabuhan baru pada tahun 1770 ("I-Z", t.t.; Rush,1990).

Keberadaan Jepara sebagai kota dagang pada masa Majapahit yang didukung dengan jaringan konglomerasi internasional tidak berlanjut sampai munculnya orang-orang Eropa "gelombang II" yang mendarat di Jepara. *Quirimajao-Iappara*, sebuah sebutan tempat yang menjadi perhatian awal orang-orang Eropa (Portugis) untuk menyebut wilayah Karimunjawa-Jepara (French School of *Cart*ographers, 1540s, 1550s, and 1560s). Nama Karimunjawa sebenarnya merupakan pulau kecil yang secara kebetulan ditemukan para *cart*ographer dari Prancis sebagaimana Pierre Desceliers, Jean Rotz, Guillaume Le Testu, Gillaume Brouscon, dan Nicolas Desliens. Temuan Karimunjawa itu kemudian menjadi dasar para pelancong dari Portugis untuk menuju Australia. Para pelancong Portugis ini kemudian menjadi bangsa Eropa yang pertama masuk Jepara melalui Karimunjawa.

Para pelancong Portugis itu menggunakan Karimunjawa sebagai dasar penentuan jalur menuju Australia pada tahun 1521 dan 1624, jauh sebelum seorang navigator Belanda, Willem Janszoon pada tahun 1606 yang mengaku sebagai orang Eropa yang masuk Duyken, Australia melalui Karimunjawa. Terbukanya Malaka dengan masuknya pedagang Portugis sejak tahun 1511, semakin memberi peluang pedagang-pedagang dari berbagai kawasan memasuki wilayah Nusantara. Kompetisi perdagangan di Malaka berlanjut ke Pantai Utara Jawa yang kemudian membuat Jepara semakin terdesak dan mengalami domestikasi dengan hasil tanaman beras sebagai sumber lokal utama (Pires, 2015).

Di samping beras sebagai sumber ekonomi pokok, produk ikan dan daging melebihi kebutuhan lokal, sehingga perdagangan diperluas ke beberapa wilayah termasuk ke Gresik dan Cirebon (Pires, 2015). Ditemukannya jalur dan wilayah di Pantai Utara Jawa yang strategis dan memberi peluang perluasan jaringan ekonomi dari Eropa ke Jepara. Adalah orang Prancis dan Belanda yang mengikuti jalur tersebut untuk memasuki wilayah Jawa dan khususnya, Jepara dengan memanfaatkan potensi ekonomi agraris dan perikanan laut sekaligus sebagai komoditas utama.

Kontak-kontak perdagangan Jepara dengan orang Cina berlanjut dengan penyebaran agama Kristen. Seorang zending, Tio-Ling Hoewat, berhasil mengajak saudara-saudaranya untuk masuk zending Jepara yang kemudian diutus untuk wilayah Pati (Geillustreerd Bendingblad, 1873, 9—10). Kedatangan kelompok Kristen Cina ini tidak mengalami persoalan karena mereka hadir ketika orang-orang Belanda sudah menetap di Jepara. Sebuah proses transmisi keagamaan pada tingkat lokal yang penting dalam proses hibridisasi. Jellesma dan Hozeoo, seorang misionaris di Semarang yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran Kristen ke Jepara merupakan awal masuknya orang-orang Belanda yang mencoba memperkenalkan Kristen di Jepara. Orang-orang Belanda memasuki Jepara diperkirakan pada tahun 1603, setahun setelah VOC (Vereeniging Oost Indie-Compagne) secara resmi memasuki wilayah Nusantara. Salah satu tempat yang dianggap paling awal sebagai wilayah Kristen adalah Desa Bondo, sebuah desa kecil di utara Muria. Desa ini kemudian menjadi "Desa Kristen" dengan peranan seorang tokoh, Kyai Tunggul Wulung yang mengajak orang-orang Kristen Semarang pindah ke Bondo untuk mengerjakan lahan-lahan baru (Guillot, 1981: 11).

VOC sebagai kelompok kongsi dagang dengan jumlah anggota 17 perusahaan setingkat Naamloze Vennootschaft (N.V.) yang terkenal dengan The gentlemen seventeen, merupakan kumpulan perusahaan terbesar selama periode kolonial. Pada 1740, pegawai VOC yang mengurusi Pantai Utara Jawa berjumlah 219 orang. Namun, dalam perkembangannya, kira-kira satu dekade berikutnya meningkat tajam jumlah pegawai VOC yang mencapai

2.300 orang (van Niel, 2005: 3). Banyaknya pegawai yang menjadi bagian dari manajemen VOC tersebut mengakibatkan berbagai kontrak politik dan ekonomi menjadi lancar. Negosiasi dan perjanjian dengan penguasa lokal, terutama Mataram berlangsung sangat mudah.

Posisi Jepara sebagai vasal Mataram, mengakibatkan hubungan Mataram dan VOC semakin dekat. Berbagai kontrak politik dan perjanjian ekonomi antara Jepara dan Mataram semakin kuat terutama terkait ekonomi beras, walaupun Jepara mendapat dukungan Demak dalam hal kerja sama ekonomi berbasis perdagangan internasional. Hal ini menjadi alasan kuat bagaimana Demak juga punya kepentingan memperluas wilayah "kekuasaan" ekonominya dengan mendukung daerah-daerah sekitar, yaitu Jepara, Kudus, Pati, Jengkal Sewu, dan Juwana sebagai sumber ekonomi dan sekaligus sebagai penyangga jalur distribusi ekonomi beras di wilayah Pantai Utara Jawa. Di bawah Sultan Hadirin yang merupakan saudara tiri dari Sultan Demak (Trenggono), Jepara mulai berkembang. Di bawah Sultan Hadirin ini kekuasaan Jepara melebar sampai Pati, Juwana, dan Rembang. Ketika Jepara, termasuk Tegal, tidak termasuk di bawah kekuasaan Trunojoyo di Pantai Utara Jawa, sebenarnya dapat diartikan bahwa Jepara menjadi daerah otonom yang mendapat dukungan Demak sejak 1588. Namun, ketika Madura, Cirebon, dan Semarang dikuasai VOC pada1680-an, maka monopoli VOC menjadi dominan dalam berbagai aktivitas ekonomi di Pantai Utara Jawa (Kian, 2006).

Hubungan Jepara dengan Demak yang semakin kuat, menyebabkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik semakin erat. Hal ini bukan berarti bahwa hubungan ekonomi yang terjalin dengan Mataram, apalagi sebagai vasal, kemudian terputus. Jepara tetap menjadi vasal Mataram, walaupun dalam perkembangannya juga pernah mengalami persoalan "konflik", ketika Demak turut mencampuri kepentingan antara Jepara dan Mataram.

Persoalan politik dengan Jepara, mengakibatkan Mataram pernah melarang ekspor beras ke wilayah pantai Utara Jawa. Hal ini menjadi persoalan yang serius bagi Jepara. Walaupun, dalam beberapa sumber menyebut, bukan karena persaingan pengaruh, tetapi di Mataram sendiri, ketersediaan beras mulai menipis akibat banjir besar di Segarayasa, Plered yang mengakibatkan krisis pangan di Mataram (de Graaf, t.t.). Jepara berada di bawah Mataram sampai tahun 1677. Kemudian, VOC mengambil alih dengan membuat kesepakatan dengan Sunan dan Trunojoyo untuk mengambil hak eksplorasi wilayah pesisir (Nagtegaal, 1996: 21—33).

Posisi VOC dalam proses negosisasi ini dipegang penuh oleh Speelman yang kemudian menjadi saksi kesepakatan perjanjian antara Sunan Amangkurat II dan Bupati Jepara, Ngabehi Wangsadipa, dalam hal pengalihan hak prerogatif Jepara dan seluruh wilayah Pantai Utara

Jawa. Perjanjian tersebut memberi peluang pada VOC untuk melakukan penanaman komoditas pertanian, tebu dan memonopoli perdagangan beras, gula, indigo, dan candu. Pada masa VOC, Jepara mengalami kemakmuran dengan berbagai komoditas lokal yang dikirim ke Eropa, Singapura, dan beberapa kota di Jawa dan luar Jawa (Kian, 2006; Alamsyah, 2015). Peningkatan komoditas dan jejaring ekonomi masa VOC diperkuat dengan hadirnya pedagang-pedagang Cina yang memainkan peran penting ekonomi komersial Jepara. Walaupun, kehadiran pedagang-pedagang Cina ini tidak semuanya berhenti di Jepara, tetapi juga banyak yang langsung menuju ke kepulauan Maluku (Kian, 2006; 7—8). Penguasaan Cina atas otonomi beras di Jepara mulai berkurang ketika Semarang menjadi wilayah kekuasaan VOC yang menerapkan sistem monopoli dagang (Nagtegaal, 1996: 2; Kian, 2006).

Kosmopolitanisme awal dengan pembentukan relasi-relasi dan jaringan ekonomi pada tingkat lokal yang melibatkan agen-agen ekonomi menjadi dasar tumbuh dan berkembangnya berbagai ragam struktur sosial yang khas. Kosmopolis awal di Jepara memang belum ada informasi penting bagaimana berbagai komoditas dibudidayakan. Pola pertanian dan perkebunan di Jepara baru dilaporkan ketika para pekebun Belanda mulai melakukan pembukaan lahan tebu, kopi, dan karet. Pada 1791, S.N. Nederbergh, Residen Jepara, diberi kewenangan untuk melakukan pembukaan dan perluasan perkebunan tebu di Jepara (van Niel, 2005: 60). Sebagai orang yang di samping sebagai Residen, Nederbergh ini berkewajiban melakukan investigasi lahan yang cocok untuk tanaman tebu. Namun, tampaknya upaya untuk mencari lahan yang luas untuk perkebunan tebu tidak maksimal, sehingga wilayah tebu yang diusahakan hanya melakukan praktik perkebunan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan Gubernur van der Burgh yang pada 1780 sudah merambah ke wilayah Jepara, Kudus, dan Pati (van Niel, 2005: 113).

Data statistik tahun 1861, Jepara dilaporkan sebagai lahan pertanian yang baik dengan model pertanian yang menggunakan sistem irigasi, tadah hujan, maupun tegalan yang ketiga sistem tersebut hanya dapat berjalan baik di tiga distrik, yaitu Distrik Banyaran, Mayong, dan Jepara. Keterbatasan lahan dan meningkatnya permintaan gula di Batavia sebagai komoditas yang akan diekspor ke pasar Eropa, mengakibatkan luasan perkebunan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Pada tahun 1861, lahan-lahan persawahan baik beririgasi maupun tidak dan juga lahan tegalan masih merupakan lahan dominan di Jepara. Lahan-lahan tersebut merupakan lahan nontebu yang ditanami padi dan palawija. Di bawah merupakan tabel luas lahan setelah terjadi perluasan area tebu yang tidak banyak berdampak pada pengurangan yang signifikan tanaman sawah, baik kering maupun basah.

Tabel 1. Data lahan pertanian Jepara 1861 (*bau*)

No	Distrik	Lahan irigasi	Lahan non-irigasi	*Tegalan*
1	Jepara	6.987	262	2.124
2	Mayong	6.112	228	520
3	Banjaran	2.240	348	592
	Total	15.229	838	3.236

Sumber: *Statistiek der Residentie Japara*, 1861, KITLV

Lahan pertanian jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa sistem pertanian di Jepara masih didominasi dengan lahan beririgasi. Mayong dan Jepara merupakan daerah yang berada di lereng Gunung Muria, memiliki sistem irigasi yang baik dengan ketersediaan sungai-sungai yang berhulu Gunung Muria. Walaupun dalam masa Taman Paksa ini, Jepara tidak masuk dalam program Tanam Paksa, tetapi sistem pertanian dengan irigasi menjadi sistem pertanian dominan. Hanya kurang dari 50% dari total lahan, masih menggunakan sistem tadah hujan dan pertanian *tegalan*.

Hal penting yang muncul bersamaan dengan pola pertanian di Jepara adalah tumbuhnya ekonomi *nonfarm* yang hadir tidak jauh dari lahan-lahan pertanian. Pada 1798, sebagai contoh, ekonomi pertanian sawah dan *tegalan* berkembang seiring dengan ekonomi *nonfarm* terutama tekstil, lilin, beragam *handicraft*, baik dari kayu, tanah liat, maupun kertas (payung). Jepara kemudian tumbuh sebagai wilayah yang tidak didominasi pertanian, tetapi sudah merambah ke ekonomi *nonfarm* (van Niel, 2005: 140). Artinya, relasi-relasi rempah yang pernah berkembang pada masa perdagangan awal, mulai mengalami penguatan melalui ekonomi *nonfarm*.

Berdasarkan pada jenis lahan terkait dengan asal kepemilikan, maka lahan *eigendom* (lahan pewarisan) termasuk jenis lahan yang dominan. Artinya, dalam sistem pertanian di Jepara, lahan-lahan yang siap pakai baik untuk padi beririgasi maupun palawija, sangat dimungkinkan banyak yang merupakan usaha pertanian rumah tangga. Atau, dalam pengertian lain dengan sistem sewa (*huur land*) atau gadai (*verpand land*), sistem ekonomi pertanian dijalankan. Oleh karena itu, usaha perkebunan tebu khususnya dan kopi banyak dikendalikan dari para pengusaha dari Semarang dengan sistem sewa atau gadai.

Tabel di bawah ini tampak bahwa lahan-lahan *eigendom* banyak terdapat di Jepara dan Mayong, sedangkan Banjaran dan tempat lain tidak terlalu banyak. Begitu juga lahan-lahan yang terdaftar sebagai lahan terkena pajak. Cukup tinggi untuk Jepara dan Mayong, tanah-tanah yang terkena pajak yang digunakan untuk perkebunan tebu.

Tabel 2. Data Jenis Lahan Jepara, 1859—1861 (*bau*)

No	Distrik	Lahan *Eigendom*			Lahan kena Pajak		
1	Jepara	1.859	1.860	1.861	1.859	1.860	1.861
2	Mayong	41.897	24.863	38.073	3.902	2.892	3.456
3	Banjaran	41.092	36.962	38.410	2.766	2.276	2.206
	Total	16.481	5.457	11.004	143	126	150

Sumber: *Statistiek der Residentie Japara*, 1861, KITLV

Peran Cina di Jepara belum banyak memberi informasi bagaimana mereka melakukan eksplorasi sumber ekonomi lokal secara sistemik. Beberapa sumber lebih merujuk pada aktivitas Cina yang sebenarnya lebih banyak melakukan aktivitas ekonomi tidak langsung pada pengolahan lahan. Hanya tebu yang beberapa kasus di Distrik Mayong dan Pecangaan dikelola Cina, itupun dikelola dari Pati dan Semarang. Oleh karena itu, sebenarnya peran Cina dalam eksplorasi lahan sebagai sumber komoditas komersial tidak signifikan dalam perkembangan ekonomi Jepara. Peran Cina lebih merupakan kelompok perantara dan penyalur berbagai komoditas termasuk gula, kopi, dan candu.

Setelah VOC memiliki hak pengelolaan Pantai Utara Jawa secara penuh tahun 1780, Cina mulai aktif menyewa lahan-lahan desa di Jepara, Kudus, dan Pati (van Niel, 2005). Walaupun sebenarnya, aktivitas Cina dalam usaha pembuatan gula sudah terjadi dan berkembang jauh sebelum VOC hadir. Paling tidak ada sekitar 135 pabrik gula yang ada di Pantai Utara Jawa dikelola oleh Cina (van Niel, 2005). Sejak Gubernur van der Burgh memberikan konsesi gula kepada pengusaha Eropa, pengusaha Cina mulai bergeser menjadi perantara. Walaupun untuk daerah-daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, dan Cirebon, orang-orang Cina masih banyak yang melakukan usaha industri gula. Perang anti-Cina, 1740-an, sangat berpengaruh pada kehancuran industri gula dan mengakibatkan pengusaha Cina menghentikan industri gula. Banyak industri gula Cina yang dibakar dalam konflik tersebut. Untuk kasus Jepara, Sara Fedel, seorang mantan istri Dewan India, Nicolaes Crul mencoba melakukan perbaikan dan merekonstruksi industri gula Cina. Salah satunya di Prambatang, Jepara yang diusahakan untuk diberi tawaran skema peminjaman dana untuk menghidupkan kembali industri gula yang mulai dikelola seorang pengusaha Cina, Oey Ki Sut (van Niel, 2005: 137).

Berbeda dengan Cina, orang Eropa pada 5 Agustus 1800, J. Schmalts seorang pelancong dari Prancis melaporkan perjalanannya ke berbagai wilayah, termasuk ke Jepara dengan membuat 26 peta sebagai panduan perjalanannya yang diberi judul "*Carte* De La Rade de Japara Pour Servir Au

Rapport"[1]. Laporan perjalanan Schmalts tersebut sangat penting bagaimana Jepara pada masa awal sudah menjadi perhatian orang-orang Prancis dengan berbagai peta pulau-pulau kecil termasuk Pulau Panjang. Perjalanan Schmalts tersebut akhirnya memasuki pulau Jawa, tepatnya melalui daerah Tegalsambi, yaitu desa kecil yang terletak di ujung Kota Jepara. Deskripsi Schmalts ini mengidentifikasi indahnya pantai Jepara dengan pasir putihnya, angin yang lembut, masih belum banyak polusi serta dihiasi batu karang yang indah (J. Schmalts, 1800). Kedatangan orang Portugis pada abad XVI serta orang Belanda (VOC) pada abad XVII yang kemudian disusul orang Prancis menjadi jalur awal orang Eropa memasuki dan terlibat dalam proses konglomerasi di Jepara. Daya tarik kedatangan orang Eropa ini juga menandai terbukanya Jepara sebagai pusat pertemuan para pelancong dari Eropa terutama, Asia Timur, Asia Barat, dan sebagian Asia Selatan.

Pada 1802, badai menghantam kota ini, sehingga kota ini hanya tersisa pusat kota yang dibangun menjelang Deandels membangun Jalan Raya (*grooteweg*) tahun 1810. Hancurnya Jepara mengakibatkan kantor residen berpindah ke Pati. Pada masa awal munculnya kota kosmopolitan, Jepara merupakan wilayah transit dan sekaligus sebagai tempat transaksi komoditas terutama komoditas dari Eropa, Cina, orang-orang Keling (India), dan Jawa. Transaksi berbagai komoditas di pelabuhan Jepara semakin tumbuh ketika terjadi keterhubungan dengan wilayah-wilayah sekitar melalui jalur darat. Dukungan wilayah pedalaman dari Mataram dan kota-kota lain sebagai penghasil utama padi, mempercepat proses pertumbuhan pelabuhan Jepara. Pertumbuhan dan percepatan perdagangan antarbangsa menjadikan Jepara semakin memiliki posisi penting bagi perdagangan antarbangsa. Kedatangan para pedagang dari berbagai kawasan, terutama Eropa, setelah transit di Jepara dengan tujuan menurunkan dan menaikkan muatan, kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Maluku, Zulu, sebagian wilayah Jawa Timur dan sebagian dari mereka kembali ke Eropa atau wilayah lain (Warren, 1981).

Terjangan badai yang terjadi di Jepara mengakibatkan beberapa pengusaha Cina dan Eropa mengalihkan usahanya ke Semarang dan Pati. Jepara hampir tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sampai hadirnya jalan raya yang sebenarnya hanya merupakan pelebaran jalur yang sudah ada, secara bertahap memberikan jalan lain untuk mengakses sumber ekonomi (Soetjipto, 1983). Dengan jalur baru itu, Jepara mulai membangun kembali akibat badai dan "perang anti-Cina" yang sempat menghentikan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi agraria Jepara. Dibangunnya jalur baru sebagai sarana pergerakan ekonomi di Pantai Utara

[1] Dalam hal ini saya harus berterima kasih kepada Jean-Marc Gillone yang menerjemahkan dari teks bahasa Prancis ke bahasa Inggris.

Jawa, memungkinkan Jepara melakukan jaringan perdagangan lewat darat. Pertumbuhan ekonomi mulai terjadi lagi walaupun belum sepenuhnya pulih sebagaimana pada saat sebelum "perang anti-Cina" dan badai besar.

Namun, tidak lama ketika mulai tumbuh dari kehancuran, Jepara mengalami dampak perang Jawa yang berlangsung tahun 1825—1830. Berdasarkan perkiraan Carey, walaupun dampak politik terhadap Jepara tidak begitu signifikan, tetapi secara ekonomis, justru permintaan bahan makanan pokok dari Jepara meningkat untuk kebutuhan makanan di Yogyakarta akibat mulai terjadinya kemiskinan di Yogyakarta (Carey, 2008). Kebutuhan makanan pokok diimpor dari Pantai Utara Jawa dan khusus dari Jepara berupa beras. Di samping dari Jepara, juga dari Kedu yang merupakan bagian dari Mataram. Gambaran kemiskinan di Yogyakarta menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat sangat rendah. Masyarakat petani di wilayah Yogyakarta Selatan hanya makan nasi dengan garam (Carey, 2008: 44—45).

Data-data ekonomi di Jepara selama Perang Jawa, tidak banyak ditemukan. Data statistik terkait produktivitas komoditas utama diperoleh hanya di daerah Jepara, Mayong, dan Banjaran. Secara sosial, pada masa perang Jawa berbeda kondisinya, gerakan anti-Belanda, belum dapat ditelusuri siapa mereka, tetapi mereka melakukan pengrusakan bangunan Belanda. Salah satu bangunan yang dirusak adalah *Fort Djapara* yang terletak persis di ujung barat bagian utara pendopo kabupaten. Beberapa bangunan yang rusak tidak ada informasi jumlahnya, tetapi periode perang Jawa diceritakan bahwa banyak pengikut Dipanegara yang berada di Jepara. Hal ini berdasar pada cerita rakyat yang berkembang sampai sekarang menunjukkan bahwa beberapa tokoh yang diyakini masyarakat lokal sebagai "wali" atau seorang ulama, sering merujuk pada tokoh Dipanegara.

Setelah selesainya Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825—1830, banyak dilaporkan adanya krisis pangan di wilayah Yogyakarta Selatan (Carey, 2008: 44-45). Tidak hanya masyarakat petani yang mengalami krisis pangan, tetapi juga banyak priyayi cilik (priyayi rendahan) yang harus dapat bertahan hidup, ketika sumber ekonomi mereka terganggu (Suryomihardjo, 2008). Tidak jarang para priyayi rendahan atau para kiai pengikut setia Dipanegara harus keluar dari Yogyakarta. Salah satu wilayah yang dituju adalah Jepara. Perlu diteliti lebih lanjut, bagaimana dampak perang terhadap kehidupan priyayi rendahan yang berdasarkan cerita rakyat masih terkait dengan pengikut Dipanegara.

Masuknya para pengikut Dipanegara ini memang lebih banyak diidentifikasi sebagai ulama. Bahkan, di Pulau Mandalika ada ulama yang hadir pada masa Wali Sanga, yang bernama Sayyid Utsman, sedangkan di Pulau Mandalika ada makam ulama yang bernama Abu Bakar. Kedua ulama yang dimakamkan di kedua pulau tersebut jauh sebelum masa Dipanegara.

Oleh karena itu, cerita adanya bukti laskar Dipanegara yang masuk Jepara kemudian hanya dapat diyakini sebagai laskar yang mencari sumber logistik perang. Hal ini dibuktikan oleh Carey, bahwa pada masa sulit di Yogyakarta, terutama pascaperang, impor beras dari Pantai Utara Jawa meningkat (Carey, 2008: 45).

Setelah perang, pemerintah kolonial melaksanakan program Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), 1830—1870. Salah satu strategi keberhasilan Tanam Paksa dalam program eksplorasi sumber ekonomi perkebunan di Jawa adalah keterlibatan Cina dalam proses ekonomi. Cina berperan dalam penyaluran komoditas dan juga pencarian tenaga kerja (Claver, 2014). Pada sektor perdagangan, kedudukan Cina sangat penting dalam pengumpulan hasil pertanian, penyaluran, bahkan membantu dalam bidang kredit untuk petani pada awal abad XX (Akhyat, 2015). Aktivitas eskpor-impor dengan berbagai negara banyak melibatkan pedagang Cina terutama yang bermukim di kota-kota besar Jawa (Surpriyono, 2013). Sejak tahun 1860-an dengan berbagai komoditas yang dikirim dari dan ke Eropa, beberapa wilayah sebagaimana Borneo, Madura, Belitung, Bawean, Bali, dan beberapa daerah di Jawa, peran Cina sangat mendominasi. Kemampuan pelaku ekonomi Cina dalam mendistribusikan berbagai komoditas juga tidak hanya bersifat antarpulau, antarkawasan, tetapi juga berkemampuan memasuki jaringan ekonomi perdesaan (Fernando and Bulbeck, 1992).

Kemampuan pelaku ekonomi Cina ini kemudian mendorong struktur ekonomi berubah dari ekonomi dengan jaringan lokal dan terbatas di kota-kota besar, berubah menjadi ekonomi komersial dengan jangkauan kota dan perdesaan. Jaringan petani tebu, candu, dan kopi di Jepara semakin berkembang, karena digerakkan oleh Cina. Menggunakan *jung-jung* dari Jepara, Juana, Tuban, dan Gresik, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat melalui Kudus, Rembang sampai Gresik dan Surabaya. Untuk ke Selatan, terutama menuju Semarang, dan ke Barat menuju Cirebon dan Batavia (Claver, 2014 ; Nagtegaal, 1996; van Niel, 2005).

Di bawah merupakan *landscape* pelabuhan yang dibuat setelah pelabuhan pindah ke Semarang, tahun 1770. Tata ruang dan desain pelabuhan yang strategis, membuat pelabuhan Jepara tetap berkembang, walaupun secara resmi sudah pindah ke Semarang. Perkembangan pelabuhan Jepara tidak lagi sebesar pada masa Jepara proses kosmopolitan, tetapi fungsi pelabuhan antardaerah tetap berjalan.

Gambar 5. *Landscape* Pelabuhan Jepara, tahun 1800
Sumber: van Eysinga, P.P. Roorda, Handboek der Land- En Volkenkunde, Geschied-,Taal-,Aardrijks- en Staatknde van Nederlandsch Indie, Amsterdam: I. van Bakkens, 1854

Peran Cina dalam ekonomi Jepara sangat penting. Di samping sebagai penyalur dan penggarap perkebunan tebu dan kemudian menguasai perdagangan candu, Cina juga berperan dalam perubahan pajak tol yang pada masa akhir perang, lebih banyak dimonopoli Cina (Akhyat, 2000). Baru pada masa Tanam Paksa dan kemudian berlanjut pada masa Liberal, pajak tol (*toll tax*) berpengaruh pada jaringan ekonomi lokal. Jepara mengalami persoalan pajak tol ini ketika harus melakukan pengangkutan komoditas ke Semarang (Akhyat, 2000). Hal yang berbeda pada masa perang, pajak tol hampir tidak diurus karena konsentrasi pada perang yang mengakibatkan banyak persoalan terutama ekonomi.

Pada masa Tanam Paksa, terjadi peningkatan perdagangan baik lewat laut maupun darat dengan berbagai tujuan mengakibatkan pertumbuhan penduduk di Jepara. Peningkatan jumlah penduduk tidak hanya yang singgah, tetapi juga ada yang kemudian menetap, telah memberikan rangsangan pertumbuhan jumlah penduduk Jepara dengan keragaman etnisitas, bangsa, dan status sosial. Sampai tahun 1845, total penduduk Jepara mencapai 422.035 dengan komposisi orang Eropa berjumlah 403 jiwa, orang Jawa berjumlah 413.818 jiwa, orang Arab, Melayu dan lainnya sebanyak 939 jiwa, dan orang Cina sebanyak 6.610 jiwa. Di antara komposisi penduduk tersebut ada yang menarik karena terdapat 135 prajurit dan 130 budak. Pada masa Raffles, 1815, penduduk Jepara hanya 216.096 jiwa (Eysinga, 1842). Adanya prajurit dan budak ini di Jepara ini dapat dijelaskan melalui hubungan kekuasaan yang menyertai proses kosmopolitan. Perompakan dan praktik perbudakan menjadi bagian penting bagaimana

kosmopolitanisme di Jepara berkembang (Eysinga, 1842).

Peningkatan jumlah penduduk Jepara terjadi sejak tahun 1815. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Jepara mencapai angka 216.098 (*Handboek de Land- en Volkenkunde, Gechied-, Taal-Aardrijksen*, vol. 3, 1850). Penambahan penduduk tersebut, diperkirakan akibat gelombang migrasi Cina dan mulai melemahnya kekuasaan Inggris di Jepara. Hal itu kemudian menempatkan komunitas Cina mampu mengambil alih peran VOC dan Inggris dengan munculnya orang Cina menjadi Kapten di Jepara. Di bawah seorang Kapten Cina, Jepara mencoba menghilangkan sisa-sisa VOC termasuk benteng yang dihancurkan pada 1830. Bermodal pada hasil hutan jati dan ekonomi agraria, Cina berhasil mengembangkan wilayah sekitar lereng Muria dan mengambil alih ekonomi pertanian, terutama beras dari VOC (*Handboek*, 1850).

Pada masa Hindia Belanda, Jepara mulai mengalami persoalan terkait dengan proses perjanjian dan hak-hak eksplorasi ekonomi terutama kopi dan tebu. Hal ini karena orang Belanda mulai melakukan praktik ekonomi langsung dengan sistem perkebunan dengan melakukan kontrak dan hak guna lahan langsung dengan pemilik (*Kolonial Studien*, 1867). Beralihnya pengaruh Jepara di bawah Kapten Cina, beberapa pengusaha Belanda tetap melakukan hubungan perdagangan dengan Cina terutama terkait komoditas pertanian, seperti beras, tebu, dan beberapa komoditas seperti kaca, lilin, minyak, gambir, dan barang-barang dari tembaga, besi, rotan dari Eropa dan Cina. Kopi menjadi komoditas andalan setelah tebu di Jepara. Saudagar Tan Ho Goan, merupakan salah satu pemegang monopoli kopi di Jepara pada tahun 1867 (*Kolonial Studien*, 1867; Purcell, 1981).

Orang-orang Eropa kemudian semakin terbatas dalam memanfaatkan peluang ekonomi, oleh karena itu, orang Belanda lebih banyak melakukan eksplorasi ekonomi hanya melalui perkebunan tebu. Di samping itu, juga sebagai pedagang barang-barang konsumsi sehari-hari sebagaimana minuman keras dan makanan. Untuk perkebunan yang dimiliki orang Eropa, lebih banyak dikelola dari Semarang, sehingga penduduk Eropa yang melakukan praktik perkebunan tidak banyak bertempat tinggal di Jepara. Sedikitnya orang Eropa yang mengelola perkebunan dan bertempat tinggal di Jepara mengakibatkan perkembangan ekonomi Jepara sebagai pusat transit ekonomi internasional mulai redup, tetapi jaringan antardaerah dan antarpulau tetap berkembang. Hal ini karena pusat aktivitas berada di Semarang, semenjak pelabuhan dipindah. Sementara Jepara hanya sebagai wilayah produsen. Namun demikian, perdagangan dengan komoditas pertanian, terutama beras, kopi, perikanan, candu, dan hasil produk nonpertanian terutama produk ukir, batik dan handricraft lainnya tetap berlaku, tetapi itu hanya pada jangkauan perdagangan antarwilayah di

Jawa dan sebagian luar Jawa. Peningkatan produk-produk non-pertanian, sebagaimana ukir, tenun, batik, dan *handicraft* lainnya, menjadi komoditas subtitusi pertanian yang sudah berkurang. Jumlah pabrik gula di Jepara hanya 9 pabrik dengan luas 4.296 ha, yang berada di Mayong dan Pecangaan. Hal itu pun dikelola dari Semarang (Fasseur, 1977).

Pola jalur rempah berubah, yang sebelumnya lebih merupakan jalur-jalur Eropa, Cina, India, dan Arab, kemudian berangsur-angsur lebih merupakan jaringan antardaerah di Jawa dan sebagian antarpulau, terutama yang memiliki hubungan komoditas dan saling membutuhkan dengan komoditas Jepara. Peta berikut tampak bahwa pola jaringan mengalami perubahan;

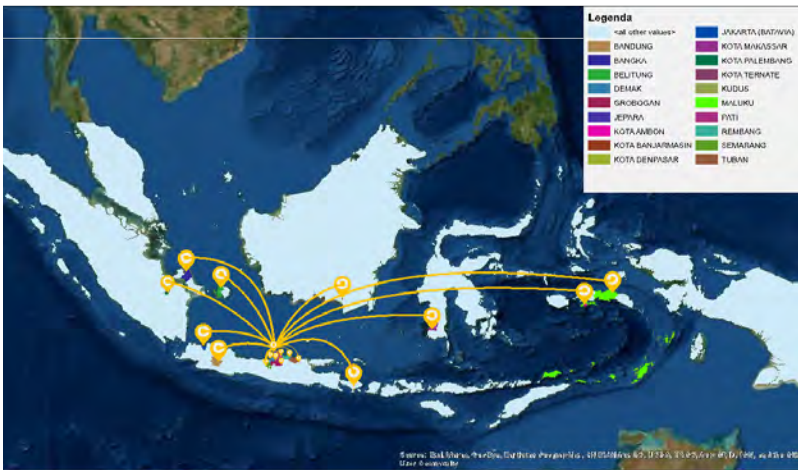

Gambar 6. Jaringan rempah yang berubah dan lebih konsentrasi ke wilayah Nusantara pada akhir abad XIX dan awal abad XX
Sumber: diolah dari beberapa sumber

Perubahan pola jalur dan jenis komoditas karena ekonomi gula dan kopi lebih didominasi perusahaan asing, terutama Belanda dan Cina. Oleh karena itu, pelaku ekonomi Bumiputra dan sebagian Cina hanya sampai melakukan transaksi pada skala lokal dan regional. Sementara tebu masih kuat produktivitasnya karena pola jaringan kolaboratif. Jumlah pekerja yang terserap di perkebunan tebu mencapai 181.876 penduduk dengan jumlah kepala keluarga 34.733 (Fasseur, 1977). Jumlah tersebut belum dihitung dari mana asal pekerja tersebut. Artinya, proses konglomerasi ekonomi pada abad XIX lebih didominasi pada sektor perkebunan tebu yang memusat di dua distrik: Mayong, dan Pecangaan. Jika ditelusuri lebih jauh, jumlah dan pola konglomerasi tebu di Jepara ini ternyata menempati 103 desa, yang sebagian dikelola oleh pabrik Trangkil, Langse, Pecangaan, dan Mayong. Pabrik Langse mengelola 18 desa tebu, pabrik Trangkil mengelola 33 desa

dan sisanya berada di bawah pabrik gula Pecangaan dan Mayong (Fasseur, 1977). Periode 1850—1855, beberapa pabrik gula ini tutup karena ada krisis gula dan terjadi perpindahan tenaga kerja dari industri gula ke kopi (Fasseur, 1977). Pola kosmopolitanisme gula mengisyaratkan mengalami penurunan dengan hanya berlaku secara antarwilayah dan dikelola secara bersama antarpabrik gula. Pola hubungan antarperusahaan gula ini menarik sebagai pola kosmopolis yang dalam perkembangannya menjadi cepat besar dan berkembang karena saling subsidi komoditas dalam jaringan ekonomi internasional. Jaringan ekonomi antarperusahaan justru memiliki kemampuan koordinatif yang baik, sehingga, secara kolektif, mampu bertahan terhadap gempuran krisis.

Kasus gula dalam proses kosmopolis di Jepara menarik, bagaimana pengusaha Belanda melakukan eksplorasi ekonomi tebu dengan model "Kerja sama Bisnis" antarindustri gula di wilayah yang berbeda. Pola pengelolaan industri gula yang demikian menjadi semakin jelas, mengapa industri gula pada masa Tanam Paksa dan bahkan pasca-Tanam Paksa tidak mengalami krisis yang sangat berarti, walau sebagian harus ditutup. Penyatuan pengusahaan industri gula antarwilayah ini, menjadi menarik karena melibatkan kepala desa di mana desa-desa mereka digunakan untuk perkebunan tebu. Kerja sama dengan kepala desa, yang diberi hak untuk mengambil 1/10 (sepersepuluh) total hasil dari lahannya menjadi kunci bagaimana hubungan kolonialisme pada tingkat lokal menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini nanti menjadi dasar bagaimana budaya hibrida pada tingkat lokal muncul. Hubungan yang saling menguntungkan itu terlihat pada struktur pengelolaan industri tebu yang melibatkan dewan desa, kepala desa, dan bangsawan lokal dimana mereka menikmati konglomerasi tebu tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk menjelaskan adanya dialektik transnasional.

Untuk kopi, ada persoalan produksi karena terbatasnya pohon kopi. Di perkirakan pada tahun 1890-an, hanya tersisa 500 pohon yang tidak mampu mencukupi kebutuhan komersial. Itu pun terkendala tenaga pemetik yang sebagian besar belum mendapatkan upah yang layak. Karet, berbeda dengan tebu dan kopi, karena waktu yang digunakan untuk memproses cukup lama. Namun demikian, jaringan tebu, kopi, dan karet masih mempunyai pasar ke Eropa, walau dalam skala terbatas. Kemungkinan besar, karet ini menjadi pemasok tambahan produk karet dari Kalimantan Selatan yang menjadi pusat produksi karet utama sampai tahun 1940-an yang dikirim lewat Jepara (Purwanto, 1996).

Di bidang pertukangan dan industri seni, di Jepara sampai abad XVII mengalami peningkatan, terutama industri kapal. Di samping juga industri seni ukir yang disinyalir berasal dari masa Kalinyamat dengan hadirnya para

perajin ukir yang menjadi ornamen di masjid Mantingan (Muhajirin, 2018). Walaupun, bukti ekonomi industri ukir pada masa itu belum ditemukan selama penelitian, tetapi dapat diberikan catatan bahwa, masyarakat Jepara pada abad XVI telah mengenal industri ukir dan pertukangan. Pola ukiran yang terdapat di masjid Mantingan ditafsirkan sebagai perpaduan Hindu-Islam. Begitu juga bentuk gapura dan bangunan depan, berupa bangunan berpola Hindu-Islam.

Pada masa ini, ekonomi industri pertukangan mengalami peningkatan, walaupun masih dalam sekala kecil (Gustami, 2000: 128). Tidak mudah mencari data-data ekonomi industri pada periode ini, karena sumber-sumber yang ada lebih banyak menceritakan peran Ratu Kalinyamat yang melakukan perdagangan ke Malaka. Ada beberapa informasi terkait industri yang berkembang di Jepara, yaitu tekstil, tembikar, keramik, barang dari kayu, dan logam. Teknik dan estetika yang memadai menjadikan Jepara menjadi pusat industri kriya selain kapal (Gustami, 2000: 129). Semaraknya ekonomi industri yang secara bersamaan juga hasil pertanian yang didominasi Cina, menjadi salah satu sebab perkembangan jaringan ekonomi Jepara dengan kota-kota pelabuhan dunia (Gustami, 2000:129).

Pada masa VOC, Jepara mengalami penurunan produktivitas terutama industri kayu, logam, dan keramik. Untuk hasil pertanian, masih berlanjut sampai abad XX, walau mengalami penurunan. Di bawah ini menunjukkan jalur baru pada saat Jepara berada di bawah pengaruh dan didominasi VOC dan Belanda.

Gambar 7. Jalur kosmopolis rempah (tebu, kopi, karet) abad XVI—XX
Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Penurunan produktivitas logam dan keramik, ternyata meningkatkan Perdagangan Jepara ketika berada pada dominasi VOC (Belanda), industri pertukangan mulai merambah ke Eropa. Jepara kemudian mulai bertahan dengan ekonomi pertanian. Namun, pertumbuhan ekonomi pertanian ini tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi Jepara. Apalagi, pada abad XVII, Jepara mengalami serangan dari Mataram terutama pada pusat dan pos VOC di Jepara. Namun, ekonomi industri dan pertukangan ini tetap berkembang sampai abad XIX, kecuali industri perkapalan. Pengenalan seni ukir yang lebih berkualitas pada abad XIX, mendorong industri ukir ini pada abad XIX semakin menjadi industri masal. Bahkan secara khusus, pada periode Kartini ini, diperkenalkan industri ukir atau pahat penyu, kuningan, dan pandai emas dan perak (Toer, 2003: 185). Begitu juga industri rakyat yang berupa industri Tenun Dringo yang pernah menjadi industri rakyat yang tumbuh di Jepara.

Tumbuhnya industri rakyat ini pada akhir abad XIX, mendapat terjangan tekstil impor dari Cina yang lebih murah. Rintisan industri rakyat ini kemudian mengalami penurunan pada awal abad XX. Kampung Belakang Gunung, merupakan bentuk komunitas tersisa yang mencoba bangkit dan mempertahankan seni pertukangan. Pramoedya menggambarkan bagaimana perjuangan Kartini menghidupkan kembali seni ukir dan seni kriya pada umumnya. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, Jepara digambarkan oleh Pram merupakan wilayah yang miskin, dan mengalami persoalan ras dan budaya yang timpang (Toer, 2003).

Gambaran Pram yang menggunakan narasi fiktif dengan mengambil setting Kartini telah memberikan data yang menarik, bagaimana gambaran Jepara yang mengalami konglomerasi seolah mengalami keterputusan proses yang cukup parah. Pada periode Kartini, Jepara dapat dikatakan masa kekuasaan bupati. Sejak masa Mataram sampai penyerahan Jepara oleh Pakubuwana II kepada VOC, kemudian berlanjut masa Hindia Belanda sampai awal abad XX, Jepara lebih banyak dijalankan kelompok priyayi dengan pola feodal (van Niel, 2005). Era priyayi yang mendapat dukungan VOC dan kemudian berlanjut ke Hindia Belanda, penguasaan sumber ekonomi yang berpusat pada priyayi, bupati, menjadi salah satu sebab mengapa jaringan ekonomi yang sebelumnya berkembang pesat dengan pola perdagangan bebas, tiba-tiba redup pada era priyayi. Sebuah kelompok sosial yang memiliki tingkatan paling atas dan biasanya merupakan keluarga bupati.

Pada masa era priyayi, ada dua model priyayi, yaitu priyayi *luhur* dan priyayi *cilik* (kecil) (Kartodirdjo, 1987: 7—8). Kedua model priyayi tersebut berlaku untuk wilayah di luar *gupernemen*, wilayah dibawah administrasi kolonial maupun di luar *gupernemen*. Secara konseptual, priyayi ini kelompok elite yang berproses melalui dua model. Model priyayi *luhur*,

merupakan model priyayi yang merupakan priyayi keturunan. Hak-hak priyayi ini kemudian melekat secara genealogis dan terstruktur dalam ikatan kefeodalan Jawa.

Sementara, priyayi *cilik* lebih merupakan model priyayi yang dikarenakan proses *ngawula* (menghamba), *nyuwita* (belajar) atau *ngenger* (magang). Proses *ngawula*, *nyuwita* atau *ngenger* ini tidak mudah. Orang-orang tertentu dan sudah mendapatkan kepercayaan penuh oleh "majikan"-nya yang dapat melakukan proses itu, sehingga pada tahap tertentu sudah berhak menyandang gelar. Biasanya gelar priyayi *cilik*, berupa *Raden*, atau *Mas*, atau *Raden Mas* (Kartodirdjo, 1987).

Perolehan gelar *priyayi* dalam masa kolonial, bisa jadi merupakan pemberian karena kedudukannya sebagai *pangrehpraja*, pegawai administrasi. Begitu juga dapat dikarenakan proses sosial yang tidak harus menjadi pegawai. Pada masa Mataram, para priyayi di *Mancanagara*, merupakan "keturunan" baik langsung maupun tidak yang menjadi "wakil" raja di daerah. Posisi priyayi ini biasanya pada tingkat *bekel* dan bupati. Para *bekel* dan bupati ini secara langsung menjadi penguasa daerah dan dikontrol oleh raja. Semakin mendekati pusat kekuasaan, sebagaimana di *Nagaragung*, maka posisi bupati tidak semakin otonom, sebaliknya semakin menjauh dari pusat, kedudukan bekel dan bupati ini semakin kuat dan otonom.

Pesisir, merupakan bagian lingkaran kekuasaan Mataram yang secara geografis merupakan wilayah terluar. Penguasa-penguasa *pesisir* sering disebut bupati (*vasal*) yang pada awalnya merupakan *vasal* kerajaan yang ditempatkan di daerah. Pada masa Majapahit, penguasa daerah ini disebut *anden*. Baik pada masa Majapahit maupun Mataram, keduanya menempatkan "wakil penguasa" di daerah bukan hanya sebagai wakil raja secara administratif, tetapi juga sebagai cara bagaimana kerajaan memperoleh sumber ekonomi untuk kepentingan kerajaan.

Pada era priyayi ini, paling tidak, tercermin bagaimana sistem pengelolaan sumber ekonomi daerah menjadi salah satu sumber ekonomi kerajaan yang penting. Tidak hanya *upeti* yang harus diserahkan kepada raja, tetapi pola *ngenger* dan *ngawula* ini juga menjadi bagian proses sosial untuk menunjukkan loyalitas kepada raja. Ikatan ekonomi yang berupa penyerahan *upeti* dan *ngenger* atau *ngawula* itu, kemudian menjadi persoalan yang kompleks pada tingkat daerah. Hubungan pusat-daerah melalui sistem "ngawula" ini berlanjut dengan ikatan-ikatan kewajiban sebagai politik loyalitas yang penting. Sebagai mesin birokrasi (*beamtenstaat*) yang berjalan dengan berbagai aturan, ini kemudian berubah pada saat pengalihan hak pengelolaan wilayah pesisir ke VOC pada 1746 (Kartodirdjo, 1987: 13).

Pengalihan kekuasaan dari Mataram ke VOC ini bukan hanya mengubah pola administrasi yang berkaitan dengan kedudukan priyayi atau bupati.

Kuatnya VOC mengelola pesisir (*Java's Noorden Oostkust*) berdampak pada proses pengangkatan "priyayi-priyayi" baru. VOC dalam memandang bupati pesisir, justru memberikan hak-hak otonom lebih besar karena VOC dan kemudian berlanjut nanti pada masa kolonial Belanda, lebih tergantung pada peran bupati. Bupati-bupati pesisir diwajibkan mengurangi upacara-upacara besar karena dinilai tidak efisien. Juga dalam perkembangannya, sebagaimana bupati Semarang, Pekalongan, Tegal, Pati, Demak, Sedayu, dan Surabaya, tenaga kerja yang direkrut untuk kepentingan bupati mulai dikurangi.

Pada masa Mataram, Bupati Jepara juga menempati posisi penting karena persoalan gelar, kekayaan, ornamen, lambang, simbol-simbol kebesaran, tanah lungguh, serta hak-hak istimewa lainnya. Tidak jarang, para bupati ini juga diperbolehkan melakukan perdagangan dengan atau tanpa sepengetahua raja. Pada masa VOC, Bupati Jepara semakin memperoleh kebebasan dalam hal perekonomian, terutama dalam membangun upaya VOC dalam mengusahakan berbagai perkebunan dan perdagangan melalui pelabuhan Jepara. Kedudukan bupati yang semakin otonom itu justru semakin mengalami persoalan karena hak-hak tradisi dikurangi untuk efisiensi. Namun, fungsinya sebagai penarik pajak tetap dibolehkan dan juga terkait pengambilan tenaga kerja untuk usaha dagang VOC (Sutherland, 1983:35).

Antara tahun 1701—1741, ekspor VOC dari Pantai Utara Jawa diperkirakan mengalami peningkatan;

Tabel 3. Ekspor VOC dari Pantai Utara Jawa tahun 1701—1741

Produk	***Gulden*/tahun**
padi	110.470
kayu	51.612
vessels	14.641
merica	10.614
Merica hitam	8.163
cabe	1.161
kumukus	407
Lain-lain	882
indigo	8.092
kedelai	5.758

	Kedelai putih (kratok)	4.581
	Kacang hijau	890
	Lain-lain	287
kain		4.456
tali		4.206
garam		2.244

Sumber: Luc Nagtegaal, *Riding The Dutch Tiger*: *The Dutch East Indies Company and The Northeast Coast Java, 1680—1743*, Leiden:KITLV, 1996, hlm. 134)

Pada masa Deandels, 1808—1811, posisi bupati di Pantai Utara Jawa dikerahkan sebagai "mesin" birokrasi Kolonial. Deandels melakukan reorganisasi struktur birokrasi yang ditata berdasarkan aturan kerajaan. Hak-hak istimewa dari jabatan, pewarisan, jaminan tenaga kerja, pajak atas hasil penarikan dari hasil produk pertanian mulai dikurangi dan kemudian mulai dijadikan sebagai pegawai kolonial (Sutherland, 1983: 35). Para bupati ini kemudian semakin berkurang peran sosial ekonominya dan bahkan sebagian dari bupati-bupati tersebut merasa tidak puas. Posisi bupati sebagai pegawai, kemudian mereka memperoleh gaji sebagai pengganti hak-hak istimewa yang pernah diperoleh.

Pada masa Raffles, 1811—1816, posisi bupati benar-benar menjadi pegawai dengan struktur birokrasi yang semakin jelas. Susunan struktur birokrasi di Pantai Utara Jawa pada tahun 1811 sebagai berikut:

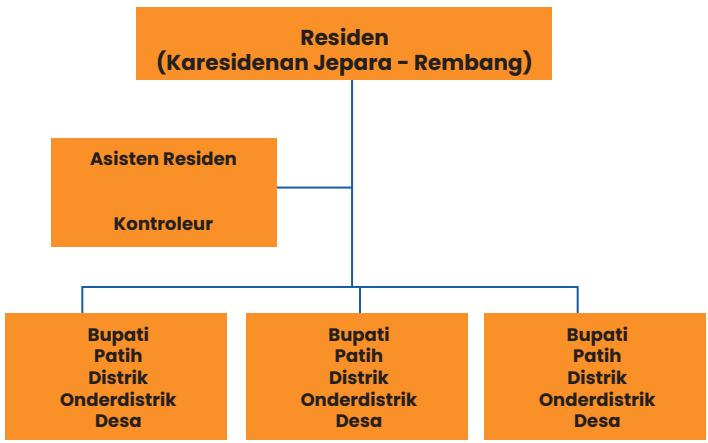

Gambar 8. Struktur Birokrasi Jawa, khususnya Residensi Jepara-Rembang
Sumber: Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Jakarta: Sinar Harapan*, 1983, hlm. 37

Struktur birokrasi yang demikian, mengharuskan bupati melakukan pengetatan keuangan dengan cara melakukan penarikan pajak yang sering dilakukan secara tidak resmi. Hal yang kemudian menyebabkan penguatan kelembagaan "kepriyayian" semakin kuat dan sampai masa Tanam Paksa, 1825—1830 dan dilanjutkan dengan masa liberal, struktur kelembagaan kepriyayian ini kemudian tidak berubah.

Ada perubahan menarik pada periode 1900-an, dimana proses kemajuan (*unities of discourse*) menjadi gejala umum para priyayi Jawa (Kuntowijoyo, 2004: IX). Munculnya kesadaran priyayi dalam berbagai kemajuan termasuk berorganisasi, menjadikan berbagai perubahan sosial mulai tampak. Walaupun, masa liberal sampai munculnya kesadaran kemajuan dalam perkembangannya tidak semua mencapai wilayah-wilayah kabupaten di Pantai Utara Jawa (van Niel, 1960 , Kuntowijoyo, 2004). Jepara mengalami kegelisahan di kalangan priyayi, terutama yang mengenyam pendidikan Eropa maupun yang melakukan komunikasi dan hidup dengan orang-orang Eropa.

Pramoedya Ananta Toer dalam menjelaskan kondisi dan situasi Jepara pada "era priyayi" sangat kontras bagaimana seorang priyayi perempuan melakukan kritik dan sekaligus melakukan pembelaan secara cerdas di antara dua arus budaya besar yang hadir secara bersamaan, feodal-Jawa dan kolonial-primordial. Sebuah pilihan yang tidak mudah, ketika tradisi priyayi dalam masa puncaknya dan kolonial memasuki era kapitalistik-liberal (Pramoedya Ananta Toer, 2003).

C. Sinergi Elite, Monopoli, dan Berakhirnya Konglomerasi

Proses konglomerasi ekonomi dengan basis ekonomi perdagangan dan perkebunan, tidak banyak memberikan stimula ekonomi bagi komunitas lokal Jepara sampai memasuki masa krisis 1920-an. Jatuhnya Jepara di bawah Belanda, lebih banyak memberi kesempatan pada kelompok elite baik lokal maupun transnasional mulai membangun pola-pola baru tidak hanya perkebunan tebu. Hubungan antarelite ini menciptakan peluang perubahan struktur dan relasi-relasi pasar berbagai komoditas. Pada beberapa jenis komoditas, yang sebelumnya didominasi keramik Cina, tekstil India, dan produk pertanian lokal, berganti dengan komoditas-komoditas komersial sebagaimana gula, kopi, dan lada yang dikuasai oleh Cina maupun Belanda. Lancarnya proses monopoli komoditas di Jepara tidak lepas dari koneksitas antara elite lokal dengan para pengusaha Cina maupun Belanda.

Perubahan struktur yang menempatkan bangsawan lokal sampai pada tingkat petani sebagai bagian struktur ekonomi kolonial, merupakan gejala baru karena pada masa Mataram, hubungan ekonomi antara bupati dan Belanda dilarang (Kian, 2006; 10). Hubungan bupati dengan para pengusaha

Belanda ini kemudian menjadi hubungan-hubungan sinergis tidak hanya di Jepara, tetapi juga dengan Bupati Gumulak, Terboyo, Kaligawe, dan Lasem (Kian, 2006: 146—147). Sinergisitas yang paling jelas terjadi pada sistem komersialisasi gula yang memiliki sistem manajemen mulai dari atas sampai bawah. Pada 1860-an, di Jepara mulai dikembangkan ekonomi gula secara besar-besaran di bawah usulan dari Komisioner Jenderal N.S. Nederburg (van Niel, 2005: 60). Sampai tahun 1900, pasokan gula di Jepara dan beberapa wilayah Pati dan Semarang tidak mengalami persoalan. Walaupun ekonomi gula di Jepara ini kemudian menggeser beras, yang tahun 1900 ditandai dengan adanya krisis beras di Jepara.

Di tangan Nederburg, ekonomi gula di Jepara berkembang pesat dan menjadi sarana membangun relasi-relasi antara orang Eropa dengan Bumiputra. Sebenarnya tidak hanya Jepara, Pati dan Kudus juga menjadi wilayah industri gula. Semakin luas jangkauan industri gula ini, semakin membuka peluang terbangunnya hubungan sinergisitas antara orang Eropa, Cina, dan Bumiputra. Untuk menjalankan "proyek gula" tersebut, pemerintah kolonial memberikan hak sewa bagi Cina sebagai pengelola bisnis industri gula (van Niel, 2005: 113). Pengelola Cina ini biasanya berpangkat kapten bertindak sebagai penguasa kota. Melalui sistem menajerial kapten Cina ini, struktur pengelolaan industri gula disusun rapi sampai ke paling mendasar, yaitu petani (van Niel, 2005: 113). Para bangsawan lokal, termasuk bupati, kepala distrik sampai paling bawah kepala desa terlibat langsung dalam praktik pengelolaan industri gula. Sistem sewa lahan, pembagian hasil panen, pajak, upah petani menjadi "kesepakatan" kapten Cina, penyewa, dan kepala desa. Fasseur mencatat, beberapa kepala desa dalam praktik pengelolaan industri gula ini sering mencari keuntungan sendiri dengan menaikkan harga sewa lahan maupun pengambilan hasil panen yang lebih dari 1/10 total hasil panen (Fasseur, 1977: 261—293).

Praktik gula tidak sama dengan kopi yang tidak sukses di Jepara, sehingga kopi tetap dimonopoli pengusaha Belanda langsung karena jumlah pohon kopi tidak lebih dari 500 pohon yang terletak di lereng Gunung Muria (*Kolonial Studien*, 1867; 15). Walaupun di dalam memasarkan hasil panen, pengusaha Belanda juga meminta pedagang besar Cina, Tan Ho Goan yang bertempat tinggal di Pati untuk menjadi pemasok hasil kopi Jepara yang rata-rata setiap panen berhasil mengumpulkan sebanyak 160 *pikul* (*Kolonial Studien*, 1867; 15). Kerja sama ekonomi kopi dengan Cina ini, menurut laporan *Kolonial Studien*, pemerintah sering rugi karena praktik perdagangan kopi oleh Tan Ho Goan ini sering tidak dilakukan dengan jujur dengan cara menimbun hasil panen kopi di gudang yang jauh dari pengawasan pemerintah dan perkampungan penduduk.

Untuk mengatasi monopoli dan praktik penimbunan kopi, maka

pemerintah melalui staatblad no. 5, 9 Januari 1821 memerintahkan kepala daerah yang kemudian dilanjutkan ke kepala desa untuk pengaturan penanaman kopi per desa serta manajemen hasil panen di setiap desa (*De Hoofd Inspectuer Chef v/d Dients, V/H Boschwezen, 1902*). Upaya pemerintah dengan melibatkan kepala daerah dan kepala desa dalam pengelolaan kopi di Jepara tersebut karena ada temuan bahwa upah rata-rata di Jepara pada 1868 masih jauh di bawah standar. Di samping itu, masih banyak praktik-praktik pemotongan upah yang tidak resmi, misalnya seorang petani seharusnya menerima rata-rata 24,15 *gulden*, tetapi yang diterima hanya 19,00 *gulden*. (*Kolonial Studien*, 1867: 115). Di samping kopi sebagai komoditas, juga sebagai upaya untuk menahan lahan-lahan lereng Muria dari ancaman longsor (De Hoofd Inspectuer Chef v/d Dients, V/H Boschwezen, 1902).

Baik perkebunan kopi maupun industri gula, dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan pelibatan komunitas lokal, dari bupati sampai petani. Bahkan, di Jepara sendiri, jumlah rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri gula mencapai 3.330 rumah tangga (Fasseur,1977: 7). Jumlah tenaga kerja yang direkrut tersebut berasal lebih dari 33 desa dengan sistem kontrak maupun buruh lepas yang mulai muncul pada 1860-an (van Schaik, 1986). Hal tersebut berbeda dengan kopi yang lebih didominasi buruh lepas. Hal ini dikarenakan karakter panen dan perawatan tanaman kopi yang tidak sebagaimana tebu. Pada kasus tebu lebih rumit karena bersifat masal dan melibatkan semua unsur desa. Ketika sawah yang menjadi target penanaman tebu, biasanya dengan sistem sewa dan bagi hasil, kepala desa mengumpulkan penduduk yang memiliki sawah atau yang hanya sebagai tenaga kerja, di rumah kepala desa. Perkumpulan itu menentukan luas sawah atau ladang yang akan digarap, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sistem pengairan, dan tenaga hewan yang akan digunakan. Di Jepara, tenaga hewan yang dibutuhkan kebanyakan hewan kerbau. Pola pembagian lahan untuk tebu dan cara menggarapnya menjadi informasi penting untuk menyakinkan bupati yang menjadi bahan laporan ke pengusaha Belanda dan/atau Cina. (Fasseur, 1977: 8—9). Hal yang tidak terjadi secara ketat di perkebunan kopi.

Hubungan orang Eropa, Cina, dan Bumiputra tidak hanya berhenti di perkebunan tebu dan kopi. Pada transaksi perdagangan candu, Jepara memiliki peran penting keluar-masuknya candu dari dan ke Jawa. Di samping Jepara, candu juga diekspor melaui Rembang dan Semarang. Konsumsi candu di Jawa paling banyak terjadi. Dari 4000 *pikul* tersebut, sepertiganya beredar dan dikonsumsi di Jawa. Candu yang ke Jepara dipasok dari Bali, Pegatan (Kalimantan) masuk melalui Jepara dan Juana, dengan perahu-perahu kecil kemudian dikirim melalui darat ke Rembang, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, dan Bagelen. Pada 1882 misalnya, ada 7 kapal yang mengangkut

candu berlabuh di Jepara. Dari kapal tersebut, candu itu kemudian dikirim melalui perahu kecil ke berbagai wilayah. Kapal tersebut biasanya berawak 8 orang dan melakukan perjalanan ke Jawa sebanyak 2—3 kali selama satu tahun. Kapal-kapal itu biasanya hanya memuat 8 *pikul* candu, dan beras ("*Opium* de Smokkelhandel ter Zee", t.t).

Sampai pada 1905, candu ini kemudian menjadi konsumsi umum di kota-kota di Jawa. Bahkan sampai 1930-an, candu menjadi konsumsi kelompok etnis Cina dan sebagian orang Jawa di kota-kota kolonial (Rush, 1990). Pola perdagangan dan persebaran ekonomi candu lebih luas dan lebih rumit. Pelibatan Cina dan pemilik perahu-perahu terkait transportasi candu melalui jalur "tikus" dan pedagang lokal candu di Jepara menstimulasi adanya dinamika hubungan antaretnis yang penting. Bahkan, khusus kasus candu ini kemudian menjadi peluang ekonomi lokal para pemilik perahu kecil ketika hasil tangkapan ikan mengalami penurunan akibat musim. Para *juragan* perahu memperoleh keuntungan besar dengan penyewaan pengangkutan candu. Di pihak Cina, mereka memperoleh keuntungan keamanan karena para *juragan* perahu juga harus menjaga perahu-perahu bermuatan candu tersebut sebelum dikirim ke daerah lain ("*Opium* de Smokkelhandel ter Zee", t.t). Di samping itu, konsumen candu di Jepara termasuk tinggi sebanding dengan wilayah Rembang, Surabaya, Kedu, dan Yogyakarta. Mayoritas konsumen candu adalah para petani lokal dan buruh perkebunan. Pemasok dan pengedar candu kebanyakan orang Cina sebagaimana pengusaha Oei Soen Tjioe, Tjoa Boen Sing, begitu juga pengusaha lokal seperti, Kassiman (Rush, 1990: 72; 109). Untuk memperlancar upaya distribusi, para pemasok Cina ini bekerjasama dengan *juragan* kapal dan perahu, salah satunya H. Jahja (Rush, 1990: 72).

Konglomerasi candu ini yang kemudian mewarnai proses kosmopolis secara luas meliputi beberapa wilayah peredaran dengan pengawasan dari pusat, yaitu Kongsi Kediri dipimpin Han Liong Ing (Rush, 1990: 96). Jaringan candu ini kemudian berkembang semakin intensif, tidak hanya pada pemakai, tetapi juga model perdagangan yang merambat ke pasar gelap (*black market*). Hal ini yang kemudian memunculkan keresahan dan kemudian dibentuk tim pencari fakta candu, *Opiumjagers* yang melibatkan petani, mantri polisi, pegawai rendahan lokal Eropa, tim mata-mata (dari kontrolir sampai desa) dan tim priyayi (Rush, 1990: 152—158). Secara umum, 4000 *pikul* produktivitas candu beredar di Hindia Belanda dan Singapura dengan nilai 500.000 *gulden* ("*Opium* de Smokkelhandel ter Zee", t.t).

Ekonomi, kopi, tebu, dan candu bukan hanya berhenti pada persoalan ekonomi dan sistem perdagangan semata, tetapi hal yang terjadi pada hubungan sosial budaya yang berdialektik antara orang Eropa, Cina, dan Bumiputra dalam membentuk hibriditas yang khas. Sinergisitas ekonomi

pada tingkat elite memberikan dampak ekonomi secara makro meningkat, tetapi Jepara sampai awal abad XX, masih merupakan kota yang diliputi dengan tradisi priyayi yang ketat. Kehidupan priyayi di dalam kabupaten, aturan dan tata perilaku priyayi diwajibkan diberlakukan secara ketat.

Kuatnya tradisi priyayi pada tingkat lokal, sebenarnya dapat ditelusuri sejak di Jepara muncul penguasa Pati Unus dan dilanjutkan Ratu Kalinyamat. Namun, sayangnya data-data yang dapat dilacak banyak yang belum memberikan penjelasan yang lengkap (Pires, 2015; de Graaf dan Pigeaud, 1984). Pada masa Kolonial Portugis pun, Jepara masih suram terkait data-data sosial ekonomi sebagai kelanjutan proses kosmopolis rempah. Hanya beberapa informasi terkait industri perkapalan sejak Jepara menjadi *vasal* Mataram abad XVII. Pada abad XVIII mulai mengalami kemerosotan karena Jepara mulai memasuki dunia perdagangan yang mengikuti jalur dan jaringan Eropa, terutama Belanda (Gustami, 2000: 130). Tampaknya, jejaring perdagangan yang dikelola orang Belanda dan juga Cina, tidak banyak memberikan peluang ekonomi bagi Jepara. Proses ekonomi gula, kopi, indigo, dan candu menjadi bagian penting, jika tidak disebut sebagai penyebab utama, terpuruknya ekonomi kapitalistik Jepara.

Pola perdagangan yang tumbuh sejak abad VII, kemudian harus kembali memasuki dunia agraris, terbatas dan berada di bawah bayang-bayanag monopoli Belanda dan Cina (Kian, 1994). Kemunduran perdagangan Jepara semakin menurun ketika pelabuhan pindah ke Semarang. Akvitas perdagangan kemudian mulai memusat ke Semarang. Jepara kemudian hanya menjadi "kota pengepul" komoditas yang didistribusikan melalui pelabuhan Semarang ke beberapa wilayah. Menurunnya aktivitas perdagangan laut ini kemudian diikuti dengan semakin menurunnya produktivitas hasil pertanian komersial yang sebelumnya menjadi andalan Jepara. Berbagai komoditas tertentu seperti beras, gula, padi, nila, buah-buahan, kapas, ikan kering dan asin, ampas minyak, beberapa barang kerajinan dan perabot rumah tangga mulai menjadi komoditas ekpsor yang tersisa (Alamsyah, 2015). Berbagai barang tersebut diekspor ke Singapura. Sebaliknya, Jepara harus mengimpor barang-barang seperti gambir, tembakau, tembikar, barang dari tembaga, lilin, timah, kapas, minyak, dan rotan.

Perdagangan ekspor dari Jepara yang ke luar negeri pada tahun 1850-an hanya ke Singapura karena hampir semua kegiatan ekspor pada masa Tanam Paksa, khususnya yang berasal dari Jepara dilakukan dan didominasi oleh Cina dan sebagian oleh orang Belanda. Hampir semua aktivitas ekspor dari Jepara dikendalikan dari Semarang dan/atau Pati. Pati pada masa liberal menjadi ibu kota Residensi Jepara-Rembang dengan wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Kabupaten Jepara, sampai tahun 1931, dipimpin oleh Asisten Wedono atau Mantri Polisi (MvO, 1905—1936).

Surutnya kegiatan ekspor, khususnya ke luar negeri, sangat dimungkinkan akibat perpindahan pelabuhan. Akan tetapi, jika dilihat dari para pelaku, Cina, dan Eropa, maka sebenarnya ada persoalan sosial pada tingkat lokal. Kuatnya peran priyayi sebagai kelompok sosial yang memperoleh hak khusus dan kehidupan yang sudah terjamin dari praktik-praktik bisnis kolonial, sangat menguntungkan pihak Cina dan Eropa untuk melancarkan jejaring perdagangan dari dan ke Jepara. Oleh karena itu, pola perdagangan yang sebelumnya menyebar dan terhubung dengan berbagai kawasan, baik Nusantara maupun wilayah Asia Timur, Barat dan Selatan, serta Eropa, kemudian mulai tahun 1850-an hanya bergerak pada tingkat lokal. Jepara pada akhir abad XIX, masih melakukan bebagai aktivitas perdagangan lokal ke Demak dan beberapa ke Madura, Banjarmasin, Bali, Bawean, hingga Belitung.

Sampai abad XIX, perekonomian agraris Jepara terus mengalami penurunan. Banyak lahan terbengkalai dan ditinggal para penggarap. Lahan-lahan di sekitar Muria, banyak yang masih berpola komunal. Suatu sistem hak pengelolaan lahan dengan cara bergantian, karena lahan tersebut dapat dikatakan sebagai lahan "milik bersama". Sementara lahan-lahan yang berada di luar area lereng Muria, masih diberi hak individu (*yasa*, *yasan*). Sebuah sistem hak pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan secara individual dan dapat diwariskan (MvO, 1905—1936).

Di balik semakin turunnya produktivitas pertanian dan produk rempah lainnya, Jepara masih memiliki andalan, yaitu beras dan ikan. Walaupun dalam tahun 1860-an mengalami penurunan produktivitas yang sangat signifikan (MvO, 1905-1936). Bahkan, pada awal abad XX, Jepara harus mengimpor beras dari Semarang. Hal ini untuk menutupi krisis beras yang terjadi di Jepara.

Galangan industri kapal yang diceritakan Pires pernah menjadi industri besar di Jepara sudah tidak berfungsi lagi (Pires, 2015). Beberapa industri kapal besar mulai bergeser ke Lasem, Juwana, dan Rembang pada 1931. Di Lasem, industri kapal dimiliki oleh perusahaan Berendsen mampu membuat kapal *koyang* berukuran besar 29 kapal per tahun, walaupun pada tahun sebelumnya, yakni 1929, mampu membuat 65 kapal. Sementara industri di Juwana hanya memperbaiki kapal-kapal yang rusak karena kalah bersaing dengan industri Berendsen Lasem (MvO, 1905-1936). Sementara pada tahun yang sama di Sarang (Rembang) dibuat perahu *mayang* dengan muatan 20 orang. Sampai tahun 1930-an, tidak ada laporan aktivitas industri kapal besar di Jepara.

Merosotnya industri kapal besar, baik kapal *mayang* maupun *koyang* menunjukkan bagaimana proses domestikasi nelayan di Pantai Utara Jawa berakibat cukup parah. Nelayan hanya mampu berlayar sampai 10 mil dari

daratan, dan kebanyakan mereka mengusahakan tambak ikan bandeng. Di Jepara, pada 1930-an, luas tambak ikan bandeng mencapai 1.150 *bau*. Dibandingkan dengan Rembang yang mencapai 1.453 *bau*, Pati 8.036 *bau*, maka potensi ekonomi bandeng Jepara sangat kecil (MvO, 1905-1936). Hal ini mengakibatkan nelayan lebih banyak yang melakukan pencarian ikan ke laut langsung yang dijual di pasar desa maupun kabupaten. Jumlah pasar desa di Jepara mencapai 23 pasar dan pasar kabupaten ada 2 pasar. Pasar yang tidak merata di seluruh desa di Jepara, memberikan akses yang terbatas bagi pedagang yang jauh dari pasar.

Pada tahun 1930-an ada 188 desa yang tersebar di Onderdistrik Jepara, Kedung, Batealit, Bangsri, Mlonggo, Keling, Pecangaan, Mayong, Welahan, dan Krimunjawa. Adanya pasar desa yang cukup banyak, membuka akses untuk petani dan nelayan melakukan penjualan barang dagangannya cukup di pasar terdekat. Pasar desa sebagai fenomena yang penting pada masa kolonial, menjadi bagian yang mempercepat proses domestikasi perdagangan yang tidak perlu membutuhkan alat transportasi dan waktu yang cukup. Jepara pada akhir abad XIX dan kemudian mencapai puncaknya pada awal abad XX, ekonomi lokal kemudian mengganti ekonomi transnasional yang pernah membawa Jepara sebagai kota dunia, kota kosmopolitan.

Praktik perdagangan kemudian hanya menggunakan barang dagangan yang terbatas dan juga hanya berupa barang-barang yang digunakan sehari-hari dan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pasar desa tersebut kemudian, satu sisi menjadi alternatif terpuruknya ekonomi Jepara sejak tahun 1850-an, tetapi sisi yang lain justru memperpendek jaringan perdagangan dengan berbagai keterbatasan. Berkurangnya produktivitas lahan-lahan pertanian dan penduduk Jepara saat itu mencapai 333.840 Bumiputra, 237 golongan Eropa, sejumlah 2.577 penduduk Cina serta 293 penduduk Timur Asing lainnya, maka tidak heran yang kemudian banyak lahan-lahan yang ditinggalkan penggarap.

Sementara secara sosial, lahan-lahan komunal yang mayoritas berada di sekitar lereng Muria kemudian dibagi-bagi, sehingga sampai 1930-an di Jepara hampir tidak terdapat tanah komunal. Di satu sisi, di Jepara dilaporkan tidak ada pembukaan lahan pertanian baru sampai tahun 1930-an, kecuali di wilayah tambak. Hal ini karena persoalan tenaga kerja yang mulai memasuki ekonomi perdagangan yang berarti tidak lagi memiliki waktu penuh untuk mengerjakan lahan-lahan yang dimiliki sebagai sumber ekonomi utama. Lahan-lahan kosong semakin banyak di Jepara, di samping lahan *yasan* dan komunal. Hanya satu-satunya di Telukawur yang merupakan lahan partikelir seluas 315 *bau* dengan penduduk 74 orang dengan pemilik orang Cina, Liam Swie Liem (MvO, 1905-1936). Perubahan kepemilikan lahan ini sangat penting bagaimana proses konglomerasi kemudian mengalami

persoalan di Jepara. Untuk lahan-lahan *yasan*, terutama di wilayah Pecangaan dan Mayong banyak yang disewakan. Di Pecangaan, lahan yang disewakan ke perkebunan tebu mencapai 1.135 *bau*, sedangkan di Mayong 953 *bau*. Baik di Pecangaan maupun Mayong, perkebunan tebu tersebut banyak yang dikelola Cina.

Bahkan pada 1894, Residen Jepara yang membawai wilayah Jepara, Kudus, dan Pati melakukan reboisasi hutan dan perkebunan di lereng Gunung Muria (*Natuurlijke Rebiosatie*, 1902). Untuk daerah Jepara reboisasi dilakukan di Gunung Pringtali, Desa Damarwulan, dengan penanaman bibit jambu, *senggani*, pisang, sengon, walikukun, *cangkar*, jeruk nipis, imer, tembelean, *alang-alang*, *pranak*, kedali, tembagan, dan pohon konservasi (*Natuurlijke Rebiosatie*, 1902: 12). Untuk pohon-pohon konservasi banyak ditanam di sepanjang tepi Sungai Jlengut dan beberapa tanah lapang (*oro-oro*). Banyaknya *oro-oro* pada menjelang abad XX, dapat diartikan adanya pola perpindahan penduduk ke Semarang dan atau ke kota-kota lain yang berkembang sebagai kota perdagangan baru pada abad XX. Munculnya Semarang sebagai *Gemeente* (Kota Praja) pada tahun 1906, sebagai contoh, memberikan dorongan besar meningkatnya penduduk Jepara yang melakukan urbanisasi ke Semarang sampai tahun 1930-an (Akhyat, 2020: Ingleson, 1983;1986). Krisis tahun 1929—1930, memberikan umpan balik para migran kembali ke kampung halaman masing-masing lagi (Ingleson, 1983)

Di samping Desa Damarwulan, Desa Semanding di Gunung Semili juga dilakukan reboisasi. Di Gunung Semili, rata-rata tanahnya dengan ketinggian 3—6 meter dengan pola turun naik, maka reboisasi disesuaikan dengan kontur lahan. Untuk Gunung Blumbungsalak, di Desa Somosari, lahan di wilayah ini masih banyak hutan dan mulai dipikirkan beberapa tanaman yang sesuai kondisi alam di Gunung Blumbungsalak. Tanaman keras, seperti sengon, *rimong*, *anggrung*, *gondang*, *gintungan*, *pisang*, *bendo*, salam, bambu, dan jenis pakis (*Natuurlijke Reboisatie*, 1902: 13). Proses reboisasi ini kemudian menjadi alternatif sumber ekonomi bagi penduduk yang tidak melakukan migrasi maupun urbanisasi.

Upaya reboisasi di beberapa daerah di sekitar Gunung Muria merupakan cara mengembalikan lahan-lahan yang rusak akibat tanaman-tanaman perkebunan yang sebelumnya merupakan tanaman industri seperti tebu, kopi, dan sebagian karet. Namun, ketika Jepara mengalami persoalan ekonomi akibat beralihnya fungsi pelabuhan dan jejaringan ekonomi pertanian yang beralih ke Semarang, sejak tahun 1896 banyak ditemukan lahan-lahan kosong (*oro-oro*) yang tidak produktif. Upaya reboisasi tentu bukan sebagai upaya membangun ekonomi yang sempat terpuruk, tetapi sebagai cara untuk mengatasi hebatnya krisis di Jepara pada masa liberal. Kritikan Kartini, terkait dengan kondisi sosial Jepara pada awal abad XX,

tentu bukan persoalan yang sederhana (Pramoedya Ananta Toer, 2006). Bahkan, berdasarkan berbagai sumber Belanda menyebut hebatnya krisis di Jepara sampai akhirnya harus mendatangkan bahan makanan dari luar kota, Semarang.

Krisis beras 1860-an tidak menyurutkan aktivitas perdagangan di Jepara. Komoditas kapuk, kain, bahan makanan lain, dan kuda sering menjadi komoditas yang diperjualbelikan di Jepara. Tidak hanya Cina, Arab, India, dan Eropa, serta kelompok pedagang Bumiputra yang berasal dari luar Jawa juga ikut meramaikan perdagangan di Jepara. Mereka adalah pedagang Bugis, Bali, Borneo, Keling, Palembang, Makasar, Melayu, dan beberapa orang Bengala (Alamsyah, 2015). Pedagang lokal hanya menjalankan komoditas lokal sebagaimana ikan asing, gula, telor, ampas minyak, dan buncis.

Sementara pedagang lokal yang memiliki modal, mereka menjalankan perdagangan ekspor dan juga berpraktik sebagai perantara. Para pedagang lokal yang juga berpraktik sebagai pedagang perantara ini biasanya membuat perjanjian dengan Cina untuk pembelian suatu komoditas. Perjanjian tersebut tidak jarang hanya berlaku di atas kertas, sehingga pola-pola perdagangan yang berkembang sebenarnya hanya sebagai penutup hancurnya jaringan konglomerasi. Keragaman etnis sebagai latar belakang pedagang di Jepara tentu saja memberikan dampak persaingan yang cukup keras. Oleh karena itu, pedagang lokal sampai tahun 1890-an banyak yang beralih ke penjual jasa ke kota, sebagai tukang, buruh bangunan dan kereta api, pedagang keliling dan beberapa penjual jasa sebagaimana artis keliling (Ingleson, 1986; foto-foto koleksi KITLV; *Volkstelling* 1930).

Catatan menarik pada periode *Gemeente* Semarang ini jumlah migrasi dan urbanisasi dari Jepara cukup tinggi. Berdasarkan data Sensus 1930, jumlah migran di Kota Semarang yang berasal dari Jepara, laki-laki berjumlah 1.347, sedangkan perempuan 1.622, total mencapai 2.969 (*Volkstelling*, 1930: 25). Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Jepara baik Bumiputra, Eropa maupun Timur Asing sebanyak 336.845 dengan penduduk Bumiputra sekitar 333.845 (*Volkstelling*, 1930: 132—133).

Untuk jumlah migrasi dari Jepara ke berbagai wilayah sekitar 7.630 (*Volkstelling*, 1930:31). Tingginya penduduk Jepara sampai tahun 1930 yang melakukan migrasi tentu saja ini menjadi jelas, bagaimana kondisi ekonomi Jepara tidak secara efektif memberikan sumber ekonomi yang cukup.

BAB III
Hibridisasi dan Dialektika Kultural

Bab ini lebih jauh menjelaskan pola-pola pengaruh dan hubungan antarbudaya yang mulai memberikan peluang munculnya budaya hibrida yang masuk di dalam karya seni maupun arsitektur. Struktur sosial dalam masyarakat lokal perlu mendapat perhatian guna menjelaskan kemampuan mengadopsi dan menerima pengaruh asing sebagai akibat dari proses jaringan rempah yang hadir jauh sebelum kolonial Eropa masuk di Jepara.

Sebagai wilayah yang terbentuk atas dasar kemajemukan budaya dan struktur sosial, maka proses-proses adaptasi, absorbsi menjadi pintu masuk bagaimana budaya hibrida terbentuk. Budaya hibrida di Jepara dapat ditelusuri pengaruh Hindu dan Islam. Begitu juga tradisi atau budaya Eropa dan Cina sangat kuat, terlebih pada aspek seni.

A. Hibridisasi di Jepara

Secara administratif, belum banyak sumber yang menyebut struktur dan tata administrasi di Jepara yang jelas, kecuali struktur birokrasi yang merupakan kelanjutan pada masa Raffles. Kuatnya kelompok priyayi yang kemudian seolah merupakan "kerajaan kecil" di daerah ini yang terus menerus tidak pernah mengalami perubahan, dan apalagi mengalami sirkulasi jabatan (Sutherland, 1983; Kuntowijoyo, 2004). Bentuk dan struktrur sosial yang berkembang juga tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yang mengalami proses kolonisasi dan kolonialisasi, baik pada masa pra-Eropa sampai masa Eropa.

Keragaman penduduk yang didukung dengan keragaman budaya yang berproses sejak abad VII, telah membentuk karakter Jepara yang khas, sebuah kota pantai tetapi memiliki dasar budaya yang ragam dan berjejaring global. Merunut pembentukan Kota Jepara dengan berbagai unsur budaya dengan mengandalkan jaringan ekonomi perdagangan yang luas, maka semakin membuka sudut pandang bahwa sejarah Jepara dengan proses

pembentukan komunitas dan budayanya wajar menjadi wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan karakter khas. Hal ini kemudian menyulitkan untuk mengidentifikasi pola dan karakter budaya Jepara. Para pengamat dan sejarawan sering menggunakan istilah kota metropolitan yang terbentuk sangat kuat sejak ada hubungan perdagangan baik yang bersifat interinsuler (antarpulau-daerah) maupun antarwilayah-negara. Hal ini menunjukkan kuatnya tradisi "campuran" dalam istilah Reid maupun Lombard sebagai budaya persilangan (*crossroad-culture*) (Reid, 1993; Lombard, 1996). Pada struktur budaya yang berpola persilangan ini, maka tidak mudah menentukan unsur-unsur pokok dari budaya lokal, tetapi dapat dirunut kekuatan daya konsentris yang menyebabkan terjadinya proses persilangan budaya (Lombard, 1996).

Hasil kajian yang dilakukan, daya konsentris Jepara sejak awal lebih ditentukan oleh kemampuan secara strategis mengelola jaringan perdagangan dunia. Hal ini terlihat ketersediaan beragam komoditas yang diperlukan dalam proses komersialisasi awal. Terpenuhinya berbagai barang komoditas yang diperlukan oleh kebutuhan pasar Eropa, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menunjukkan kemampuan mengelola proses, sistem, dan praktik perdagangan internasional. Hal ini sangat penting dan diakui sebagai salah satu yang utama daya konsentris Jepara sebagai pusat transit jaringan perdagangan internasional (*an age of commerce*) (Reid, 1993).

Di sisi lain, pengaruh tradisi dan agama asing dalam proses komersialisasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah Jepara. Jepara dan kemudian wilayah ini menjadi bagian dari Jawa, merupakan salah satu wilayah di kawasan Nusantara khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya yang pada masa-masa awal modernisasi, termasuk yang terpengaruh oleh kebudayaan besar (*great tradition*) sebagaimana Hindu, Budha, Konfusianisme, Hellenisme, dan Islam sangat kuat (Braudel, 1966). Budaya-budaya yang terbentuk pada masa prakolonial itu mengalami kemajuan dengan bergantinya peradaban. Hal yang sangat dimungkinkan adalah munculnya proses akulturasi yang merupakan bentuk budaya campuran atau perubahan ke arah budaya baru dengan perpaduan yang selektif di antara unsur-unsur tersebut. Pada tradisi kecil suatu budaya (*little tradition*), akan mengalami perkembangan dan akan muncul budaya hibridayang merupakan budaya baru sebagai budaya campuran berbagai unsur. Kontinuitas sejarah Jepara sebagai wilayah transit dari berbagai jejaring perdagangan dan didukung dengan kehadiran berbagai suku bangsa, semakin memperkuat adanya keragaman sosial dan budaya.

Jepara dalam perkembangannya memasuki proses hibridisasi yang semakin kompleks. Percampuran berbagai tradisi dan agama menjadi sebuah kerumitan untuk menentukan budaya asli Jepara (Muhajirin, 2018). Percampuran dan perpaduan antarunsur budaya yang membentuk budaya

di Jepara ini menimbulkan proses adaptif secara menyeluruh dan sempurna. Pola-pola organik dalam struktur dan proses sosial pesisir sangat penting dalam menjelaskan proses hibridisasi Jepara.

Walaupun sebagai budaya hibrida, budaya Jepara memiliki karakter yang kuat pada proses internalisasi kulturalnya karena sering dikaitkan dengan unsur-unsur spiritualitas dan religiositasnya (Nangoy dan Sofiana, 2013). Unsur-unsur spiritualitas dan religiositas memang bukan hal mudah untuk dijelaskan dalam konteks telah terjadi hibridisasi. Namun, secara umum, unsur-unsur tersebut bukan hanya hidup dalam cara masyarakat memahami dan memiliki sudut pandang yang mengombinasikan berbagai unsur dalam sebuah kepercayaan, namun juga lebih jauh praktik-praktik kepercayaan itupun tampak lebih mudah diamati adanya uncur-unsur melekat secara bersamaan (Geertz, 1960). Paling tidak unsur-unsur dominan dalam aspek spriritualitas sebagaimana tradisi ritual, sistem kepercayaan yang menyatukan unsur-unsur pokok agama dengan budaya lokal maupun asing, serta praktik-praktik simbolik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah proses panjang yang dapat diidentifikasikan sebagai hasil dari proses kosmopolis (Reid, 2015).

Kosmopolitanisme, dengan unsur utamanya adalah aktivitas perdagangan memberikan stimulus munculnya aspek-aspek tradisi baru dengan pola hibrida. Tradisi Arab, India, Cina, bahkan Eropa sebagai pelaku utama konglomerasi asing meninggalkan berbagai bentuk bahasa, seni arsitektur, agama serta tradisi-tradisi asing yang mulai bercampur dengan tradisi lokal. Proses yang cair sejak terbentuknya hubungan antarbudaya kemudian berlanjut dengan pembentukan semesta simbolik, baik dalam bentuk karya seni, arsitektur, bahasa, tradisi adalah proses-proses konglomerasi itu sendiri yang akhirnya disebut sebagai bentuk hibridisasi (Vickers, 2009: 133).

Tidak mudah untuk menyimpulkan sebuah definisi terkait hibridisasi yang dialami Jepara. Paling tidak, hibridisasi yang berkembang dan mulai mengaburkan dan bahkan menghilangkan unsur-unsur lokal menjadi karakter kuat yang berkembang di Jepara paling tidak sejak abad VIII. Untuk menghindari persoalan konseptual yang rumit sebagai konsekuensi dari pembauran berbagai unsur, maka dalam kajian-kajian sejarah sering disebut sebagai karakter budaya maritim atau pesisir (Vickers, 2009).

Budaya maritim atau pesisir yang terbentuk sebagai hasil percampuran antarbudaya merupakan proses kelanjutan dari terbentuknya kosmopolis. Kosmopolitanisme sebagai proses sosial ekonomi akibat terakumulasinya berbagai investasi ekonomi yang dibarengi dengan interkoneksitas berbagai ragam etnis, bahasa, bangsa, dan agama memberikan stimulus budaya yang kuat. Bagi Vickers, interkoneksitas antarbangsa, bahasa, suku, dan agama tersebut memberi dasar-dasar representasi dan penciptaaan sesuatu yang

baru, yaitu budaya pesisir. Sebuah budaya yang terbentuk secara terbuka dan cair dengan memberikan ruang-ruang khusus bagi masuknya berbagai unsur budaya baru (Vickers, 2009: 132).

Pada konteks ini, maka cara pandang Reid, bahwa komersialisasi yang dilanjutkan dengan kosmopolis dan berakhir hibridisasi, adalah proses kelanjutan yang lazim di Asia Tenggara. Hibridisasi, dengan demikian, menjadi konstruksi baru dari proses kosmopolis. Lebih lanjut dikatakan Vickers, hibridisasi tidak sekadar bagaimana cairnya budaya pesisir dengan masuknya berbagai unsur budaya luar, tetapi lebih jauh telah membentuk dan mentransmisikan berbagai unsur ke dalam berbagai ruang lokalitas. Pertemuan dan pola negosiasi dalam memahami dan memasukkan antarunsur budaya dari suatu sistem budaya satu ke lainnya, tidak selalu muncul dalam batas-batas rasionalitas yang wajar. *Fin de Siecle*, kita menemukan diri sendiri, menjadi relevan ketika persilangan dan saling memengaruhi itu telah melampaui batas-batas lokal. Mitos kemudian menjadi strategi bagaimana unsur-unsur lokal itu melampaui unsur-unsur asing (Vickers, 2009). Mitos-mitos itu kemudian menjadi penguat pada tataran lokal untuk menyamai unsur-unsur asing agar ada keseimbangan kultural. Di sini, sistem simbolik sering menjadi penanda dan petanda dalam penguatan lokalitas melalui seni, arsitektur, maupun tradisi-tradisi yang terpelihara.

Proses transmisi itu kemudian mereproduksi sistem budaya yang menempati "keseimbangan ruang" yang diciptakan dalam rentang waktu dan proses yang lama. Itulah sebabnya, proses mencairnya budaya pesisir terjadi lebih kuat disebabkan adanya "keseimbangan ruang" yang menampung berbagai unsur, baik lokalitas maupun asing. Hindu, kemudian menjadi bagian dari proses lokalitas tanpa adanya perlawanan yang berarti, Islam lebih kuat, karena memberikan janji-janji kesetaraan, keseimbangan dalam konteks antarunsur budaya, sehingga sangat mudah diterima. Begitu juga ketika bangsa Eropa, Arab, India mulai memasuki wilayah "asing" yang bernama Jepara, pengaruh kuat budaya yang cair, budaya pesisir, memberikan keleluasaan adanya persilangan budaya yang bebas (Lombard (2), 1996). Kompleksitas, kekontrasan budaya, kesadaran kelompok (*in group*) dan luar kelompok (*out group*), sampai persoalan inklusi dan eksklusi bukan lagi menjadi persoalan dalam konteks budaya pesisir (Vickers, 2009: 133).

Konstruksi hibridisasi dengan demikian menjadi alasan yang mendasar bahwa konflik yang selama ini menjadi cara memperhatikan ketika terjadi pertemuan dua atau lebih identitas budaya yang berbeda, menjadi gagal memahami Jepara. Perbedaan identitas yang terbangun sebagai hasil proses kosmopolis dalam waktu yang lama, justru menjadikan Jepara sebagai wilayah inklusif. Di sini, hibridisasi yang kemudian dalam proses sejarah

Jepara muncul di berbagai unsur seni, arsitektur, agama, sebagai kasus yang menonjol, menafikan unsur-unsur ras, gender, geopolitik, dan geoekonomi. Secara teoritik, bentuk budaya cair sebagaimana yang terjadi di Jepara itu, lebih merupakan bentuk-bentuk narasi inklusi yang menciptakan artikulasi perbedaan budaya secara umum dalam satu ragam. Namun demikian, inklusivitas yang menampung keragaman budaya itu, juga memberikan ruang baru, "*in-between*", yang memiliki kemampuan mengelaborasi bentuk-bentuk budaya baik tunggal (*singular*) atau jamak (*communal*). Keduanya memberi tanda baru tentang identitas baru, bentuk-bentuk kolaborasi dan kontestasi yang semuanya itu menjadi identitas secara keseluruhan suatu komunitas (Bhabha, 1994: 2).

Pada tataran ini, ruang "*in-between*" dalam bentuk baru sangat dimungkinkan adanya ketersinggungan, persilangan, saling melengkapi, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya tumpang tindih. Rasionalitas yang dibangun terletak pada apa yang dikatakan Reid sebagai budaya kosmopolis (Reid, 2015). Sebuah budaya inklusif yang meletakkan antarsubjek, individual maupun komunal, mengalami proses yang sama, seimbang dan kesamaan pengalaman di luar batas-batas geografis yang bernama "bangsa" (*nationness*) (Bhabha, 1994). Kepentingan dan nilai-nilai lokalitas kemudian dinegosiasikan untuk masuk dalam ruang liminal yang bernama ruang "*in-between*". Persoalan representasi sebagai cara hadir dalam ruang liminal itu kemudian menjadi formula yang dapat bersanding antara dua atau lebih unsur-unsur budaya. Unsur-unsur Hindu-Jawa, atau Hindu-Islam, Islam-Jawa, Eropa-Jawa, dalam kasus Jepara memberikan pola dialogis yang penting bagaimana antagonisme dan konfliktual yang selama ini menjadi mendominasi perubahan nilai, tidak dapat dibuktikan secara jelas di Jepara. Penciptaan makna dalam konteks budaya yang cair dan dialogis ini yang kemudian memudahkan terciptanya hibridisasi.

Pada tataran diskusi yang lebih luas, sering meminjam istilah resepsi (*reception*) dan adaptasi (*adaptation*). Kedua istilah itu menjadi cara untuk menjelaskan bagaimana kesadaran kolektif dari kedua pihak, petanda (*signified*) dan penanda (*signifier*), menyatu dalam berbagai ornamen dan simbol-simbol yang diakui sebagai kebaruan dalam budaya lokal (Soekiman dan Purwanto, 2018). Resepsi dan adaptasi sebagai proses inklusi dari masing-masing unsur budaya tersebut mengandaikan adanya ruang "*in-between*" yang menjadi ruang kreatif untuk menyatukan berbagai unsur.

Inklusivitas budaya hibrida yang paling menonjol terletak pada situs-situs dan artefak yang muncul di Jepara yang dapat diidentifikasi. India (Hindu), Cina (Buddha), Arab (Islam), Eropa (Kristen) merupakan unsur pokok yang menciptakan hibridisasi di Jepara. Cina memiliki pengaruh yang kuat pada masa awal terbentuknya budaya hibrida Jepara (Ptak, 1993).

Hampir seluruh jaringan cengkih di Intra-Asia maupun Eropa-Asia pada awalnya, peran Cina sangat dominan. Jaringan Maluku, Zulu, Ambon, Laut Jawa, dan Malaka, menjadi wilayah yang menjadi daya tarik pedagang-pedagang Cina. Menurut Ptak, Jaringan Cina ini paling tidak menguasai pasar cengkih sampai pada tahun 1400-an sebelum Eropa mulai memasuki dan menguasai jalaur perdagangan (Ptak, 1993).

Inklusivitas yang kemudian berkembang menjadi budaya hibrida mencerminkan adanya proses-proses sejarah yang dinamis di Jepara. Masuknya simbol India, Cina, Arab, dan Eropa sebagai komunitas dominan memiliki kekuatan tersendiri dalam memengaruhi hibridisasi budaya Jepara. Mereka adalah bagian penting yang membangun budaya Jepara yang kemudian pada masa kolonial Belanda menjadi titik awal munculnya modernisasi dengan berbagai bidang. Hibridisasi ini berkembang sebagai konsekuensi dari semakin melebarnya kepentingan, selain ekonomi, ada kepentingan tempat tinggal, tempat ibadah, ruang kota, sampai pada simbol-simbol kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan ruang multirasial, berseni, ruang untuk mengekspresikan karakter masing-masing unsur budaya, sampai persoalan ekspresi teologis menjadi media persilangan budaya (Soekiman dan Purwanto, 2018).

Lekatnya unsur-unsur dalam setiap periode sejarah Jepara kemudian mencirikan hibridisasi pada setiap periode. Bahkan, hibridisasi di Jepara dimulai sejak pertemuan dengan pedagang-pedagang Cina, Eropa, Arab, bahkan India. Walaupun dalam mengidentifikasi ciri-ciri yang kuat masih sangat sulit. Identifikasi yang paling mudah adalah teori-teori perkawinan dan pendirian pemukiman yang dinilai sebagai awal hibridisasi dimulai (Soekiman dan Purwanto, 2018). Berbagai bukti lahirnya pemukiman "*pecinan*" dengan pola arsitektural yang tidak hanya khas Cina, tetapi sudah mulai ada modifikasi (Handinoto dan Hartono, 2007).

Masjid Kuno Jepara, yang diperkirakan dibangun abad XV—XVI merupakan bangunan bersusun lima, masing-masing lantai beratap berbentuk segi empat secara simetris penuh, denah halamannya dikelilingi oleh kolam sebagai fasilitas untuk bersuci (wudu) (Handinoto dan Hartono, 2007). Pola bangunan yang kemudian para pengamat mengatakan bangunan tersebut kemungkinan adalah pagoda karena sesuai judul lukisan, maka menjadi tampak sekali bagaimana proses hibridisasi di dalam seni arsitektural dapat dijelaskan.

Tidak hanya masjid kuno Jepara, bangunan-bangunan rumah Cina dan rumah orang Jawa kaya, perabot keramik yang digunakan hampir sama. Dari perabotan kuliner, hiasan ruang, tata ruang interior, tempat tidur dengan tikar sampai duduk bersila dalam pola makan, sangat dimungkinkan sebagai pola hibrida. Bagi keluarga Cina, arsitektur rumah dengan hiasan ukiran kayu dan

bercat merah merupakan perpaduan unsur-unsur lokal dengan pola umum bangunan Jawa, limasan, tetapi ukiran, cat, dan perabot rumah merupakan barang-barang yang memiliki ciri khas Cina (Lombard (2), 1996: 316—317).

Keahlian pertukangan kayu Cina ini sangat terkenal, bahkan hampir di seluruh kota-kota pesisir Nusantara, memiliki pola yang mirip dalam hubungan antara gaya Cina dan daerah tempatan. Kasus di Jepara, kerajinan dan pertukangan dengan bahan kayu sudah terkenal sejak seorang Cina Muslim yang hidup pada masa Sunan Kudus pada abad XV, The Ling Sing, patut diduga kuat sebagai perintis keahlian pertukangan di pesisir. Perabotan rumah tangga sebagaimana *dingklik* (kursi kecil) berkaki melengkung keluar, kursi telekan, tempat tidur dengan masing-masing pojok ada tiang dan diberi kelambu (Lombard (2), 1996: 317). Di samping dengan warna merah dan keemasan yang menjadi ciri tradisi Cina. Namun, ketika berada di rumah orang Jawa, sering warna merah dan keemasan diganti dengan plitur, cokelat kayu.

Perubahan besar terjadi pada abad XVI, ketika tradisi-tradisi yang berbau bukan Islam dan/atau karena ada anggapan dilarang dalam Islam, maka bangunan-bangunan Masjid yang terbuat dari kayu dan hiasan yang menyolok dengan pola binatang hidup mulai diganti (Lombard (2), 1996: 190). Bangunan masjid yang muncul pada abad XV di Jepara memang dibuat biasa, tanpa ada karakter Islam yang menyolok dan bahan yang kuat. Oleh karena itu, banyak bangunan masjid, secara umum di Pantai Utara Jawa, tidak berumur panjang dan mengalami perubahan.

Gambar 9. Ilustrasi Masjid Jepara yang didirikan pada masa Ratu Kalinyamat dengan lukisan "ulang" oleh orang Belanda (abad XVII) yang memiliki kemiripan lukisan yang dibuat oleh seorang pelukis atas perintah Wouter Schouten tahun 1660. Sumber: Handinoto dan Hartono, ed., "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Mesjid Kuno di Jawa Abad 15—16", *Dimensi Teknik Arsitektur*, vol. 35, no.1, 2007

Perkembangan seni arsitektural Cina ini kemudian merambah ke berbagai karya seni. Ada dorongan kuat bagaimana relasi Cina dan Jawa ini memadu dalam karya seni. Setelah mengalami persoalan politik dan munculnya berbagai kemunduran ekonomi, pertukangan Cina ini kemudian berkembang dalam seni ukir kayu. Begitu juga dalam berbagai media batu padas, bangunan rumah, beduk masjid, selain bangunan-bangunan yang berada di tempat pemakaman.

Kuatnya unsur Cina dalam seni pertukangan ini kemudian menjadi berkembang dalam seni ukir Jepara. Memang sangat sulit membuktikan transmisi ukir dari pertukangan Cina ini ke masyarakat Jepara. The Ling Sing menjadi sumber satu-satunya yang memiliki kemampuan kerajinan kayu dan kemudian disusul Tjie Wie Gwan yang menurut tradisi lisan sebagai ahli ukir batu (Sungging Badar Duwung) yang hidup di zaman Ratu Kalinyamat (Handinoto dan Hartono, 2007). Penerimaan etnis Cina dalam lokalitas yang paling dalam, religiusitas (Islam) bukan hal yang mudah dan tidak sengaja. Hubungan baik dan berlanjut dengan hubungan yang bersifat teknis-organik (hubungan ekonomi) sampai hubungan yang cair (nationness) tentu saja menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hibridisasi dapat terjadi di Jepara.

Tidak hanya Cina, India yang dikaitkan dengan Hindu menjadi bukti bagaimana cairnya tradisi pesisir, khususnya Jepara. Beberapa candi Hindu ditemukan di Jepara, di antaranya Candi Bubrah di dukuh Duplak, Kecamatan Tempur, Candi Mantingan, Candi Mantingan ini baru ditemukan petilasan yang berada di komplek Makam Hadiri Mantingan (Kuhajirin, 2018), Candi Angin di Kecamatan Keling. Komplek Makam Mantingan pun sampai saat, masih dipenuhi oranmen Hindu yang berupa pintu gerbang bentar utama dan kedua yang diberi pintu bertuliskan kalimat "Syahadath". Pola yang sama untuk beberapa masjid di pantai Utara Jawa sebagaimana Masjid Menara Kudus, dan Cirebon.

Jika memperhatikan situs Hindu, baik yang berupa candi maupun ornamen yang menggunakan seni dan karakter Hindu memberikan bukti adanya proses hubungan sosial-budaya yang lancar. Hubungan ekonomi yang kemudian berlanjut hubungan sosial-budaya menjadi persoalan adaptasi yang tidak hanya dapat dilihat dalam perspektif Hindu-Jawa atau Hindu-Islam. Ada unsur-unsur yang oleh Bhabha disebut sebagai ruang liminal atau "*culture in-between*" menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana otoritas agama, Islam dan Hindu, menjadi sangat cair (Bhabha, 1994). Unsur-unsur liminal itu yang kemudian menjadi area pertemuan berbagai kepentingan yang akomodatif dan adaptif. Pada kasus Hindu-Islam, Cina-Islam dalam konteks sosial-budaya tentu tidak dapat disamakan dengan persoalan keagamaan. Ruang liminal ini dalam kajian sejarah kebudayaan atau

sejarah mentalitas menjadi berpotensi bagaimana proses adaptasi, rerepsi, aksesibilitas menjadi sangat mungkin, karena di dalamnya merupakan ruang kosong (Bhabha, 1994).

Struktur sosial-budaya liminal tampaknya di wilayah pesisir lebih luas daripada pedalaman (Vickers, 2009; Houben, 1994). Unsur-unsur lokal (Jawa) tidak banyak memberikan dukungan budaya dalam batas-batas kerumitan budaya pesisir. Budaya egaliter dan kosmopolit dapat menjadi cara menjelaskan mengapa Jawa dan "kejawaan" tidak berkembang dalam ruang-ruang liminal di Pantai Utara Jawa umumnya dan Jepara khususnya. Simpulan Woodward yang menelusuri relasi-relasi kesalehan normatif keagamaan, Islam dan Kejawen, tampaknya perlu dikaji ulang khususnya untuk daerah Pantai Utara Jawa dan khsusunya Jepara (Woodward, 1999). Walaupun dalam konteks "budaya santri" yang diperkirakan mulai muncul pasca Kalinyamat dan tumbuh berkembang abad XIX ini merupakan model yang sama dengan model pendidikan pada lembaga Muslim Mappila yang kuat bertradisi Arab Selatan dan Kerala bertradisi India Selatan. Pendidikan Mappila dan Kerala ini merupakan model pendidikan di mana sistem pengajaran yang menempatkan guru dan murid berada dalam suatu tempat. Komunikasi dan kehidupan bersama antara guru-murid dapat berlangsung secara terus menerus karena mereka berada dalam satu kompleks yang sama dengan pola dan tradisi yang mirip dengan tradisi Mekah sampai Asia Selatan, yaitu lembaga pendidikan yang berpusat pada ulama (Woodward, 1999: 86—87). Kerala yang merupakan daerah yang berada di India Selatan ini juga merupakan penghasil rempah. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan dalam proses kosmopolis rempah antara India dengan Jawa, khususnya, dialektika antarbudaya terjadi, sehingga kemudian muncul pola yang memiliki kemiripan.

Dengan tokoh yang sentral bernama *Thangal* memiliki kemiripan dengan kiai di Jawa, Lembaga pendidikan Mappila dan Kerala memang kemudian masuk dalam pola sebagaimana pesantren di Jawa. Namun, hal itu tidak berarti bahwa Jawa sebagai entitas budaya yang menjadi budaya tempatan dapat dengan mudah masuk dalam proses santrinisasi dalam dunia pesantren di Jawa. Pesantren di Jepara pada akhir abad XIX, tidak mempresentasikan Jawa dan "Kejawaan". Pesantren dalam proses pengajarannya tetap menggunakan sumber kitab-kitab klasik dengan bahasan utama persoalan *fikh* (hukum), *tafsir* (hermeneutik), *nahw* (gramatika bahasa) dan *tasawuf* (tarekat) (Thohir, 2006) Walaupun tradisi kejawen tidak dapat dipungkiri juga menjadi bagian tradisi Jepara (Muhajirin, 2018, Lombard (2), 1996: 34—35). Jepara sebagai kota pelabuhan, tidak lepas dari mitos-mitos lokal yang menghubungkan dengan tokoh-tokoh wayang sebagai asal usul desanya. Di Jepara, mitos munculnya

desa sering dikaitkan dengan tokoh Ajisaka yang dirunut ke Brawijaya kemudian berlanjut ke Nabi Muhammad (Thohir, 2006). Namun, untuk daerah tertentu seperti Bangsri, menyebut nenek moyangnya, yang dianggap sebagai *danyang*, adalah Srikandi. Di dalam praktik budaya *intangible*, *danyang* Srikandi ini sering dihubungkan dengan tokoh lain seperti Harjuna, Subadra dan Semar (Thohir, 2006: 48).

Di sini menjadi penting, ketika Jepara yang pada tahun 1860-an, didominasi komunitas Islam ternyata memiliki relasi pemikiran kebudayaan, tradisi, dengan merunut tokoh-tokoh pewayangan yang bersumber dari teks Mahabharata yang Hindu. Dasar sosial budaya yang terbuka dan terbentuk sebagai komunitas hibrid sejak awal, menjadikan Jepara berkembang dalam pola budaya yang berbeda dengan pedalaman (Woodward, 1999). Hal yang berbeda saat abad XIX, di mana wilayah "*frontier*" Semarang sebagai wilayah yang sudah terpengaruh Eropa, telah hadir Mas Rahmat yang menghadirkan dirinya sebagai "wali" penghubung antara dunia santri dan priyayi (Woodward, 1999: 165).

Secara geografis, antara Pantai Utara Jawa, pesisir dan pedalaman memang hampir tidak memiliki batas yang jelas. Para pengamat sering membedakan dalam hal tradisi dan perilaku sosial yang sangat kontras. Pesisir sebagai wilayah pantai digambarkan lebih Islamis, sementara pedalaman lebih "abangan" dekat dengan tradisi Hindu (Ricklefs, 2006). Pada kasus Jepara, keduanya hadir paling tidak sejak abad VII sampai XVI. Konstruksi Cina, Hindu, dan Islam sangat kuat baik dalam bentuk artefak, arsitektur, dan kepercayaan. Terutama pada abad X—XIV, pengaruh Cina terutama terkait kebutuhan rempah-rempah dari kota-kota pelabuhan Pantai Utara Jawa meningkat (Ptak, 1993).

Setelah Perang Jawa, tahun 1830, pemerintah memperkenalkan sistem Tanam Paksa yang secara resmi berlaku sejak 1830 (Houben, 1994). Banyak komoditas komersial diusahakan di wilayah *gubernemen*. Wilayah pesisir tidak ketinggalan, khususnya tanaman tebu yang dapat hidup dan subur di daerah beriklim panas seperti di Jepara. Selama Tanam Paksa, tidak banyak yang dilaporkan dari Jepara. Bahkan, dalam kegiatan perdagangan selama kebijakan Tanam Paksa ini digulirkan, tidak ada pengaruh yang kuat dalam perekonomian di Jepara (Alamsyah, 2015). Komoditas utama selain beras, justru produk-produk kerajinan, kebutuhan rumah tangga dan kain yang menjadi persoalan bagi para pembatik di Jepara.

Sampai tahun 1890-an, perdagangan komoditas nonpertanian masih menjadi komoditas unggulan selain beras. Pelaku pasar yang paling dominan adalah Cina. Pengaruh Cina yang kuat ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Cina di Jepara dibanding dengan penduduk Arab dan Timur Asing lainnya. Pada tahun 1861, penduduk Jepara

mulai berkurang sebagai dampak dari Perang Jawa, walaupun keberadaan orang asing, Cina, Eropa dan Timur Asing yang lain masih cukup banyak di Jepara. Data di bawah menunjukkan jumlah penduduk Jepara yang mulai beraktivitas setelah merespons program Tanam Paksa yang mulai terasa dampaknya di Jepara.

Tabel 4. Daftar Penduduk Jepara pada 1861

No	Distrik	Penduduk				
		Cina	Arab	Timur Asing Lainnya	Bumiputra	
					Rumah tangga	Tenaga kerja
1	Jepara	505	76	353	8.683	8.683
2	Mayong	1.751	-	4	11.632	9.217
3	Banjaran	17	-	-	3.419	3.419

Sumber : *Statistiek der Residentie Japara*, 1861, KITLV

Komposisi penduduk Cina, Arab, dan Timur Asing yang tidak merata menunjukkan bahwa ada pemusatan aktivitas ekonomi untuk wilayah tertentu. Distrik Mayong tampaknya yang merupakan salah satu distrik yang banyak orang Cina. Tentu hal ini terkait dengan letak wilayah ini yang berada di lereng Gunung Muria bagian selatan yang merupakan wilayah subur untuk perkebunan tebu dan padi. Tingginya jumlah tenaga kerja terutama di Mayong dan Jepara sangat mungkin terkait industri gula dan kopi yang banyak membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menjadi sangat wajar, ketika Cina banyak yang menetap di Mayong.

Pola pergerakan tenaga kerja memang tidak mudah untuk dipetakan, tetapi pada masa Tanam Paksa ini paling tidak ada pola tenaga kerja yang berubah. Di samping tenaga kerja banyak yang masuk di sistem perkebunan tebu yang banyak yang dikelola Cina, juga banyak tenaga kerja dari Jepara yang keluar dari Jepara, karena adanya permintaan tenaga kerja di desa-desa tebu di Pekalongan, Tegal, dan Brebes. Untuk daerah Tegal, misalnya perkiraan permintaan jumlah tenaga kerja rata-rata dibutuhkan 150—250 tenaga kerja setiap hari (van Schaik, 1986: 97). Mobilitas tenaga kerja yang tinggi, didukung dengan persoalan ekonomi di Jepara yang tidak stabil, maka penduduk Jepara sebenarnya merupakan penduduk yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi.

Pada masa Tanam Paksa ini, konsentrasi ekonomi Jepara lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan komoditas ekspor yang dalam praktiknya banyak membutuhkan tenaga kerja. Alasan kebutuhan akan tenaga kerja, baik di

wilayah tebu dalam Kabupaten Jepara maupun Tegal misalnya, menjadi satu alasan bagaimana penduduk Jepara tidak lagi dapat mengandalkan sumber ekonomi lokal. Apalagi pada tahun 1884—1891 Jepara juga mengalami el-Nino kekeringan yang hebat (Tetteroo, 2014: 37). Pada awal abad XX, kegagalan panen pertanian, khususnya padi menyebabkan Jepara mengalami krisis padi dan akhirnya didatangkan dari Semarang oleh pedagang Cina.

Sejak akhir abad XIX, mulai ada perubahan penting dalam struktur sosial-ekonomi Jepara. Gagalnya mengharapkan hasil pertanian sebagai sumber ekonomi utama, menyebabkan adanya perubahan orientasi ekonomi. Perlahan, aktivitas ekonomi pertanian mulai bergeser ke ekonomi nonpertanian (Gustami, 2000: 131). Berbagai komoditas kerajinan dan seni, terutama seni ukir mulai berkembang. Berkembangnya industri kerajinan dan seni ini di samping merupakan kelanjutan dari munculnya sejak abad XVI dengan banyaknya pengaruh pertukangan Cina, juga karena didorong adanya pasar yang dibuka, terutama pasar Eropa yang tertarik dengan hasil kerajinan Jepara. Perubahan gaya dan *stilisasi* seni yang berupa ukir, misalnya sudah banyak pengaruh dari Cina, India, dan Eropa (Gustami, 2000: 131). Sementara pada karya seni lukis, lebih banyak diterapkan pada seni batik yang pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Motif batik mengalami perubahan dengan memperhatikan permintaan pasar. Sebelumnya lebih didominasi unsur-unsur budaya dan religiositas, di mana pengaruh kuat Islam dan Hindu pada seni ukir, kini mulai berubah dengan keragaman unsur dan motif (Gustami, 2000: 143).

Awal abad XIX, setelah Tanam Paksa berjalan dua puluh tahun lebih, maka potensi ekonomi di luar pertanian mulai dijadikan komoditas utama di Jepara. Seni kriya, ukir, kemudian seni arsitektur serta beberapa seni pertunjukan dan lukis, mulai tumbuh dengan dorongan kuat dari gerakan kebudayaan yang disuarakan Kartini. Muncul pusat-pusat industri ukir, seperti Sukodono, menjadi pusat industri ukir. Berbagai motif hibrida muncul seperti gaya Eropa; Ionia, Doria, Korinthia, Renaissans, Barok, Rokoko, Gothik, Georgian, Klasik, dan lainnya. Di samping itu, juga kombinasi dengan *stilisasi* Arab, India, dan Mesir.

Sebelum pengaruh Eropa masuk dalam seni ukir, motif ukir didominasi perpaduan tradisi lokal (Jawa), Islam, dan Cina (Nangoy dan Sofiana, 2013). Pengaruh asing termasuk Eropa, Cina, Arab, dan tradisi lokal (Hindu) sangat jelas di dalam motif ukir yang ditemukan ada masa kolonial. Perubahan motif pada seni ukir yang melibatkan berbagai unsur asing menjadi cara menjelaskan bagaimana hibridisasi Jepara sudah memasuki apa yang oleh Bhabha disebut ruang liminal. Berbagai motif dengan tetap mendasarkan pada aspek religiositas, kultural yang terbuka sebagai komunitas pesisir, serta penyesuaian motif-motif baru. Aspek Islam kuat pada seni ukir dengan

karakter simetris, geometris (terukur), dan garis yang tegas menjadi unsur paling dominan. Namun, berbeda dengan model ukir Hindu, di mana bentuk permulaan tidak simetris, lebih mengarah ke naturalis serta komposisinya tidak geometris (Muhajirin, 2018).

Kedua *stilisasi* ukir tersebut dipadukan dalam motif Jepara dengan mengambil ketegasan prisma dengan pola lingkaran yang pecah memancar dengan bentuk daun yang dihubungkan dengan lingkaran-lingkaran yang tersusun hierarkis. Sedangkan, dasar ukiran biasanya berbentuk dasar yang tidak tembus, tetapi juga ada yang tembus. Pola ukiran khas Jepara ini pada awalnya dilakukan di batu padas, logam, dan kayu. Pola yang dibuat pada awalnya memiliki nilai spiritual, magis, terkait mitologi-mitologi lokal serta kepercayaan tertentu. Namun, pada masa berikutnya, motif ukir tersebut berubah menjadi hiasan yang kemudian mengakibatkan pola-pola dan motif tersebut dapat berubah sesuai permintaan pasar.

Ukir menjadi salah satu pintu masuk berbagai unsur yang dalam perkembangannya menjadi sulit untuk mengidentifikasi motif asli. Artinya, pola dan motif ukir sebagaimana pola dan bentuk arsitektural gaya Indis, mengalami proses yang tidak mudah untuk sampai pada hasil atau motif yang sesuai pasar. Hibridisasi pada tingkat paling dasar dengan mengambil pengaruh Islam, Hindu, bahkan Eropa dalam seni sangat memungkinkan menemukan penjelasan bahwa hibridisasi sebagai proses dapat masuk dalam konteks apapun, termasuk seni.

B. Proses Dialektika dan Hibridisasi Budaya

Pada periode 1865—1900-an, pertemuan para pedagang antarnegara dengan latar belakang keragaman etnisitas dan budaya semakin memperkuat unsur-unsur lokal sebagai budaya hibrida dengan berbagai aspek dan keragamannya, termasuk seni arsitektur, batik, sastra, seni pertunjukan, sampai persoalan agama yang tumbuh dengan berbagai ciri "tradisi dan budaya"-nya. Sebuah kawasan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kawasan "eksekutif" bagi penduduk Bumiputra Jawa yang pada abad XIX masih terikat dengan tradisi primordial priyayi yang ketat (Sutherland, 1983). Pada konteks yang lebih dalam, pola multikultur yang berbentuk hibrida tampaknya merupakan konsekuensi sejarah akibat proses panjang sejarah rempah di Jawa.

Tumbuhnya Jepara sebagai kota "metropolitan" dengan keragaman budaya dan etnisitas memperjelas adanya proses diaspora kolektif (persebaran dan pengaruh) dari berbagai komunitas yang singgah di Jepara (Reid, 1998; Tagliacozzo, 2005). Saling pengaruh memengaruhi di antara para pedagang dalam jaringan ekonomi dan perdagangan merupakan kewajaran sejarah yang berlaku di mana pun. Oleh karena itu, pertemuan dan

saling pengaruh memengaruhi tersebut semakin meluas tidak hanya unsur-unsur verbal (bahasa), kepercayaan (agama), maupun budaya dalam arti luas (Ricklefs, 2006). Masa Hindu, Islam, Kristen atau dalam konteks sosial dapat disebut masa Cina, India, Arab, dan Eropa merupakan elemen penting dalam merunut proses-proses hibridisasi yang kuat di Jepara.

Munculnya Jepara sebagai kota "kosmopolitan" dan didukung dengan tradisi dan budaya hibrida yang kuat, mendialektik unsur-unsur yang ada secara lambat, sehingga terbentuk berbagai artefak maupun gaya hidup yang menunjukkan percampuran secara adaptif dan bersifat reseptif. Masing-masing unsur saling memperkuat dan di sisi yang lain saling melengkapi (Gustami, 2000). Pola silang budaya yang kuat dan dikemas dalam proses ekonomi yang luas, mengakibatkan munculnya pola-pola dialektik. Unsur Hindu berkelindan dengan Islam, Cina dengan Jawa, Jawa dengan Eropa dan bahkan perpaduan itu dalam puncaknya mengaburkan unsur-unsur asli Jepara (Muhajirin, 2018; Gustami, 2000).

Pada akhir abad XVIII, Jepara mengalami persoalan terkait perpindahan fasilitas pelabuhan yang oleh VOC dipindah ke Semarang. Hal ini memberikan dampak yang signifikan tidak hanya perubahan jalur transportasi jaringan perdagangan, sejak dominasi rempah sampai barang-barang seni, *handicraft*, tetapi juga perubahan sosial budaya. Dampak yang paling kuat bagi Jepara adalah pembalikan proses pembudayaan dari tradisi maritim dan kosmopolis menjadi tradisi pinggiran dan agraris karena Jepara hanya bagian dari Semarang yang dibangun sebagai kota baru (*Nuova Semarang*) (Tillema, 1913). Munculnya Semarang sebagai *Nuova Semarang* mengalihkan Jepara sebagai pusat diaspora dunia menjadi daerah pinggiran yang hanya sebagai daerah pendukung Kota Semarang dan tempat pembuangan para perompak dan budak (Eysinga, 1842).

Hilangnya fasilitas utama pelabuhan yang pernah menjadi simbol dan karakter kosmopolis Jepara dan tumbuh sebagai pelabuhan terpenting di Pantai Utara Jawa, mengakibatkan perekonomian semakin surut. Walaupun luas lahan untuk *tegalan* dan persawahan pada tahun 1860-an masih luas, namun produktivitas tidak semakin tumbuh. Perpindahan pelabuhan ke Semarang, memberikan dampak hilangnya pasar berbagai komoditas lokal, seperti kopi, indigo, dan beras. Gula masih bertahan karena para pengusaha gula terutama dari kalangan Cina, sejak awal tidak banyak yang bermukim di Jepara. Mereka berada di Pati dan Semarang, karena para pengusaha gula dari kalangan Cina ini lebih banyak mengusahakan lahan-lahan sewa yang tidak hanya di Jepara, tetapi juga Pati (Husken, 1994, 1998; Burger, 2008). Sampai tahun 1860-an, walaupun luasan dan produktivitas gula mulai berkurang, lahan-lahan sawah dan *tegalan* masih bertahan. Namun demikian, persoalannya bukan luasnya lahan yang sangat penting di sini,

melainkan produktivitas dan pasar yang hanya berbentuk pasar lokal. Data berikut menunjukkan luas sawah, beririgasi dan tidak beririgasi, serta *tegalan* pada 1861 (*bau*);

Tabel 5. Luas sawah, beririgasi dan tidak beririgasi, serta *tegalan* pada 1861

Afdeling	Kabupaten	Distrik	Sawah			*Tegalan*
			Beririgasi	Tanpa irigasi	Total	
Jepara	Jepara	Jepara	6.987	262	7.249	6.532
		Mayong	6.112	228	6.340	7.453
		Banjaran	2.240	348	2.588	3.120

Sumber: *Statistiek der Residentie Japara*, 1861, KITLV

Data luas lahan di atas menunjukkan bahwa untuk daerah Jepara dan Mayong, merupakan daerah memiliki lahan yang masih luas. Perbandingan antara lahan sawah, baik beririgasi maupun tidak dengan luasan *tegalan* hampir sama. Belum banyak informasi sistem sewa tanah di Jepara dan keterlibatan Cina dan Eropa dalam sewa-menyewa lahan sejak perpindahan pelabuhan. Pengolahan lahan sawah dan *tegalan* diperkirakan diusahakan oleh petani lokal dengan posisi Cina sebagai perantara (Alamsyah, 2015). Pola strategi perdagangan tidak melibatkan Cina langsung dan mereka lebih memilih menjadi perantara sebenarnya dapat dilihat kasus tebu dan candu sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun demikian, peran perantara dalam ekonomi agraris sangat penting, terutama di Jepara. Untuk daerah yang tidak banyak melibatkan pengusaha Cina sebagaimana Banjaran, maka perkembangan sosial ekonomi khususnya yang berbasis pertanian mengalami keterlambatan.

Namun, pada akhir abad XIX, ketika mulai terjadi kemunduran bidang pertanian, beberapa desa mulai menekuni bidang seni kerajinan. Desa Mulyoharjo, Desa Senenan, Desa Blimbingrejo, dan Desa Bulungan merupakan perdesaan yang diperkirakan tumbuh sebagai desa pengukir sejak awal abad XX (Muhajirin, 2018). Untuk Desa Mayong Kidul, bentuk motif ukiran tidak diterapkan pada kayu, tetapi pada genteng rumah. Beberapa informasi, memberi penjelasan bahwa tumbuhnya "ekonomi kreatif" berbasis ekonomi nonpertanian berkembang sejak masa Kartini pada awal abad XX.

Munculnya "ekonomi kreatif" pesisir yang sangat kuat di Jepara pada akhir abad XIX dan berkembang pada awal abad XX, paling tidak sebelum krisis telah menempatkan Jepara sebagai satu-satunya wilayah Pantai Utara Jawa yang masih bertahan tanpa dukungan basis ekonomi pertanian. Memang

pada masa krisis 1930, industri seni kerajinan juga mengalami kelesuan karena jaringan pasar terganggu, tetapi pada tingkat lokal, kemampuan ekonomi di luar pertanian cukup signifikan. Hampir semua pengrajin seni ukir di Jepara merupakan komunitas petani yang melakukan pekerjaan sampingan (Boomgard, 1991). Pada masa kerajaan, Jepara menjadi wilayah penting untuk tanaman padi, tidak dikembangkan sebagai sumber ekonomi di luar padi, termasuk industri. Namun, di sisi lain memang sudah memiliki basis pertukangan yang dianggap terkait keahlian pertukangan Cina.

Hal lain yang penting adalah keahlian dalam bidang tekstil, pembuatan kapal, kerajinan tenun, batik, industri logam, dan berbagai industri kerajinan anyaman untuk keperluan sehari-hari (Boomgard, 1991). Pada masa kolonial, pengrajin ini banyak yang terserap ke sektor pertanian sebagai buruh atau kuli. Hanya beberapa wilayah yang tidak memiliki jumlah tenaga yang cukup dan lahan garapan yang tidak memadai, maka industri besar maupun kecil berkembang. Rembang pada menjelang abad XIX, masih kuat bertahan sebagai wilayah industri kapal. Industri kapal Rembang ini didukung dengan hasil hutan jati yang menjadi bahan dasar kapal.

Pada masa itu Jepara mengalami situasi ekonomi yang mengarah pada diversifikasi ekonomi. Di samping pertanian dan perkebunan yang masih berjalan dalam sekala terbatas, terutama padi, kopi, dan tebu, Jepara juga mengalami pergeseran yang mengarah ke sektor di luar pertanian. Diversifikasi ekonomi merupakan gejala umum yang dialami beberapa wilayah di Pantai Utara Jawa sebagai respons mulai ditinggalkannya ekonomi pertanian, baik pada masa Tanam Paksa sampai masa liberal yang merupakan masa pengerahan tenaga kerja ke sector pertanian komersial Belanda (Akhyat, 2020; Elson, 1994). Akibatnya banyak lahan *eigendom*, lahan milik keluarga, yang ditinggalkan oleh penggarapnya. Bab sebelumnya dijelaskan munculnya banyak "*oro-oro*" yang merupakan lahan kosong yang tidak lagi digarap sebagai lahan pertanian.

Sampai tahun 1905, gejala diversifikasi ini hampir dialami di desa-desa pertanian Jawa, kecuali di wilayah *Vorstenlanden* (kerajaan). Daftar munculnya sektor di luar pertanian dengan pelibatan tenaga kerja secara umum di Jawa dan Madura pada tahun 1905 dapat dilihat dalam tabel berikut (dalam ribuan);

Tabel 6. Daftar pelibatan tenaga kerja secara umum di Jawa dan Madura tahun 1905

Sektor	Tenaga kerja (Laki-Laki)	Tenaga kerja (perempuan)	Total
A. Pertanian:			
1. Pemilik	3.265	317	3.583
2. Buruh	1.371	1.017	2.388
B. Industri, Perdagangan, Jasa Transportasi:			
1. Pemilik	538	831	1.369
2. Buruh	300	458	758
C. Tenaga Kerja tak terdaftar	1.144	3.780	4.924
D. Total buruh	6.618	6.403	13.021

Sumber : Benjamin White, "Economic Diversivication and Agrarian Change in Rural Java, 1900-1990" dalam P. Alexander, P. Boomgard, B. White, *et al.*, *In The Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in The Javanese Economy, Past and Present*, Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991

Jepara merupakan bagian dari persoalan Jawa terkait proses diversifikasi ekonomi pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Pergerakan ekonomi kemudian mulai memasuki wilayah di luar pertanian. Sayangnya, saat mulai tumbuh sebagai ekonomi alternatif dengan keragaman industri, Jepara diguncang dengan krisis, terutama ekonomi komersial. Pada sisi lain, industri pertukangan dan perundagian yang merupakan kelanjutan dari masa Kalingga, Kalinyamat, dan kolonial masih bertahan, walaupun pada skala lokal.

Krisis ekonomi yang serius juga terjadi akibat dari persoalan ancaman dari serbuan binatang liar di perkebunan tebu. Serbuan harimau dari lereng Gunung Muria pada tahun 1887—1889 merupakan wabah harimau (*tiger plague*) di Jepara yang membuat perkebunan tebu mengalami persoalan serius (Boomgaard, 2001: 45). Pada 1894, ada 40 buruh tebu di Distrik Banyaran dilaporkan dibunuh harimau. Pada 1895, sebanyak 23 buruh tebu terbunuh oleh harimau (Boomgaard, 2001:48). Total dari tahun 1894—1895, ada sekitar 15 harimau yang hidup di hutan-hutan lereng Gunung Muria (Boomgaard, 2001: 68). Ancaman harimau ini sebenarnya juga tidak hanya pada tanaman tebu, tetapi juga kopi. Produktivitas gula dan kopi mulai turun drastis sampai tahun 1900-an yang salah satu sebabnya adalah serangan harimau. Begitu juga beras yang mengalami penuruan produktivitas akibat bencana. Untuk mengatasi krisis beras, maka Jepara mengimpor beras dari Semarang yang dilakukan oleh para pedagang Cina. Hal ini karena pada

awal abad XX, pelabuhan Jepara tidak lagi banyak diminati karena ancaman keamanan, terutama perompak dan mulai sepinya jalur perdagangn di Pelabuhan Jepara. Sebenarnya, munculnya perompak di Jepara ini sudah terjadi pada masa VOC dan berlanjut ke Hindia-Belanda. Karimunjawa merupakan saksi tempat pembuangan perompak-perompak yang tertangkap (Eysinga, 1842).

Pascakrisis, seni ukir mulai tumbuh kembali sebagai industri masal di Jepara. Kebangkitan seni ukir, kemudian dibersamai dengan seni batik, di mana keduanya menjadi satu kesatuan seni unik di Jepara dan sekaligus menjadi pembuka mata dunia akan seni unik di Jepara. Keduanya memang besar dan berkembang pada abad XIX dan awal abad XX, tetapi tidak mudah menjelaskan keduanya sebagai ciptaan seni yang tidak melibatkan unsur-unsur asing. Bahkan, beberapa studi sejarah klasik, menyebut seni-seni itu sudah muncul pada masa Hindu (Kalingga) (Kaur and Isa, 2020). Di samping seni ukir, batik, juga muncul berbagai seni pertunjukan, situs-situs arkeologis baik Hindu maupun Islam, peninggalan masa kolonial (*batig slot*) yang berbasis pada tradisi agraris, agama, dan budaya maritim tampak begitu kompleksnya proses hibridisasi ketika berdialek dengan berbagai unsur. Di samping itu, temuan-temuan budaya baru dalam bidang lukis, kriya, pertunjukan baik berbasis budaya lokal dan agama semakin berkembang. Menyatunya berbagai proses sejarah yang membentuk Jepara sebagai kesatuan budaya di atas tentu bukan proses yang kebetulan.

Berbagai aspek, baik seni, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan keagamaan sangat berpengaruh dalam proses terbentuknya budaya Jepara. Semua proses yang membentuk sejarah Jepara yang demikian menjadi memori kolektif yang menjadi kekuatan ketika Jepara bergerak menuju budaya yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai lokalitas, tetapi berkembang dan bersinergi dengan budaya global. Proses panjang dengan terbentuknya Jepara sebagai kota metropolitan yang berakar dari hubungan jalur rempah, memberi argumentasi kuat bahwa reaksi-reaksi lokalitas terhadap jalur rempah menjadikannya sebagai kota yang berproses dan mendinamiskan secara internal, sehingga membentuk pola baru, yaitu pola “hibrida”. Perubahan besar hibriditas yang mengarah pada terbentuknya sistem sosial-ekonomi dan budaya global pada skala lokal ini menjadi inti dari proses konglomerasi dan kontestasi khususnya Jepara dan wilayah Pantai Utara Jawa yang melibatkan tidak hanya orang Belanda, tetapi orang-orang Cina dan kelompok etnik selain Jawa (Eysinga, 1842; Post, 2002).

Konglomerasi menjadi salah satu pintu bagaimana Jepara dibangun dari berbagai kekuatan agen “sosial-budaya” dan “politik-ekonomi” yang kuat. Keragaman, kompleksitas luasan dan relasi etnisitas dengan segala persoalannya menjadikan Jepara muncul sebagai daerah yang

berkonglomerasi dengan basis jaringan internasional di Pantai Utara Jawa (Nagtegaal, 1996; Furnivall, 1944). Di satu pihak, pada saat yang sama, Jepara harus berkompetisi dengan wilayah lain, terutama masa pasca Tanam Paksa, 1880-an, ketika pemerintah kolonial lebih fokus pada kota-kota besar yang dipersiapkan sebagai "arena" kontestasi modernisai awal abad XX (Colombijn, 2010).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada periode 1900-an awal, Jepara mengalami kemunduran yang hebat dalam bidang ekonomi (Hall, 2010). Namun, Jepara mengalami proses konglomerasi dengan hubungan-hubungan politik ekonomi dengan Belanda dan Cina pada tahun 1890—1900-an. Hubungan ekonomi yang "elitis" tidak dapat dipungkri. Periode-periode tersebut menghasilkan hubungan Belanda, Cina, dan Bumiputra dalam tumbuhnya Jepara kembali melalui importasi beras yang dilakukan Cina untuk menumbuhkan ekonomi Jepara tahun 1920-an, pembukaan jalur ke Semarang dan kota-kota lain di sepanjang Pantai Utara Jawa (Claver, 2014:137—138). Relasi itu berkembang dengan pola-pola budaya baru dengan semakin banyaknya orang *Indo* dan *Cina Peranakan* yang mulai berkembang di beberapa wilayah Pantai Utara Jawa (Claver, 2014: 138).

Relasi Belanda dan Cina yang mulai membangun kembali Jepara tersebut semakin memberikan peluang hadirnya berbagai hubungan-hubungan simbiosis-mutualistik dengan poros *jagad gede* (*great tradition*) dan *jagad cilik* (*little tradition*) (Redfield, 1956; Gustami, 2000). Ekspresi penyatuan *jagad gede* dan *cilik* dapat berupa karya seni, tradisi, arsitektural, religi, edukasi, dan berbagai ragam budaya kreatif lainnya semakin memberikan kontribusi pada nalar dan rancangan pemahaman kultural yang historis tidak hanya di Jepara, tetapi juga wilayah Pantai Utara Jawa. Proses itu yang menjadi titik puncak apa yang disebut sebagai proses kontestasi (Kian, 2006).

Hiasan *swastika*, sebagai gambaran penonjolan seni dalam konteks estetika muncul di Jepara sebagai poros hibridisasi. Bahkan, untuk menggambarkan dan menyimbolkan pertumbuhan seni dan ekonomi, di Jepara terkenal dengan motif *pucuk rebung*. Sebuah simbol *rebung* (tunas bambu) yang mulai tumbuh (Gustami, 2000: 187). Pola siklus hidup juga menjadi motif baru dengan mendasar pada kaligrafi arab. Kombinasi kaligrafi Arab dengan suluran, geometris yang menggambarkan semakin rumit (*ngrawit*, *ngremit*) adalah ciri-ciri ukir hibrida yang mulai berkembang di Jepara awal abad XIX awal abad XX. Pola rumit itu kemudian tidak jarang dipadukan dengan pilar-pilar dan panel yang menjorok sebagai ciri motif Hindu. Begitu juga motif burung sebagai simbolisasi kendaraan buroq dalam Islam menjadi perpaduan yang sempurna.

Pola lebih banyak terdapat di hiasan rumah, yang didominasi oleh hiasan bunga padma, yang berbentuk pola kala dan makara serta pola *meander* dan

swastika (Gustami, 2000: 189). Proses pembauran dalam wujud seni ukir sebagai contoh, menjadikan Jepara sebenarnya mulai muncul "kepandaian" meramu ide dan identitas yang kompleks. Pola dan struktur hias yang memadukan dari Islam, Hindu, dan Jawa menjadikan identitas Jepara muncul sebagai identitas yang hibrida.

Pada sisi lain, motif yang bersumber dari cerita Mahabarata atau Ramayana yang berupa wayang juga menghiasi motif Jepara (Muhajirin, 2018). Wayang sebagai simbol dan ajaran yang lebih dekat dengan Hindu, menjadi tidak masalah ketika dimasukkan dalam unsur-unsur motif ukir. Pada posisi slintru, atau mahkota sering digunakan bentuk kepala tokoh wayang, atau juga sering dibuat secara utuh di tengah-tengah ornamen. Begitu juga, bentuk meru, berada di motif slintru, juga merupakan motif kuno yang masih digunakan dalam proses pengayaan motif (Gustami, 2000: 192). Keterbukaan menerima unsur asing dalam karya seni yang dalam perkembangannya tidak hanya terkait persoalan ekonomi, komersial, tetapi juga sebagai wujud budaya yang dibangun dengan ide-ide dan kesadaran intelektual yang kuat.

Proses konglomerasi dengan tumbuhnya ekonomi Jepara dengan pelibatan Belanda dan Cina menjadi daya dorong yang kuat bagaimana hibriditas budaya Jepara berkembang, terutama periode pasca-Tanam Paksa sampai awal abad XX. Pada saat bersamaan, lokalitas Jepara mulai merepons proses konglomerasi itu dengan melakukan upaya reaktif kultural dari berbagai bidang, baik seni, *handicraft* sampai persoalan budaya secara umum. Upaya reaktif itu kemudian mengharuskan berbagai unsur saling pengaruh memengaruhi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru.

Proses transnasional yang kemudian menjadi pemicu dan ikatan budaya hibrida di tingkat lokal sering berangkat dari persoalan konglomerasi ekonomi. Pola perdagangan awal dengan hadirnya pedagang Cina, India, Arab, dan Eropa pada masa tumbuh dan berkembangnya jalur rempah menjadi warisan yang sangat berpengaruh pada bangunan budaya baru. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, perdagangan yang terbentuk dengan komoditas utama rempah menjadi aktivitas yang mengikat secara kultural, bahkan keagamaan. Proses yang demikian tidak berlangsung dengan mudah. Penolakan dan resistansi sering mewarnai proses-proses hibridisasi ketika menyangkut identitas dan kepentingan ekonomi.

Di samping munculnya proses transnasional di Jepara yang berakibat tumbuhnya konglomerasi ekonomi, terutama tebu, kopi, dan candu, juga muncul konglomerasi budaya yang kuat. Redupnya konglomerasi ekonomi di Jepara, tidak secara langsung menghilangkan proses-proses saling memengaruhi antaretnis dan budaya. Hadirnya orang-orang Cina yang selama ini hanya dilihat dari aspek ekonomi, ternyata juga terlibat dalam

membangun aspek-aspek budaya, terutama terkait seni arsitektur (Handinoto dan Samuel Hartono, 2007: 23—40). Jika dilihat dari periode awal masa konglomerasi Cina di Jepara menunjukkan bahwa Masjid Jepara, secara arsitektural merupakan karya seni yang dipengaruhi Cina. Pola bertingkat lima, dengan model atap kerucut yang dihiasi tiap lantai berbagai ornamen. Di samping bentuk arsitektur Masjid Jepara, juga ditemukan di Masjid Mantingan, di bagian depan terdapat ukiran batu padas yang memberi ciri pengaruh Cina pada *medallion* masjid. Diperkirakan *medallion* di masjid Makam Sultan Hadirin ini memiliki *stilisasi* khas Cina-Jawa, tetapi dalam perkembangannya, diubah dengan pola sulur-suluran dengan *stilisasi* kaligrafi. Munculnya model arsitektur dan pola relief Cina di Jepara disanyalir kuat muncul pada Masa Ratu Kalinyamat, abad XVI. Seorang ahli ukir dan sekaligus ahli bangunan Cina, Tjie Wie Gwan, merupakan tokoh penting, bagaimana pengaruh Cina kuat masuk dalam seni bangunan di Jepara (Chambert-Loir dan Guillot, *eds*., 2007).

Gambar 10. Pola *sulur-suluran* didinding Masjid Mantingan mengalami transformasi, Hindu dan Cina ke Islam
Sumber: (Kiri) Koleksi pribadi penulis,
(Kanan) Koleksi Nurohmad, seniman batik Jepara

Pada kedua foto *medallion* di atas menunjukkan hubungan Islam dan Cina sangat kuat. Multikulturalisme yang terbentuk dan telah menjadikannya sebagai karakter Jepara sejak awal sangat penting sebagai bukti adanya proses kelanjutan dari aktivitas ekonomi dan perdagangan yang berlatarbelakang etnis dan agama yang berbeda. Berbagai unsur dalam *stilisasi medallion* sebagai karya pertukangan Cina ini juga banyak unsur-unsur yang dianggap melanggar agama Islam dihilangkan.

Gambar 11. Pola ber*stilisasi* hewan disamarkan dan bahkan dihilangkan dengan pola tumbuhan
Sumber: koleksi pribadi penulis

Unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dihilangkan atau disamarkan agar aspek-aspek keislaman dalam motif seni dan kerajinan tidak menghilangkan adanya dialektika yang sempurna. Di samping itu, tentu interpretasi adanya hubungan dialektika ini untuk menunjukkan tidak-adanya konflik ketika konglomerasi berhenti, proses-proses hibridisasi justru melanggengkan relasi multikulturalisme di tingkat lokal.

Pada perkembangannya, jenis ukir yang dikembangkan di beberapa desa di Jepara justru mengembalikan motif makhluk hidup, baik binatang, orang, maupun motif wayang. Namun, dalam perkembangannya, motif-motif dengan makhluk hidup, baik manusia maupun binatang menjadi motif yang banyak dibuat dalam seni ukir modern (Muhajirin, 2018).

Gambar 12. Unsur makhluk hidup dalam seni ukir kontemporer.
Sumber: Koleksi Muhajirin, 2018

Tradisi menempatkan makhluk hidup dalam seni ukir bahkan berjalan sampai sekarang.

Tidak mudah menelusuri kapan tepatnya dalam motif ukir ini mulai menempatkan motif makhluk hidup. Jika ditelusuri berdasarkan temuan ukiran lama, maka dimungkinkan munculnya ukiran makhluk hidup ini sejak ada pengaruh Eropa dalam motif ukir (Gustami, 2000: 166—175). Jika ditelusuri lebih jauh, dapat juga pengaruh Hindu yang dipercaya berhenti pada masa Islam, ternyata muncul kembali pada masa kolonial dan pascakolonial (Lombard, (2), 1996: 31—35).

Jika melihat motif makhluk hidup dalam ukir, sebenarnya tidak hanya berupa binatang dan orang semata, tetapi juga dapat dilihat berupa personifikasi wayang (foto 5). Wayang tidak dideskripsikan hanya sebagai bentuk "boneka tokoh" yang berupa seni ukir kulit, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk manusia. Tentu saja, sebagai wilayah yang memiliki tradisi santri yang kuat, perwujudan wayang dan manusia dalam motif ukir menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Hipotesis yang dapat dijelaskan sangat terkait mitos-mitos tradisi lokal yang masih hidup dengan selalu merujuk tokoh-tokoh wayang sebagai *danyang*, penguasa makro dan mikro kosmos lokal. Dengan demikian, dalam dunia budaya Jepara, proses dialektika yang berlangsung sebenarnya merupakan tindakan negosiasi budaya, bahkan agama yang tertuang dalam karya seni.

Bagi masyarakat Jawa, juga Jepara, wayang adalah bentuk personifikasi mitologis pra-Hindu yang sudah mengalami proses adaptasi dalam tradisi Jawa (Angst, 2007). Oleh karena itu, Jepara yang sebagian besar merupakan penduduk yang lebih dekat dan mayoritas menggunakan "kejawaan" sebagai perilaku sosial-budaya, maka wayang masih menjadi tradisi, bahkan menjadi sumber pengetahuan yang dipelihara. Peralihan dan perubahan gaya hidup dan sudut padang akan dunia makrokosmos masih merujuk pada kekuatan dominan yang berasal dari sumber-sumber tradisi.

Jika demikian, proses transmisi Hindu ke Islam yang sebenarnya berupa pertemuan yang saling bersinergis dengan komunitas dan gaya hidup dominan merupakan proses hibridisasi yang sangat jelas terjadi di Jepara. Penerimaan suatu unsur, dua atau lebih dalam struktur suatu tradisi atau budaya tampaknya menjadi karakter hibrida yang paling menonjol dalam perkembangan budaya di Jepara. Ekspresi budaya yang dibangun dari cara pandangan sejak pra-Hindu ini tidak mudah lepas dari budaya Jepara.

Pada proses selanjutnya, ekspresi budaya itu kemudian membutuhkan media. Berbagai media menjadi cara menuangkan pandangan hidup dan ekspresi budaya yang diyakini. Tidak jarang, penuangan ekspresi tersebut sering tumpang tindih, linier, berkelindan, bahkan bertentangan. Bentuk ukir kayu yang tumbuh dalam beberapa dekade menunjukkan keragaman

yang cukup kompleks dan rumit. Jika dilihat pengelompokan ragam maka dapat dilihat beberapa motif, motif hias candi. Hal ini dapat dilihat pola dan motif Candi Prambanan, misalnya yang menggambarkan sebuah pot bunga yang "me*muntah*kan" suluran-suluran dan bunga sebagai lambang kesuburan. Pola candi ini tentu saja sangat penting ketika menjadi salah satu motif utama ukiran di Jepara. Mitologi dan kepercayaan Hindu dapat masuk dalam ide pembuatan motif ukir yang kemudian dapat menjadi penjelasan bagaimana hibridisasi begitu kuat dalam seni kriya ini. Begitu juga motif bunga dan tumbuhan dari Candi Kalasan yang banyak dijadikan motif ukir (Gustami, 2000).

Di samping motif candi yang merupakan motif utama, juga motif-motif khas beberapa daerah dan tradisi kerajaan yang ada di Jawa. Motif kedaerahan yang banyak menjadi ragam motif ukir adalah motif hias Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta, dan Madura sementara motif kerajaan biasanya merujuk motif Majapahit, Pajajaran, Bali, dan Surakarta (Gustami, 2000). Di samping motif kedaerahan dan kerajaan, juga motif Cina, Arab, bahkan Eropa banyak ditemukan dalam motif ukir di Jepara.

Berbagai motif tersebut adakalanya menjadi satu pola dalam satu karya seni dengan gaya dan motif tertentu, tetapi juga dapat kombinasi antara 2 sampai 3 motif dalam satu karya. Memang perlu kajian lebih mendalam apakah pemotifan pada seni ukir ini merupakan bentuk kepentingan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Muhajirin (Muhajirin, 2018) atau ada kepentingan lain, sebagaimana pengayaan motif yang didukung oleh kepercayaan, keyakinan, motivasi, dan berbagai unsur adaptif lainnya, sehingga budaya ukir menjadi bukti kuat adanya proses hibridisasi. Dilihat dari aspek keberlanjutan motif yang terkait dengan kepercayaan Islam di Jepara, sejak masa Cina, Hindu sampai Islam dan Eropa, kepentingan ekonomi tampaknya perlu dilupakan dan mulai ditegaskan bahwa hibridisasi adalah konstruksi sejarah yang kuat dalam sejarah Jepara. Berbagai motif dibentuk di samping sebagai ekspresi eksplorasi seni dan kesadaran kultural, tentu saja sebagai cara bagaimana seni dijadikan sebagai wahana untuk menyuarakan kebersamaan dan toleransi.

Penciptaan motif seni sebagai ekspresi dan kesadaran kultural sangat penting dalam membentuk kesadaran baru. Walaupun dalam proses penciptaan itu mengharuskan negosiasi dengan unsur-unsur lain. Seni ukir dalam konteks Jepara ini beragam, baik motif, asal usul motif sampai gaya (*style*) dalam menuangkan kesadaran kulturalnya. Motif Hindu, Cina, Arab, Eropa, dan etnis merupakan motif yang paling banyak dibuat. Hal ini tidak dapat disimpulkan secara sederhana, karena terkait pandangan dunia (*world view*) bagaimana seni diekspresikan.

Motif-motif yang banyak dijadikan dasar karya seni ukir sebagaimana

motif Hindu, Cina, Arab, Eropa, dan etnis tersebut banyak dijadikan motif gebyog, hiasan dinding, peralatan rumah tangga, dan furnitur. Berbagai motif itu dapat dilihat dalam sketsa di bawah ini:

Gambar 13. Motif hiasan candi (Hindu) pada candi Prambanan
Sumber: Gustami, 2000: 166

Hiasan motif pot bunga dengan tumbuhan dan bunga yang keluar pot tersebut seolah tumpah atau *muntah* yang menggambarkan lambang kesuburan. Motif ini jarang ditemui dalam karya-karya berikutnya dan lebih banyak merupakan karya yang merupakan pesanan. Namun demikian, munculnya motif yang merupakan motif candi Hindu menjadi sesuatu yang menunjukkan bagaimana hibridisasi adalah proses *tangible* dan *intangible* sekaligus.

Gambar 14. Motif hiasan Candi Kalasan
Sumber: Gustami, 2000: 166

Pada motif Candi Kalasan tersebut banyak dijumpai pada barang-barang peralatan rumah tangga, furnitur. Motif Candi Kalasan ini lebih sederhana dan biasanya menjadi hiasan di penampang dan pipih meja. Motif Kalasan ini memberikan keleluasaan dan lebih terbuka dan lebih mencair. Pola ini tentu saja memiliki maksud yang berbeda jika dibandingkan dengan motif Prambanan yang lebih tertutup.

Gambar 15. Motif berbagai daerah berturut-turut dari kiri ke kanan bagian atas, motif Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta dan Jepara; sementara yang bawah dari kiri ke kanan berturut-turut dari motif Majapahit, Pajajaran, Bali dan Surakarta.
Sumber: Gustami, 2000: 167

Motif daerah yang tergambar dalam berbagai daerah itu hampir semuanya menunjukkan motif bunga-bunga dengan ujung melingkar seolah-olah menutup dari proses perkembangan daun. Pola ini banyak dijumpai di Pantai Utara Jawa sampai pedalaman, bahkan sebagian Bali. Pola yang sama dengan bentuk daun dan ujung batang yang melingkar tidak membedakan antara Islam dan Hindu maupun etnis lain. Jepara dalam pembentukan motif selalu mengambil motif-motif dari luar Jepara sebagai pola yang ikut menjadikan dinamisnya motif Jepara.

Jika demikian, maka persoalannya dari mana motif itu pertama muncul dan bagaimana proses pengaruh-memengaruhi dalam pengembangan motif. Hal ini sangat penting dikaitkan dengan perjalanan motif tersebut terutama terkait dengan seni kriya ukir kayu. Hal ini memberikan dampak pada pola hibridisasi yang sampai saat ini masih dalam proses perdebatan di kalangan sejarawan (Vickers, 2009). Peradaban pesisir dalam konteks konglomerasi rempah tentu saja wilayah pantai menjadi awal bagaimana pertumbuhan seni kriya dan motif tumbuh berkembang sejalan dengan terbentuknya peradaban pesisir, hibrida, cair, dan dinamis dalam mendialektikan berbagai unsur (Vickers, 2009: 19).

Gambar 16. Motif Madura
Sumber: Gustami, 2000: 168

Motif Madura ini memiliki kekhasan dengan ketegasan pola. Motif ini sering dijadikan sebagai pintu maupu *gawangan* pintu. Motif Madura ini tidak berkembang dan lebih terbatas. Berbeda dengan motif daerah lain yang banyak ditemukan dalam berbagai hiasan. Berbeda dengan motif daerah di atas adalah motif Arab. Pola yang bersambungan dan berpola simetris lebih banyak mencirikan motif Arab. Pola yang ada lebih didominasi bunga yang kurus dikombinasikan pada pola simetris. Pesan yang dimunculkan lebih pada keserasian dan keseimbangan pola. Pola yang hampri mirip adalah motif Cina. Namun, pada motif Cina lebih banyak kombinasinya, antara motif yang menekankan kedinamisan dengan berdialektik dengan unsur-unsur tempatan yang lebih simetris.

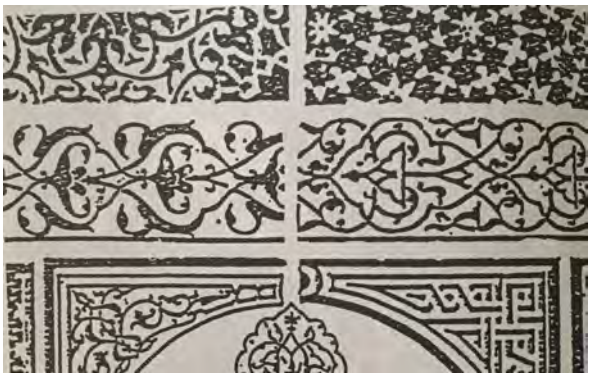

Gambar 17. Motif Arab
Sumber: Gustami, 2000: 170

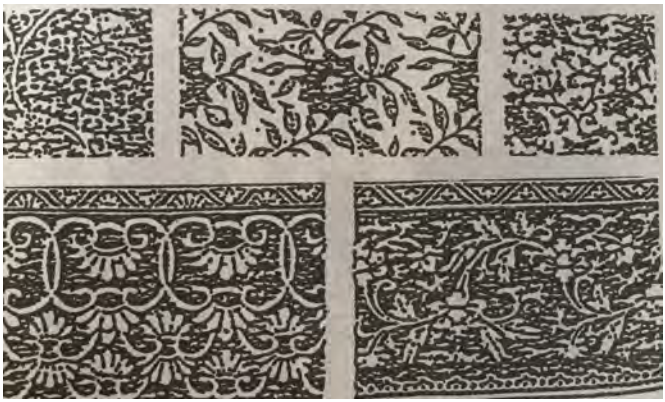

Gambar 18. Motif Cina dengan keragaman motif
Sumber: Gustami, 2000: 169

Pola dan motif yang sangat berbeda dari berbagai motif ukir yang dikembangkan di Jepara adalah motif Eropa. Mayoritas motif Eropa yang dijadikan motif adalah motif kerajaan Prancis, kemudian wilayah provinsi dengan gaya Carolean, Renaisans, Barok, Rokoko, Klasik (Gustami, 2000). Pola-pola Eropa, khususnya Prancis ini banyak dikembangkan untuk ruang-ruang priyayi termasuk yang sebagian berada di pendopo Kabupaten.

Gambar 19. Motif Eropa
Sumber: Gustami, 2000: 170

Pada masa kolonial Belanda, motif Eropa ini kemudian banyak digunakan sebagai perabotan dan peralatan rumah tangga. Gaya Kolonial, gaya Georgian, gaya Federal adalah beberapa gaya yang mendominasi gaya furnitur dan peralatan rumah tangga priyayi.

Gambar 20. Kursi koleksi Kartini dengan gaya lebih mendekati federa
Sumber: koleksi pribadi penulis

Jika diamati lebih jauh, pola suluran sambung menyambung dengan bulatan di tengah sebenarnya mirip ada yang merupakan motif *medallion* di Masjid Mantingan. Hanya saja pola suluran di motif ukiran lebih diwujudkan dengan rangkaian daun. Koleksi Kartini lain adalah pola kursi yang mirip gaya Federal, tetapi unsur-unsur lokal juga kuat.

Gambar 21. Koleksi Kartini
Sumber: Koleksi pribadi penulis

Hal yang sama terjadi pada bentuk arsitektur Makam Mantingan dengan perpaduan Hindu, Islam, dan Jawa. Jika diamati secara saksama, bentuk

arsitektur Makam Mantingan ini, minimal ada tiga unsur yang melekat pada pola dan struktur bangunan, yakni unsur Hindu, Islam, dan Jawa. Arsitektur makam Sultan Hadirin, dengan pintu gerbang bentar berpola punden berundak juga mengisyaratkan adanya pola hibridisasi. Pola pintu pengapit (*kolocokro*) dengan model *stilisasi* Hindu sinkretik (*kapitayan*) menunjukkan secara simbolik untuk memasuki dunia "hakikat" harus melalui proses penyucian dengan melewati pintu bentar. Di samping itu, pola *kapitayan* ini dapat dimaknai sebagai "peluntur" dosa dengan melewati pintu bentar bertuliskan kalimat *tauhid*. Di samping itu, di kompleks masjid ini juga muncul berbagai ragam *medallion* dengan *stilisasi* Hindu, Cina, dan Jawa. Pola sulur-suluran, ornamen candi, dan simbol-simbol kehidupan yang tergambar dalam bentuk ukiran dalam batu putih, mengisyaratkan seni sebagai media pengetahuan telah mengalami hibridisasi.

Gambar 22. Pintu gerbang candi bentar utama dan kedua di Makam Sultan Hadirin Jepara. Perpaduan Hindu, Jawa dan Islam
Sumber: Koleksi pribadi penulis

Pada pintu gerbang bentar Makam Mantingan tersebut sangat jelas bagaimana pola bangunan candi yang juga mirip dengan pola Masjid al-Aqsha (Masjid Menara Kudus). Pola arstektur ini sekilas akan menjadi bagian dari candi Hindu berpola punden berundak dengan elemen simetris. Pintu gerbang yang menyerupai pintu utama memasuki candi atau pura di komunitas Hindu menjadi unsur penting, bahwa hibridisasi yang berproses tidak sekadar bagaimana dua atau lebih simbol dan karakter suatu budaya dan agama dapat berpadu dalam motif dan model. Kedua unsur baik budaya dan agama tentu mengalami proses negosiasi dan dialektik bagaimana persoalan esensi, budaya, dan agama, yang merupakan identitas dapat bersatu dalam satu bidang atau media.

Tatanan batu bata merah dengan membentuk krucut berumpak berundak (foto. 6) menjadikan karakter Islam tidak jelas. Atau, dalam konteks abad XVI, Islam masa itu merupakan kontstruksi dialektika antarunsur budaya yang masih hidup dalam batasan komunitas yang berdampingan. Sementara pintu utama (foto 2.), sangat jelas merupakan pola Hindu yang sering ditemui di berbagai kompleks candi atau pura Hindu.

Gambar 23. Pintu gerbang candi bentar utama dan kedua di Makam Sultan Hadirin Jepara. Perpaduan Hindu, Jawa dan Islam
Sumber: Koleksi pribadi penulis

Gambar 24. Pola lengkung pintu memasuki makam
Sumber: koleksi pribadi penulis

Hal yang menarik pada lengkung pintu memasuki makam (foto 7.) Pola lengkung dengan pintu kayu kembar mengikuti pola lengkung, sangat khas Islam. Sementara pada posisi di atasnya merupakan pola bertingkat sebagaimana bangunan joglo Jawa dengan genting limasan bertingkat (foto 5). Beberapa ornamen yang menempel di dinding disinyalir merupakan hiasan “bunga” yang menempel di beberapa sudut tembok (foto 9). Sampai

saat penelitian ini dilakukan, belum ada informasi untuk menafsir hiasan dinding yang menempel. Apakah berupa bunga, atau binatang simbolik kura-kura.

Pintu masjid atau pintu serambi masjid sering mencirikan bentuk lengkung yang berkarakter Asia Barat. Hal ini diperkuat dengan tulisan kalimat *tauhid* dan kalimat *basmalah* pada pintu kayu yang simetris (kanan-kiri).

Gambar 25. (Kiri) Pintu kayu di Makam Mantingan, (Kanan) Hiasan bunga pada dinding
Sumber: Koleksi pribadi penulis

Pada pintu kayu tersebut sangat jelas, bagaimana Islam disimbolisasi sebagai batas memasuki makam dengan dibatasi kalimat *basmalah* dan kalimat *tauhid*. Proses manusia dalam menuju penghidupan terakhir (makam) dengan melewati pintu penyucian dengan diingatkan tulisan *basmalah* dan kalimat *tauhid*.

Simbol dan pesan dalam seni arsitektur memang tidak mudah ditafsir. Berbagai pertimbangan historis dengan merunut pada proses awal sebagai bagian jalur rempah yang tidak secara langsung, maka sangat mungkin proses hibridisasi ini menjadi dampak yang disengaja maupun tidak menjadi bagian proses sejarah Jepara. Pusat aktivitas ekonomi perkebunan (*onderneming*) komersial, menjadi sarana penting bagaimana proses dialektika terjadi.

Konglomerasi tebu, kopi, dan candu menjadi proses konglomerasi dan berujung pada proses hibridisasi budaya yang sangat jelas. Pertemuan orang Eropa, Cina, dan Bumiputra dalam proses konglomerasi ekonomi ternyata tidak hanya bagaimana relasi ekonomi yang terbentuk menjadi titik penerimaan secara kultural antaretnis dan kultural, tetapi juga mengarah pada proses dialektika. Pada motif, seni dan kerajinan pada abad XVI sangat jelas adanya perpaduan gaya dan motif Hindu dan Islam. Begitu juga pada motif Cina dan Islam, terkadang memiliki perpaduan rumit.

Pada konteks kolonial, pada 1800 tidak ditemukan gambaran jelas terkait pola pemukiman dan komunitas Eropa. Tidak ditemukannya pemukiman khas Eropa atau arsitektural Indis karena orang-orang Eropa lebih suka bermukim di Semarang (Djoko Soekiman dan Bambang Purwanto, 2018: 137—151). Namun, *loji londo*, pendapa kabupaten, yang merupakan tempat pemukiman orang Belanda dan tempat para keluarga bupati memberikan petunjuk adanya pengaruh Indis dalam struktur arsitektural banguan tersebut.

Pengaruh Eropa terjadi sangat kuat ketika pemerintah lokal setingkat kabupaten sebagai lembaga administrasi yang sebelumnya merupakan bagian dari birokrasi kerajaan. Pola pemerintahan yang semula merupakan bentuk loyalitas kepada raja, kemudian mengalami perubahan ketika posisi bupati menjadi ambivalen. Satu sisi mereka harus melayani raja sebagai pamongpraja dalam meneruskan "perintah raja", tetapi di sisi lain mereka menjadi "pangrehpraja". Sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan posisi bupati dan perangkatnya sebagai "pelayan kolonial" (Sutherland, 1983).

Bupati Jepara sebagai bagian dari sistem birokrasi baik kerajaan maupun kolonial, tumbuh dan berproses secara politik dalam kondisi yang ambivalen. Satu sisi masih mengikuti pola Jawa oleh karena posisinya tidak dapat lepas dari birokrasi kerajaan. Ornamen Jawa menjadi bagian penting dalam rung pendopo, yaitu gong, yang oleh masyarakat disebut Gong Senen dengan segala kepercayaan magis yang ada padanya, juga seperangkat gamelan sebagai menjadi bagian kehidupan priyayi dengan segala kemewahannya (Badan Perencanaan Daerah Jepara, 2017).

Gambar 26. Gong Senen (*Pradongga Birawa*) sebagai simbol kemegahan dan spiritualitas bupati
Sumber: Badan Perencanaan Daerah, 2017

Gong Senen ini menjadi sangat sakral karena ditabuh setiap Senin sore dan menjadi upaya menenangkan wilayah Jepara (Badan Perencanaan Daerah, 2017). Di samping Gong Senen, ada pula gamelan kabupaten yang menjadi pelengkap ruang pendopo sebagai simbol kejawaan yang masih terpelihara.

Gambar 27. Gamelan kabupaten

Namun, dalam tataran sosial-budaya, simbol-simbol kejawaan tersebut menjadi sangat penting ketika putri bupati belajar menari dan mendengarkan musik Jawa. Begitu juga gamelan ini sebagai sarana menghibur tamu-tamu, khususnya dari Kasunanan Surakarta maupun orang-orang Belanda. Ruang bupati ini kemudian menjadi pintu masuk pengaruh Eropa dalam kehidupan sosialnya. Pendopo kabupaten yang diperkirakan berdiri tahun 1730 atau 1750 ini merupakan tempat tinggal bupati Adipati Tjitrosoma II (Tjitrasoma III, Badan Perencanaan Daerah, 2017). Pendopo Jepara ini pada masa *Cultuur-Stelesel*, 1830—1870, dijadikan rumah dinas bupati.

Pada saat menjadi rumah dinas bupati Sosrodiningrat, pembagian ruang didasarkan pada fungsinya. Bagian gebyok utara disebut Rana Kaputran, bagian gebyok selatan diberi nama Rana Kaputran, sebagai ruang putri-putri bupati, sedangkan ruang tengah merupakan tempat Peringgitan yaitu tempat menonton pertunjukan wayang dan berlatih kesenian bagi putra-putri bupati. Sedangkan serambi belakang, digunakan Kartini untuk mengajar anak-anak Kampung Pungkuran.

Struktur bangunan yang sebenarnya merupakan bangunan dalam sistem birokrasi kerajaan tersebut, kemudian lambat laun menjadi bagian dari sistem birokrasi kolonial. Gaya Eropa mulai memasuki arsitektur bangunan dengan pilar-pilar besar sebagai tanda adanya pengaruh gaya kolonial dan/atau federal. Secara rinci memang tidak ditemukan bentuk gaya yang jelas, tetapi

pilar-pilar dan jendela besar yang berada di pendopo menunjukkan prototipe Eropa (Gustami, 2000). Perubahan secara jelas terjadi pada 1930-an dengan semakin jelas gaya Eropa dengan bentuk gapura dan jam besar sebagai bentuk *stilisasi* Eropa di mana pada tahun 1920 bentuk dan jam tersebut belum muncul.

Gambar 28. *Regentschapskantoor (kaboepaten) te Djapara*, 1920

Gambar 29. Pendapa kabupaten dengan model Indis, 1936
Sumber: *Regentschapskantoor (kaboepaten) te Djapara*
Koleksi KITLV 80809

Foto 16, menunjukkan bentuk arsitektur yang hampir sama dengan foto 17, tetapi untuk pintu gerbang mengalami perubahan. Gaya pilar dan sekaligus berfungsi sebagai pagar dengan ditambahkan besi yang melengkung di atasnya serta jam besar yang berada di depan pendopo dengan hiasan air mancur memberikan kesan modern dan bergaya Eropa. Hal ini dikarenakan

pendopo ini pernah menjadi rumah residen yang digunakan untuk kantor Residen P.W. Palte yang merupakan residen Jepara-Rembang pada 1930-an sampai 1936. Sebelumnya, pendopo ini juga pernah menjadi kantor bersama masyarakat Soeka-Rame, Pati sebagai bentuk penyatuan residen antara Jepara dengan Rembang pada 1937. Posisi Jepara hanya sebagai kabupaten yang berada di bawah Karesidenan Jepara-Rembang.

Perubahan arsitektur dari rumah bupati Jawa menjadi rumah dinas residen sangat memengaruhi bentuk arsitektural pendopo. Pada masa Mataram, Jepara sebagai *vassal* (abdi raja) memperoleh hak khusus dan penghormatan sebagaimana bupati-bupati di Jawa. Pada masa VOC, Bupati Jepara diberi hak khusus menarik pajak, penyedia tenaga kerja dan urusan pertanian. Tugas baru sebagai bagian dari sistem kolonial, terutama masa Deandles, 1808—1811, memberikan peluang masuknya unsur-unsur Eropa dalam kehidupan bupati. Di sini bupati kemudian menjadi pegawai kolonial dan pemerintahan Bumiputra (*Binnelands-Bestuur*). Pada masa Deandels tersebut bupati kemudian menjadi pegawai yang menerima gaji dengan sistem tunjukan. Posisi bupati yang demikian kemudian menempatkannya sebagai berikut:

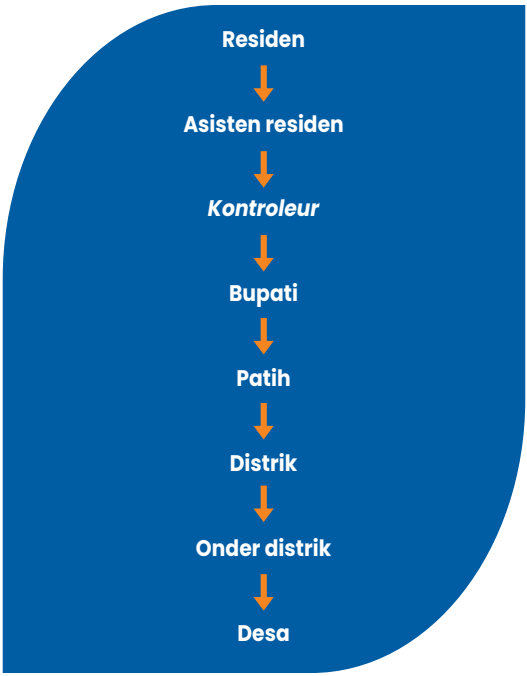

Gambar 30. Bagan Struktur Birokrasi
di Pantai Utara Jawa Pada Awal Abad XIX
Sumber : diolah dari beberapa sumber

Berdasarkan pada Regeerings Reglement (RR) 1825, bupati-bupati di Jawa mulai diangkat oleh Gubernur Jenderal, tetapi khusus kasus tertentu, bupati itu masih dipilih oleh penduduk. Jika dilihat periode pasca-*Cultuur-stelsel*, (1830—1870), dengan diterbitkannya Agrarische Wet 1870, posisi bupati khususnya yang berada di luar *Vorstenlanden* (tanah kerajaan) semakin kuat. Para bupati ini, di samping diberi hak istimewa tanah lungguh, *apanage*, sebagai konsekuensi menjadi birokrat, juga diberikan kebebasan untuk memiliki, menyewakan, jual beli, menggadaikan tanah dengan aturan yang dibuat pemerintah kolonial melalui *Agrarische Wet* 1870. Hal ini juga berlaku bagi penduduk Eropa, Cina, atau Timur Asing lainnya dan para investor yang mulai diberikan kesempatan melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan lahan-lahan yang ada.

Naiknya posisi bupati pasca-*Cultuur-stelsel*, hak-hak khusus bupati semakin meningkat dan kuat dengan segala hak otonom yang dimiliki. Apalagi, sejak tahun 1903, reorganisasi pemerintahan setingkat karesidenan dan kabupaten mulai dilakukan sebagai cara mempermudah pengawasan dan efisiensi anggaran (Akhyat, 2020). Kehidupan mewah keluarga bupati semakin berkurang yang sebelumnya menunjukkan kemewahan dengan berbagai atribut, pesta, upacara, simbol-simbol, dan kehidupan yang menyerupai orang Eropa (Sutherland, 1983). Walaupun demikian, simbol kemegahan rumah bupati tetap mencerminkan kehidupan yang mewah, sehingga rumah bupati secara arsitektural dan perabotan yang ada tidak jauh berbeda dengan rumah dinas bupati.

Efisiensi dan penciutan wilayah sebagai kebijakan reorganisasi 1903, maka Jepara hanya menjadi bagian dari residen, yaitu Karesidenan Jepara-Rembang yang terdiri dari Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara sebagai Karesidenan Pantai Utara Jawa (*Noord Kust Java Residenstie*) (*Volkstelling*, 1930). Otonomi bupati ini kemudian menjadi awal bagaimana persoalan perubahan social ekonomi pada tingkat lokal, tidak memberikan banyak jalur perubahan ekonomi pada tingkat bawah (Toer, 2006). Penumpukan sumber ekonomi lokal pada para priyayi dan koneksitas sinergisnya dengan pengusaha, baik Cina dan Eropa, maka hal ini dapat menjadi cara menjelaskan bagaimana proses resepsi, adaptasi dan akulturasi gaya dan budaya Eropa, dan Cina dapat menjadi bagian proses hibridisasi di Jepara.

Pendopo kabupaten dengan demikian tidak sekadar bagaimana pengawasan administrasi dilakukan dalam pendopo, tetapi sekaligus sebagai simbol kemodernan yang dihadirkan penguasa lokal. Hal ini tercermin dalam pola dan gaya hidup bupati beserta keluarganya dengan bahasa Belanda yang mulai masuk di kalangan priyayi Jepara, perabotan kuliner serta jenis kuliner yang disuguhkan serta berbagai pakaian ala Eropa. Tamu-tamu khusus

menjadi bagian acara dalam pendopo terutama para tamu Belanda. Hubungan antara priyayi Jawa dengan orang Eropa ini yang kemudian memungkinkan adanya proses transmisi, peniruan maupun adaptasi dari berbagai unsur. Perkenalan putri-putri priyayi dengan orang Belanda semakin intensif, dan hal ini menjadi proses dialektika verbal dengan berkelindannya berbagai pandangan hidup, pola pembudayaan maupun proses saling berbagai unsur dalam budaya lokal yang semakin kuat.

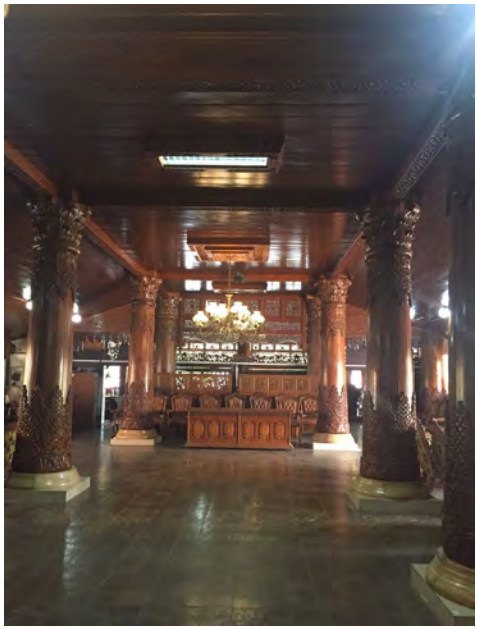

Gambar 31. Ruang utama pendopo Kabupaten Jepara. Perubahan dari gaya Indis dibungkus dengan ukir-ukiran pada setiap pilar pada masa 1980-an
Sumber: koleksi pribadi penulis

Proses komunikasi, dialektika verbal maupun kultural menjadikan pendopo ini bukan lagi sebagai tempat administrasi. Pendopo sebagai pusat transformasi segala pengetahuan antara kolonial dan koloni. Budaya Indis adalah bagian yang berproses dalam dialektika budaya di bawah bayang-bayang kolonial. Pendopo tidak lagi menjadi simbol priyayi Jawa yang merepresntasikan segala hal terkait "kejawaan", tetapi lebih merupakan "pintu" masuknya berbagai budaya elitis antara kolonial dan koloni.

Di samping pendopo, benteng Jepara (*Fort Djapara*) memililiki karakter yang dapat dikatakan berpola Indis. Benteng Jepara yang merupakan salah satu bangunan yang hadir pada masa kolonial, ini tersusun dengan batu bata

merah dan batu karang. *Fort Djapara* yang dibangun di atas lahan yang cukup tinggi sebelah utara kota menjadi bangunan yang tidak hanya menunjukkan supremasi kolonial, tetapi ada pola-pola kejawaan dalam struktur arsitektural benteng dengan *loji londo* (makam para pegawai Belanda) atau sekarang disebut *loji gunung*, karena letaknya yang tinggi dan seolah dibangun sebagai "gardu pandang" kota dan pelabuhan Jepara. Hampir semua benteng VOC (Belanda) yang dibangun selama memegang kekuasaan memiliki karakter tembok berplester yang tinggi serta memiliki bangunan khusus yang menjadi tempat pengawasan.

Fort Djapara yang dibangun sebagai tempat pengawasan sekaligus sebagai tanda kekuasaan Belanda di Jepara memiliki karakter khas. Tidak ada tanda-tanda sebagai pengawas secara militer, tetapi hanya bangunan yang menonjol sebagai pos penjagaan. Di samping dibangun dengan tembok tebal dengan batu bata merah dan sebagian dengan batu karang dengan ketebalan hampir 60 cm dengan ketinggian di atas 1 m tampak bukan sebagai benteng militer. Hal lain yang menarik juga di depan *Fort Djapara* tersebut diletakkan makam orang Belanda yang dipercaya sebagai makam Kapten Tack, seorang militer yang diberi tugas melakukan negosiasi dengan Kraton Mataram dalam rangka melawan resistansi Pangeran Trunojoyo dari Madura (1649—1680).

Gambar 32. Makam Kapten Tack didepan sebelah kanan benteng
Sumber: koleksi pribadi penulis

Fort Djapara memang bukan bangunan yang sangat jelas terkait *stilisasi* hibrid, melainkan dalam beberapa model kontruksi yang ada menunjukkan

unsur-unsur Eropa, tetapi juga terkait dengan bangunan pola Jawa. Paling tidak dengan tembol batu merah yang ditata tanpa ada plester menyerupai pola bangunan gapura Makam Mantingan yang tanpa plesteran. Susunan batu merah bisa jadi pola struktur bangunan yang disinyalir dapat berasal dari masa Hindu, walaupun sebagian darinya berupa tembok dari batu karang.

Bangunan benteng yang menyerupai kastil Eropa dengan tembok batu bata merah tanpa diplester mengingatkan akan bangunan gaya Eropa abad XVII. Transmisi pengetahuan yang berasal dari Eropa ini kemudian dijadikan simbol, tidak hanya sebagai bentuk modernisasi, tetapi juga sebuah bentuk baru tentang kemajuan dan keunggulan. Bangunan benteng yang berdiri abad XVII itu tentu tidak dimaksudkan sebagai cara, melainkan hanya untuk keamanan semata. Hal ini tentu dapat dianalisis dengan adanya *loji londo* atau *loji gunung* yang ternyata berupa makam. Benteng yang di depannya berupa makam menjadi hal yang penting dalam tradisi Jawa-Islam di mana setiap masjid dalam tradisi Jawa-Islam lama, selalu di sekitarnya terdapat makam.

Gambar 33. Sisi tembok *Fort Djapara* dengan ujung berbentuk khas seperti bangunan kastil Eropa
Sumber: koleksi pribadi penulis

Jika dilihat dari sisi ruang dan *landscape* benteng, maka tampak tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya ruang-ruang khusus sebagai base-camp militer atau perkantoran. Justru mirip seperti taman yang merupakan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang cukup luas. Bisa jadi, benteng ini sebagai tempat untuk memantau keamanan sekaligus sebagai "gardu pandang" terhadap kondisi laut dan kota Jepara. Hal ini karena benteng ini langsung menghadap laut dan kota Jepara.

Gambar 34. *Landscape* Fort Djapara
Sumber: koleksi pribadi penulis

Beberapa kasus bangunan Indis yang menjadi "*colonial legacy*" dalam sejarah Jepara menjadi bagian bagaimana kota Jepara dibangun atas dasar hibridisasi. Pada periode liberal, 1870—1940-an sinyalir budaya Indis semakin mengarah pada *stilisasi* seni, arsitektural, dan motif ukir.

Pola-pola budaya Indis sebagaimana yang terjadi di kota besar berkembang sejak tahun 1800-an, akibat gelombang orang-orang Eropa yang memasuki Jawa, terutama perempuan. Proyek besar *Cultuur-stelsel*, menjadi salah satu pendorong akan kebutuhan tenaga ahli dari Eropa. Beberapa di antara mereka ditemani keluarganya. Mereka menempati kota-kota besar, sedangkan hanya beberapa yang tinggal di kabupaten karena kepentingan perkebunan dan urusan administrasi birokrasi (*Kolonial Tijdschrift*, 1912). Sampai awal abad XX, belum ada rencana pendirian pemukiman yang menunjukkan adanya komunitas orang Eropa yang tinggal di pedesaan. Pada awal masa "komersial", orang Eropa tidak banyak yang bertempat tinggal di pedesaan. Namun, pada periode liberal akhir, banyak ditemukan bukti-bukti adanya proses sosial dan keagamaan yang terjadi di perdesaan (Wolterbeek, 1995; Sumartana, 1993; Djoko Soekiman dan Bambang Purwanto, 2018: 137—151). Kehadiran orang Eropa di pedesaan lebih banyak menangani urusan perkebunan dan misi keagamaan (Guillot, 1981: 11). Mereka berada hanya berada di kota atau bahkan di ibu kota residensi. Pertemuan dalam misi ekonomi perkebunan ini juga tidak serta merta dilakukan langsung

para pekebun Eropa, tetapi melalui *kontroleur* yang terhubung dengan desa (Akhyat, 2020). Dalam urusan pemilihan lahan dan tenaga kerja, peran kepala desa sangat penting. Hubungan antara kepala desa dan pekebun Eropa ini kadang berlanjut ketika mereka memiliki hubungan khusus, termasuk misi agama maupun perkawinan. Walaupun demikian, untuk wilayah Jepara, hampir semua pekebun Eropa tidak ditemukan di perdesaan, kecuali Desa Bondo yang merupakan satu-satunya desa yang berpenghuni orang Eropa pada awalnya. Mereka adalah para penggarap perkebunan kopi, sedangkan untuk perkebunan tebu diawasi dari Semarang (Fasseur, 1977).

Dari Desa Bondo, pengaruh orang Eropa berkembang ke arah Desa Donorejo, Klaling (Keling) sebagai desa tebu (Fasseur, 1977). Perkembangan orang Eropa di Jepara terutama, lebih banyak melakukan perkawinan dengan perempuan lokal. Peningkatan penduduk "asimilasi" Eropa-Jawa pada 1920-an sampai dengan 1930-an memberikan petunjuk munculnya perkawinan campur di perdesaan Jepara (*Volkstelling*, 1930: 132). Jumlah mereka 140 untuk laki-laki dan 96 untuk perempuan pada 1930, sedangkan tahun 1920 lebih tinggi, yaitu 130 untuk laki-laki dan 124 untuk perempuan. Beda halnya dengan asimilasi Cina-Jawa, pada 1920 jumlah laki-laki asimilisasi 239 dan tahun 1930 lebih rendah hanya 292, sedangkan perempuan asimilasi pada 1920 berjumlah 212 dan tahun 1930 berjumlah 292. Besarnya jumlah penduduk Jepara asimilasi Cina-Jawa menunjukkan bahwa pola perkawinan campur Cina-Jawa lebih besar dari pada Eropa-Jawa. Sementara perkawinan Timur Asing lain laki-laki dengan orang Jawa, 1920 berjumlah 58, sedangkan tahun 1930 menurun menjadi 50, dan perempuan pada tahun 1920 berjumlah 59 dan tahun 1930 berjumlah 48 (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1931: 148—149).

Tingginya penduduk asimilasi hasil perkawinan ini semakin tinggi terutama orang-orang Eropa yang melakukan perkawinan dengan perempuan lokal, terutama di Desa Bondo, Tegalombo, Banyutowo pada 1887, dan pada 1903 berkembang ke wilayah Margorejo, Kedungpenjalin (Wolterbeek, 1995: 58). Tempat-tempat tersebut merupakan wilayah yang banyak dihuni komunitas Kristen dan pada 1913, jumlah orang Kristen di wilayah ini mencapai 2400 orang (Wolterbeek, 1995: 59), di samping orang Melayu 184 pada 1930 dan orang Timur Asing lainnya 20 orang.

Sampai tahun 1930, bersamaan dengan krisis yang berdampak pada kondisi ekonomi Jepara, orang-orang Indo banyak ditemukan di Jepara yang banyak tinggal di Desa Banyutowo, Sambung Oyot, dan Bondo[2]. Perkawinan

[2] Terima kasih saya ucapkan ke Wahyono yang memberi petunjuk bertemu dengan sisa orang Indo yang sering disebut orang bermata biru di Desa Bondo, Jepara. Menurut Hadi Prayitno, pengamat budaya dan pemerhati sejarah Jepara, orang bermata biru di Jepara mulai berkurang sejak tahun 1930-an.

campur Cina-Jawa disinyalir lebih banyak, ketika "*booming*" perdagangan candu di Jepara tahun 1880-an. Namun, ketika terjadi krisis, akibat ancaman keamanan dan proses perdagangan yang berubah dikuasai *juragan-juragan* lokal, kongsi-kongsi candu beserta keluarganya pindah ke Juana dan Rembang (*Opium* de Smokkelhandel ter Zee", t.t). Walaupun pada 1900-an, Cina di Semarang mulai melakukan perdagangan beras di Jepara sebagai reaksi kelangkaan beras akibat gagal panen (Alamsyah, 2015).

Beberapa bangunan yang menjadi karakter berpola Indis sebagaimana disebut sebelumnya merupakan petunjuk kuatnya pengaruh gaya Eropa. Pilar-pilar sebagai fungsi penyangga dan sekaligus penghias ruang utama pendapa menjadi salah satu karakter bangunan Indis. Kuatnya gaya Indis dalam pendapa ini kemudian disinyalir menjadi cara masuknya secara pelan-pelan budaya Eropa ke dalam persoalan lokalitas. Secara umum, orang-orang Eropa tidak pernah secara politik akan membentuk komunitas Eropa, tetapi dalam proses kolonialisasi di Jepara, orang-orang Eropa lebih banyak tinggal dan bercampur dengan kehidupan perdesaan. (Djoko Soekiman dan Bambang Purwanto, 2018: 137—151). Pada mulanya, kehadiran mereka di wilayah perdesaan hanya untuk kepentingan perkebunan dan aktivitas ekonomi. Lambat laun, hubungan ekonomi itu kemudian diperluas dan mendalam. Kasus Jepara, walaupun tidak secara jelas membentuk komunitas eksklusif di wilayah kota, tetapi mereka melakukan hubungan perkawinan dengan perempuan-perempuan lokal sampai pada tingkat desa, baik secara individual maupun keluarga. Munculnya "desa-desa Kristen", di sekitar wilayah Benteng Portugis, yaitu Desa-Desa Ujung Watu, Sambungoyot, Donorejo, Dukuh Seti, Kembang, Bondo, Kayuapu, dan Cumbring di samping sebagai pemasok tenaga kerja di perkebunan tebu, kopi, dan karet, juga sebagai tempat agama Kristen berkembang dan mengalami proses hibridisasi secara sosial maupun budaya pada masa kolonial.

Relasi "kosmopolis" kopi, karet, dan tebu itu mengalami proses hibridisasi dengan hadirnya komunitas *Indo*. Cerita dari masyarakat lokal mengingat "perempuan bermata biru" sebagai komunitas "baru" muncul di perdesaan. Di kota, Cina *Peranakan* dengan basis aktivitas ekonomi perdagangan membentuk permukiman *pecinan* (Claver, 2014: Purcell, 1981).

Di samping aktivitas ekonomi, peran misi dan *zending* memberikan informasi penting bagaimana perdesaan Jepara tidak hanya menghadirkan komunitas "baru", tetapi dalam perkembangannya memunculkan pola-pola hibrida dalam persoalan agama. Di Jepara kehadiran tokoh-tokoh misi dan *zending* sangat penting bukan soal bagaimana agama diperkenalkan dan bagaimana agama itu diterima oleh masyarakat pedesaan.

Tokoh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Sadrach memberikan stimulus hibridisasi Kristen-Jawa yang paling menonjol (Wolterbeek, 1995;

Guillot, 1985). Kiai Tunggul Wulung memiliki wilayah pekabaran Kudus, Pati, dan Jepara. Pola pemahaman Kristen yang dilakukan menggunakan adat dan tradisi Jawa yang disertai dengan cara mistik, *tahayul*, berdasar etika kejawaan. Kiai Tunggul Wulung ini kemudian lebih konsentrasi mengabarkan Injil di Desa Bondo. Kiai Tunggul Wulung ini berasal dari Semarang dengan gelar "Sis Kanoman", sang "Ajar Gunung Kelud" (Guillot, 1985) Begitu juga, orang bernama Pasrah yang membantu pengabaran Injil di Bondo (Wolterbeek, 1995). "Kristen Jawa" yang dikabarkan Kiai Tunggul Wulung, juga dilakukan oleh Kiai Sadrach, keduanya memiliki misi yang berbeda, dan Anthing. Hal yang sama dilakukan Coolen, misionaris Belanda yang menggunakan adat Jawa untuk mensinkretikkan Kristen (Sumartana, 1981).

Cara pengabaran Injil oleh Kiai Tunggul Wulung banyak yang menentang karena perilaku sosial termasuk "madat" sering dilakukan. Di sinilah, peran Kiai Sadrach lebih diperhatikan di Bondo pada khususnya dan Jepara umumnya. Sadrach memiliki penganut dan pengaruh yang kuat di Jepara. Hal ini karena cara dan perilaku yang digunakan berdasar tradisi Jawa. Kehadiran kembali Kiai Tunggul Wulung ditambah dengan tokoh-tokoh misionaris Hoezoo, Anthing, dan Jansz, maka Sadrach akhirnya harus keluar dari Jepara. Ajaran Sadrach tentang kekristenan sederhana dengan menggunakan kebiasaan dan adat Jawa sebagai saluran pengembangan ajaran Kristen. Oleh karena itu, ajaran Sadrach memiliki efek yang berbeda, yaitu hanya dapat berkembang di kalangan masyarakat perdesaan dan itulah mengapa desa-desa Kristen lebih banyak yang dapat menerima ajaran Sadrach, daripada kalangan elite termasuk penginjil Belanda (Guillot, 1985; Sumartana, 1993).

Dengan menempatkan dirinya sebagai "guru", Sadrach mengelaborasi ajaran-ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan budaya Jawa. Bagi Sadrach, Kristen dan Jawa adalah bangunan simbolik "Maneges Karsaning Pangeran" (Jalan Mengikuti Keinginan Tuhan). Dasar itu yang kemudian memberikan ruang masyarakat perdesaan untuk menghayati Kristen dari sisi kejawaan, *Pasamuan Kristen Jawa Mardika* (Kristen Jawa yang Merdeka) dan konsep "*Adatipun Tiyang Jawi Kedah Dipun Lampahi*" (Tradisi Jawa harus dilakukan) (Guillot, 1985: 199).

Hal yang berbeda dengan Cina, mereka membentuk komunitas eksklusif, Pacinan, yang letaknya berada di tengah kota berhadapan dengan pendopo kabupaten. Secara kultural dapat ditafsiri sebagai bentuk kedekatan Cina dan bupati. Hal berbeda dengan keluarga bupati yang sering berhubungan dengan orang-orang Belanda, terkait persoalan politik dan ekonomi daripada budaya (van Niel, 1960). Hubungan Cina dan Bumiputra pada masa kolonial memang tampak berbeda. Ada perubahan orientasi yang semua masih memiliki tradisi yang dapat berkembang dan berjalan dalam konteks hibrida, sebagaimana proses dan pengaruh Cina yang kuat sejak abad X dan terus tumbuh sampai

abad XVI, di mana ada kedekatan Cina dengan Islam, bahkan tidak mudah memisahkan antara Cina dan Islam pada masa itu. Namun, sejak VOC masuk dan dilanjutkan dengan pemerintah kolonial, tampaknya Cina ini memilih untuk berada dalam komunitas antara. Mereka menempatkan diri sebagai komunitas antara orang-orang Eropa dengan Bumiputra (de Graaf dan Pigeaud, 1984).

Kajian Cina di Pantai Utara Jawa menarik, terutama sebelum masa kolonial (de Graaf dan Pigeaud, 1984: Handinoto dan Suhartono, 2007). Hampir semua sektor merupakan bagian dari bagaimana Cina dengan segala tradisi dan keahliannya memasuki dan berkelindan dengan kejawaan dan keislaman. Sebagaimana disebutkan pada ulasan sebelumnya, Cina tidak hanya masuk dalam persoalan arsitektural, seni dan *stilisasi* ukir, menjadi dasar yang kuat hibridisasi Cina-Jawa, Cina-Muslim sangat kental di Jepara.

Hal yang sama antara Hindu-Jawa, Kristen-Jawa, bahkan Islam-Jawa menjadi konstruksi baru dalam hibridisasi di Jepara. Jepara pada akhir abad XIX dan awal abad XX menggambarkan polarisasi yang tidak jelas. Apa yang disebut Ricklefs sebagai polarisasi putihan dan abangan untuk membedakan antara komunitas yang dekat dengan tradisi pesantren dan komunitas petani yang miskin yang bertradisi agraris, menjadi kabur ketika melihat bagaimana pola-pola yang tampak dalam seni, arsitektural dan *stilisasi* ukir (Ricklefs, 2012). Bahkan dalam praktik keagamaan, tidak jelas bagaimana membedakan dua polarisasi dalam tradisi keagamaan di Jepara.

Pola putihan yang dianggap lebih dekat berorientasi santri, memiliki praktik-praktik yang juga dilakukan komunitas abangan. Surat-surat Kartini pada Stella Zeehandelaar, 1899—1903, banyak mengungkap kondisi Bumiputra yang tidak hanya dalam kondisi inferior di mana hanya ditempatkan dalam posisi di bawah orang-orang Eropa, juga ketidakjelasan struktur sosial yang dibuat hanya untuk menghormati golongan bangsawan dan kolonial (Yulianto, ed., 2004). Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial memang ada pembentukan struktur untuk menunjukkan strata sosial di dalam bayang-bayang kolonial. Namun, di sisi lain, Kartini juga mencoba dengan kesadarannya mendobrak struktur agama yang dipilah menjadi agama santri dan abangan (Yulianto, 2004). Bahkan, Kartini tidak sependapat bahwa pemahaman Islam tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan nalar biner, termasuk konsep perkawinan.

Di awal abad XX, persoalan santri dan abangan atau dalam istilah Ricklefs, putihan dan abangan sebenarnya hanya persoalan kerangka praktis yang tidak memiliki dasar historis yang kuat dalam tradisi Jepara. Kartini membela secara kultural berbagai konsep yang mencoba memberikan pemisahan dan sekaligus membedakan secara tegas unsur-unsur budaya dan agama (Toer, 2006: 269—270). Keragaman unsur, baik dalam seni,

arsitektural (pertukangan), *stilisasi* ukir, persaolan tradisi masyarakat petani miskin dalam memaknai siklus hidup sampai tradisi Eropa yang menempatkan dirinya dalam posisi superior, bagi Kartini adalah konstruksi kemajuan yang tidak dapat diberikan batas-batas pemilihan atas nama budaya, agama dan bahkan politik-ekonomi (Toer, 2006).

BAB IV
Hibridisasi dan Budaya Kritis

Bab ini merupakan perpaduan antara bab-bab sebelumnya yang merupakan penjelasan hasil proses sejarah panjang jalur rempah yang diteruskan dengan proses konglomerasi dan hibridisasi Jepara. Konglomerasi yang menjadi faktor penting dalam proses pertemuan berbagai bangsa, berlanjut dengan proses adaptif antaraspek yang terangkai dalam berbagai unsur. Seni, arsitektur, pola ragam hias, sampai hal-hal profesionalitas dalam pekerjaan teknik, kemudian menjadi awal bagaimana hibridisasi berkembang dalam tataran yang masif dan lokal.

Mudahnya relasi budaya terbangun di Jepara membuat hubungan sosial juga mengalami kemudahan, terutama dalam proses komunikasi sosial, transmisi pengetahuan sampai gaya hidup. Hal pokok yang perlu mendapat perhatian adalah munculnya transmisi pengetahuan yang mengerucut munculnya pemikiran kritis yang tertuang dalam pemikiran tokoh-tokoh nasional dari Jepara. Proses transmisi pengetahuan dan proses yang dihasilkan sebagai bentuk dialektik menjadi bagian pokok dalam bab ini.

A. Hibridisasi dan Munculnya Budaya Kritis

Kuatnya pengaruh budaya luar dalam kehidupan sosial budaya Jepara telah membentuk keragaman dan sekaligus pembedaan, terutama dengan daerah-daerah lain yang mengalami dampak, baik langsung maupun tidak, dari proses konglomerasi melalu kosmopolis rempah. Hal yang menarik dari dampak jalur rempah tersebut ketika Jepara menjadi bagian pengawasan Pemerintah Kolonial melalui sistem birokrasi kolonial (*Koloniale Beamstenstaat*) (Schrieke, 1929).

Pengaruh yang paling kuat pada tingkat lokal terutama dalam sistem birokrasi dalam praktik-praktik administrasi (Haga, 1929). Pada tataran lokal, sistem administrasi yang kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk Bumiputra untuk memasuki sistem administrasi Eropa. Untuk daerah-daerah yang memiliki otoritas lokal kuat, model birokrasi kolonial

ini kemudian menjadi tersubordinasi dengan sistem administrasi lokal atau Bumiputra. Berjalannya model birokrasi ini menempatkan elite lokal sebagai pegawai, dikarenakan sejak masa Tanam Paksa, seluruh elite lokal pada tingkat bupati menjadi bagian "mesin birokrasi" kolonial (Beamstenstaat) (Akhyat, 1994). Pada 1898—1910, pembatasan territorial semakin ketat khususnya di wilayah-wilayah yang akan menjadi "*pilot project*" dalam pengembangan administrasi kolonial (Haga, 1929). Berdasarkan Regentschaap Ordonantie (Staatblad 1924/79) seluruh proses bupati di Jawa harus mengikuti proses administrasi kolonial. (Akhyat, 1994).

Pada tataran budaya, pembangunan pendopo, alun-alun dengan berbagai ornamen baik berupa tanaman hidup maupun simbol-simbol otoritas menjadi paket bagaimana pengaruh Eropa, khsususnya Belanda mulai memasuki otoritas lokal. Sistem birokrasi yang terbentuk kemudian melahirkan priyayi-priyayi modern yang siap menjadi bagian dari struktur birokrasi kolonial (Sutherland, 1983). Dunia priyayi tampaknya juga menjadi bagian dari proses transmisi berbagai aspek dalam hibridisasi Jepara. Gambaran kehidupan priyayi yang menuntut kepatuhan dan *patron-clientship* sering menjadi dasar suatu komunitas yang didukung dengan budaya patrimonial, komunal dan relasi abdi-dalem (Kuntowijoyo, 2004)

Hubungan-hubungan yang sistemik tersebut kemudian menempatkan para priyayi sejajar dengan orang Eropa. Lepas dari komunitas yang komunal dan memiliki relasi abdi-dalem, dunia priyayi ini tidak hanya terjadi di kerajaan (*hinterland*), juga memasuki wilayah Pantai Utara Jawa, dunia pesisir. Apa yang oleh Kian dianggap sebagai proses sinergi elite dalam masa abad XVII—XVIII, menjadi hal yang penting untuk menghubungkan antara kolonialisme dengan struktur patrimonial ala priyayi (Kian, 2006).

Secara struktural, Jepara pada masa abad XIX—XX lebih tepat merupakan daerah yang berkembang dalam dua dunia, "dunia Eropa" dan "dunia Jawa". Pada posisi yang tidak tegas ini justru menjadi keberuntungan sendiri, bahwa Jepara merupakan wilayah yang secara kultural tidak mudah untuk diidentifikasi. Jika hal ini dikaitkan dengan proses konglomerasi dan hibridisasi, maka ada relasi kronologis yang membawa Jepara tidak mudah menentukan karakter yang kuat. "Dunia Eropa" dan "Dunia Jawa", tentu bukan bermaksud menghilangkan aspek dan unsur-unsur yang terlibat membentuk hibridisasi awal, Cina, India, dan Arab, misalnya. Namun, masa kolonialisme, kekuatan kolonial menjadi indikator bagaimana sinergi elite dapat terjadi dan hal itu yang mempermudah masuknya unsur Eropa pada tingkat lokal.

Jalur rempah yang kemudian memunculkan hubungan antardaerah di Pantai Utara Jawa dengan kegiatan pokok komersialisasi, mengalami perubahan dengan menempatkan modernisasi sebagai proyek kolonial di

Jawa dan khususnya di Jepara (Nagtegaal, 1996; Nas, 1986; Colombijn, 2010). Pada tingkat lokal, modernisasi ini ditangkap oleh para priyayi dijadikan sebagai peluang bagaimana menghadirkan modernisasi pada tingkat lokal. Konsep kota, misalnya, kemudian menjadi salah satu media bagaimana modernisasi ditempatkan. Konsep kota ini, jika dilihat dalam konsep kota kolonial sering dipahami sebagai kotapraja (*Gemeente*) (Colombijn, 2010). Jepara tidak termasuk dalam daerah yang dibentuk menjadi *Gemeente*. Namun, akibat terbentuknya *Gemeente* sebagai konsep "kota baru", Jepara mulai merasakan dampaknya dengan proses urbanisasi dan migrasi ke kota, terutama Semarang (Ingleson, 1986).

Hubungan desa-kota kemudian menjalin hubungan sosial dan budaya dengan berbagai sarana dan prasarana. Transportasi, komunikasi, edukasi sampai munculnya spesialisasi dan birokratisasi yang lebih mendahulukan kaum terpelajar (Sutherland, 1983; van Niel, 1960). Proses budaya yang berkembang sangat jauh dari apa yang dipikirkan priyayi Jawa yang masih hidup dalam dunia feodal. Para priyayi di Jepara merespons perkembangan tersebut melalui berbagai reaksi. Sebagian besar masih dalam konteks feodal-priyayi yang mempertahankan relasi-relasi patrimonial dan komunal. Begitu pun cara-cara yang dipakai dalam mempertahankan posisi seperti itu menggunakan berbagai saluran, termasuk melakukan proses mengadopsi pola tradisi Eropa sebagai cara hidup sejajar dengan berbagai simbol dan atributnya. Simbol dan atribut sebagai sebuah *prestige* dan tanda kehormatan termasuk kelengkapan rumah tangga dan kewibawaan tradisional lainnya menjadi cara mendudukkan posisi sejajar dengan pemerintah kolonial (Jaquet, 1987). Ilustrasi kehidupan priyayi yang lebih mendekat ke gaya Eropa menjadi persoalan tersendiri bagi priyayi lain, sebagaimana Kartini.

Kartini hidup dalam dua dunia, dunia priyayi-feodal dan kolonial-rasional. Kegelisahan terhadap lingkungannya mulai tampak pada saat berusia 20 tahun dengan selembar surat yang dibuat pada 15 Maret 1899 (de Hollandsche Lelie, 15 Maret 1899). Kegelisahannya tersebut kemudian disalurkan melalui dialog dengan teman koresponden di Negeri Belanda. Hampir tiap bulan Kartini menulis surat kepada sahabatnya Stella Zeehandelar dan R. M. Abendanon-Mandri. Surat-surat yang terkirim antara 25 Mei 1899 sampai 13 Agustus 1900, tidak selalu atas nama Kartini, terkadang menggunakan nama bertiga, yaitu Kartini, Rukmini, dan Kartinah (Jaquet, 1987). Pada 1902, merupakan tahun Kartini paling banyak mengirim surat, ada satu surat yang mencapai 15 halaman.

Berbagai aspek ditulis dan didialogkan dengan teman korespondennya. Hal menarik yang paling banyak ditulis adalah persoalan posisi perempuan, pendidikan, dan agama. Persoalan posisi perempuan, pendidikan dan kemodernan paling banyak ditulis pada 1902. Bisa jadi, Kartini mencoba

mengkritisi Politik Etis tahun 1901 yang dinilai tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan.

Membaca Kartini dalam konteks kolonial memang tidak mudah dan tidak dapat menjadi cara untuk menyimpulkan dari kompleksitas Jepara. Melalui berbagai ragam surat baik melalui Stella maupun Abendanon, kita mendapatkan data bagaimana Jepara akhir abad XIX dan awal abad XX merupakan daerah yang memiliki kompleksitas hibridisasi. Relasi birokrat-rakyat menjadi perhatian Kartini. Proses sinergi elite yang muncul pada akhir masa konglomerasi ternyata berlangsung terus sampai masa hibridisasi. Hal itu memungkinkan adanya kesenjangan dan praktik maladministrasi akibat pola hidup yang dekat dengan tradisi Eropa.

Di samping hubungan birokrat-rakyat yang mengalami kesenjangan, Kartini juga memperhatikan adanya patologi sosial dengan semaraknya minum *opium* (candu). Modernisasi yang oleh pemerintah kolonial menggunakan pendidikan sebagai salah satu metodenya, hanya berlaku bagi kelompok priyayi. Konsep modern dalam pikiran Kartini lebih mengarah pada cara-cara bagaimana proses "pembaratan" yang kemudian menjadi kesejajaran dan kesetaraan adalah pola hibridisasi yang perlu mendapat perhatian.

Kartini melalui Marie Ovin-Soer, seorang istri *kontroleur* Jepara dan merupakan pegawai *Binnenlandsch-Bestuur* (pejabat birokrasi). Pertemuan dan proses belajar yang diperoleh melalui Marie ini kemudian menghantarkan Kartini pada penguasaan bahasa Belanda dan tradisi-tradisi Eropa. Diskusi tentang kesetaraan semakin tajam ketika Kartini berkenalan dengan pegawai kantor pos di Amsterdam, Stella Zeehandelaar. Perkenalannya dengan Stella, Kartini mencoba memberanikan diri untuk mengungkap berbagai aspek yang sedang berlangsung dan dialami bangsanya.

Mulai relasi birkorat-rakyat, praktik maladministrasi birokrasi, patologi sosial, persoalan ketegangan priyayi-petani sampai persoalan bagaimana dimungkinkan adanya negosiasi kultural terkait posisi koloni, feminisme, dan *apartheid* (Surat Tanggal 25 Mei 1899, 20 Mei 1901, 14 Maret 1902. Yulianto, *ed*., 2004). Kegelisahan Kartini bisa jadi merupakan pemikiran terbuka tentang dunia kolonial yang dialami di dalam lingkungannya, Priyayi Jepara. Konsep-konsep kesetaraan dan emansipasi menjadi cara berpikirnya untuk menceritakan bagaimana proses sosial di lingkungan terjadi. Tidak ada surat yang mencoba melawan bentuk-bentuk eksploitasi kolonial, justru lebih banyak bercerita tentang agama yang didiskusikan dengan Stella (Yulianto, ed., 2004: 31—33). Para priyayi dan bahkan agama seolah yang menjadi persoalan bagi kemajuan bangsa. Dunia priyayi menjadi perhatian yang besar ketika keinginan memajukan bangsa terhambat. Patrimonialisme dengan merunduk pada pemerintah Belanda menjadi perhatian Kartini

ketika praktik-praktik kolonial tidak lain justru memperkuat kedudukan kelompok bangsawan birokrat. Cara membaca dengan melepaskan diri dari dasar budaya yang membentuknya tersebut, menjadikan Kartini memiliki kemampuan tidak hanya mengkritisi praktik kolonial, tetapi juga perilaku koloni, bangsa Jawa, yang sering tampak melebihi kolonial.

Perkenalannya dengan Islam, mengubah sudut pandang Kartini. Tahun 1892, Kartini belajar Islam yang diperkirakan baru berusia 13 tahun. Perkenalannya dengan Islam juga memberikan dasar-dasar konseptual apa yang disebut praktik eksploitatif (*al-dhalimiin*), ketidaksetaraan (*al-Dhalliiin*), dan emansipasi *(al-Rahman al Rahim*). Pengaruh Islam dalam diri Kartini ini justru tidak menjadi dasar bagaimana unsur-unsur Eropa harus selalu disingkirkan. Pengenalan dengan Islam lebih jauh menjadi cara bagaimana Kartini mendiskusikan berbagai hal kepada sahabat penanya.

Islam dan Eropa adalah kemajuan, di sini Kartini disadari atau tidak, terjebak dalam argumentasi yang terbalik-balik. Jika keduanya kemajuan, apa yang dipersoalkan tentang kesetaraan dan hibridisasi. Sejak awal Kartini juga menyalahkan perilaku birokrat Jawa yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia priyayi, patrimonial, komunal, dan kawula-gusti.

Agama yang selama ini dipahami sebagai cara mencari solusi, justru digunakan orang-orang yang beragama untuk kepentingan yang jauh dari tujuan agama itu sendiri. Idealisme agama yang kemudian dieskplisitkan pada perilaku orang beragama tentu tidak dapat dijadikan argumentasi. Banyak variabel yang menjadikan orang beragama melakukan sesuatu yang dianggap di luar agama. Kritik Kartini, tentu bukan yang dimaksud Islam, tetapi bagaimana sebenarnya pemahaman agama Islam dalam kehidupan sosial. Pada tataran sosial, ada berbagai variabel yang tampaknya tidak banyak dikupas Kartini. Kehidupan priyayi Jawa yang menganut beragam kepercayaan, termasuk Islam tidak pernah menjadi perhatian Kartini, kecuali ketika agama dijadikan alasan untuk sebuah perkawinan.

Tanpa mengusik perilaku priyayi yang sezaman dengan Kartini, dia menikmati tradisi priyayi yang berupa tontonan wayang dan musik gamelan Jawa. Dengan memperhatikan bagaimana wayang hidup dalam masyarakat Jepara, baik dalam seni, arsitektural dan kepercayaan komunitas Jepara, maka wayang dianggap menjadi bagian dari proses hibridisasi Jepara. Kartini tidak pernah melakukan eskplorasi perilaku priyayi melalui tradisi wayang. Atau paling tidak, belum ditemukan bagaimana priyayi Jepara mengelaborasi wayang sebagai ajaran. Kartini tidak mencari persoalan pada wayang ketika berhadapan dengan dunia priyayi di mana wayang adalah salah satu pandagan hidup priyayi Jawa (Angst, 2007; Geertz, 1960)

Kartini besar dan tumbuh dalam keluarga tradisi feodal-mistis dengan menjunjung nilai-nilai kepatuhan dan *patron-clientship* (Sutherland, 1983).

Kritik Kartini terhadap tradisi feodal-mistis itu tertuang dalam berbagai surat yang ditujukan ke sahabat penanya baik Abendanon (Jacquet, ed., 1987), maupun Zeehandelaar (V.I. Yulianto, terj., 2004).

Pemikiran dan kritik Kartini tentu muncul bukan tanpa sebab. Memasuki abad XX, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi kebijakan terkait rencana membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi, politik, dan pemerintahan (Nas, 1986). Pada awal abad XX, rencana tersebut kemudian melahirkan konsep "kota modern" atau apa yang disebut dengan *Gemeente* (Nas, 1986). Melalui *Gemeente* atau kotapraja, pemerintah kolonial membangun modernisasi dan urbanisasi berbasis kota. Kebijakan tata ruang (*ruimtelijk beleid*), perumahan, *public housing* (*woongebied*; *volkshuisvesting*), pembangunan perkampungan (*kampongverbetering*), fasilitas kota, sampai program komersialisasi, pendirian sekolah, rumah sakit, dan surat kabar (Colombijn, 2010; Nas, 1986; Flieringa, 1930). Surat kabar dan kemudian jaringan pos yang menjadi fasilitas transmisi seorang Kartini melakukan korespondensi dengan sahabat penanya.

Kartini hidup dalam dua "dunia": tradisi dan modern. Dia melakukan dialog kultural sangat intensif melalui persepktif "transnasional" dengan membayangkan Jawa adalah "Eropa". Atau bagaimana menempatkan Jawa sejajar dengan Eropa (Surat tanggal 17 Oktober 1902). Tulisan-tulisan Kartini selalu menjadi *headline* di surat kabar *De Hollandsche Lelie*, pada 1890-an. Dia tidak hanya gelisah pada lingkungannya, tetapi juga melihat sisi lain bahwa transnasional pada tingkat lokal memiliki sisi lain yang membuat "gelisah" kelompok elite lokal (Jaquet, ed., 1987, surat tanggal 15 Maret 1899). Hampir tiap bulan melakukan komunikasi melalui surat (Stella zeehandelar, 25 Mei 1899; R.M. Abendanon-Mandri, 13 Agustus 1900). Walaupun terkadang atas nama bertiga (Kartini, Rukimini da Kartinah). Surat terakhir September1904 (Jaquet, 1987). Kartini hadir sebagai "penghubung" antara dunia feodal dan modern dengan "Nalar Kritis" pada usia dini, 20 tahun. Sebuah dialog kultural yang menjadi puncak transnasional di Jepara pada masa kolonial.

Kedekatan dengan KH Saleh Darat, sejak usia 13 tahun,1892, memberikan dasar-dasar "nalar" Islam melalui kajian tafsir Al-Qur'an. Kartini juga sering nonton wayang di pendapa dan menari pada akhir bulan. Perpaduan antara "tafsir" Al-Qur'an, "dunia feodal" dan "ajaran kejawaan" itu telah melahirkan nalar profetik Kartini yang menembus batas-batas struktur budaya yang ketat. Nalar profetik ini kemudian menjadi cara Kartini menggunakan sekolah (klasik dan vokasional, membatik) sebagai metode penalaran yang efektif. Ada kalimat penting yang menjadi kritik transnasional Kartini " ... di Bumiputra sini, syukurlah kami belum berperang melawan minum-minuman keras, minuman setan—tapi aku khawatir jika saat itu tiba—wallahu a'lam—

peradaban barat sudah tumbuh di sini berarti kami juga akan menghadapi setan itu" (25 Mei 1899).

Kalimat di atas dapat dimaknai sebagai cara bagaimana Kartini tidak hanya gelisah dalam menghadapi perubahan budaya dengan mulai terkikisnya budaya Jawa, tetapi juga mengisyaratkan bagaimana Kartini mencoba larut dan mengalir dengan budaya modern barat sebagai ekspresi emansipasi tradisi dalam modernisasi atau yang disebut hibridisasi budaya sebagai solusi transnasional lokal di Jepara. Kegelisahan Kartini jika dirunut semakin jauh, baik secara temporal maupun jangkauan hibridisasi budaya, semakin jelas terjadi di Jepara. Bertahannya "desa-desa" Kristen yang menjadi tempat orang-orang Eropa melakukan proses integrasi budaya menjelaskan adanya relasi-relasi yang kuat antara "agama modern" dengan "desa tradisional". Proses perkawinan campur antara perempuan Jawa dengan laki-laki Eropa menjadi proses penyebaran Kristen di Jepara.

Sampai awal abad XX, hibridisasi dalam tingkat lokal, semakin menyempit dan dimaknai secara politis. Tradisi Barat (Eropa), Jawa (Timur), dan Islam kemudian menjadi semakin terbatas hanya dalam persoalan penghargaan pada kesetaraan dan emansipasi (Surat tanggal 25 Mei 1899). Hibridisasi pemikiran kritis kemudian berlangsung dalam kegelisahan dan justru pada tingkat kalangan bangsawan Jepara.

Perubahan makna hibridisasi yang kemudian menjadi cara untuk mengkritik kondisi feodalisme dan patrimonial lokal semakin menjauhkan apa yang pernah dibangun dalam proses panjang Jepara, kosmopolitanisme, dan hibridisasi. Kartini bukan lagi seorang yang mampu memahami kemajuan barat dengan konsekuensinya, lebih jauh dia mendobrak otoritas lokal yang justru menghambat hibridisasi dalam tingkatan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu strategi untuk keluar dari kungkungan feodal dan membangun kembali kemajuan yang pernah hadir di Jepara.

Di Jepara pada awal abad XX, pemikiran kritis juga keluar dari tokoh R. M. Sosrokartono dan Dr. Cipto Mangunkusumo. R. M. Sosrokartono dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak besar pengaruhnya di Jepara, tetapi lebih kuat pengaruhnya di luar Jepara. Penguasaan dan pemahaman ilmu pengetahuan menjadikannya sebagai orang yang memiliki kemampuan menerjemahkan kolonialisme melalui tafsir budaya Jawa dan Islam. Hal yang berbeda adalah seorang Dr. Cipto Mangunkusumo yang menjadi salah satu tokoh Budi Utomo yang berkemajuan dan kritis.

Di sisi lain, kedekatan orang Cina dan bupati, tidak dilanjutkan oleh keluarga bupati dan hal ini memberikan petunjuk ada persoalan orientasi politik di tingkat elite yang berpengaruh pada perkembangan transnasional di tingkat lokal. Kartini sebagai salah satu tokoh kritis mencoba melakukan

politik "menikung" atas kebijakan kolonial Belanda (Jacquet, 1987) yang hidup di tengah-tengah formasi masyarakat kosmopolitan awal abad XX.

B. Kosmopolis Rempah dan Identitas Lokal

Kosmopolis rempah sebagaimana yang terjelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, tidak hanya memberi petunjuk kuatnya pengaruh berbagai unsur dalam budaya tempatan, Jepara, tetapi justru bersinergi dan mewujud baik dalam budaya yang nyata (*tangible*) maupun nirnyata (*intangible*). Relasi dan proses munculnya hibridisasi yang merupakan akibat yang paling mudah diidentifikasi dibangun melalui berbagai sarana dan media. Hampir seluruh proses hibridisasi tidak mencirikan identitas tunggal, identitas tempatan, tetapi selalu mengalami proses absorbsi dan adaptasi yang sempurna. Identitas kemudian merupakan realitas yang hibrida dengan warna dan unsur yang terus mengalami perubahan.

Mempertimbangkan berbagai proses sejak munculnya konglomerasi dan kosmopolis rempah Jepara khususnya dan Pantai Utara Jawa pada umumnya, memberikan dorongan kuat terjadinya konstruksi budaya baru termasuk tradisi kritis. Bahkan, hibridisasi lebih jauh memberikan bukti bahwa lokalitas, atau tempatan, tidak lagi menjadi perbincangan yang penting jika hanya mencari "keaslian" suatu budaya tempatan (Kipp, 1993). Identitas dalam konteks lokal dapat terbentuk dalam proses sejarah panjang dengan melibatkan berbagai pelaku yang beragam. Apa yang disinyalir akan memunculkan perbedaan yang menyolok (*process of contrast*), tetapi dalam kasus kosmopolis rempah Jepara justru tidak terjadi apa yang oleh Kipp dinilai sebagai identitas yang terkoyak (*dissociated identities*) (Kipp, 1993:5). Kipp lebih jauh menjelaskan bahwa ketika muncul proses hibridisasi, maka sebagian besar unsur-unsur dalam ikatan nilai, hierarki, kekuasaan akan mengalami pemisahan masing-masing unsur dan berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena keterikatan asosiasi budaya superior (kolonial) atas budaya yang dianggap inferior (koloni).

Di sini perlu adanya kehati-hatian dalam menjelaskan proses hibridisasi ketika dikaitkan dengan proses kosmopolis rempah yang dibangun sejak masa prakolonial. Kosmopolis rempah yang melahirkan hibridisasi justru diakui atau tidak menjadi bukti adanya penolakan terhadap adanya superioritas di satu sisi dan inferioritas di sisi lain. Bahkan, dalam pandangan poskolonial, keberadaan dua kutub, superioritas dan inferioritas sebenarnya hanya merupakan hasil perbincangan kewacanaan (*discourses*) yang jauh dari realitas yang sebenarnya . Unsur-unsur artefak sampai kehadiran Kartini di Jepara bukan dibangun atas dasar kewacanaan yang membedakan secara tegas antara kolonial dan koloni, tetapi justru mengaburkan keduanya dan larut dalam tradisi hibrida yang membentuk tradisi tempatan Jepara yang

khas (Bijl dan Chin, 2020; Vissia, terj., 2004).

Harus diakui, proses konglomerasi dan kosmopolis rempah Jepara ini dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur asing. Berbagai unsur memang sangat berpengaruh pada terbentuknya budaya hibrida di Jepara. Terlebih ketika Jepara memasuki proses kolonialisme. Kartini mewakili generasi yang dibentuk dalam tradisi hibrida, tetapi proses panjang kosmopolis rempah lebih kuat memberikan karakter kuat Kartini (Bijl dan Chin, 2020; Vissia, terj., 2004). Paling tidak, masuknya sistem kolonial sebagai bentuk pengenalan budaya dan pola baru dalam struktur sosial-budaya yang feodalistik menjadi unsur penting mengapa Kartini hadir.

Kosmopolis rempah membuka isolasi kultural pada tingkat lokal Jepara. Pada masa kolonial, sekat-sekat budaya semakin longgar dengan masuknya unsur-unsur modernitas, khususnya masuknya sistem monetisasi dan komersialisasi yang memperluas bentuk-bentuk jaringan, baik vertikal maupun horizontal (Schrieke, 1929: 239—241). Memang tidak dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh, pada kasus-kasus tertentu, misalnya, pola birokrasi dan administrasi yang bercorak feodal-monarkis semakin terdesak oleh sistem birokrasi kolonial (Schrieke, 1929).

Kosmopolis rempah Jepara mengalami proses yang unik. Ia berproses jauh sebelum modernitas Barat yang dibentuk kolonial Belanda memasuki wilayah Jepara khususnya dan Indonesia umumnya. Bisa jadi, kolonialisme Belanda terutama tidak memperhatikan dan/atau sengaja untuk menghilangkan proses kosmopolis rempah yang telah mengantarkannya ke Indonesia. Sangat dapat dinalar, ketika kolonial Belanda membentuk sistem yang kemudian diklaim sebagai bentuk "modernisasi" baru, menjadi rujukan yang strategis. Atas nama "modernisasi", kolonial Belanda melakukan rekonstruksi wilayah koloni, Indonesia, yang dianggap wilayah berbudaya rendah (inferior), terbelakang dan perlu dibangun. Tampaknya dalam kajian sejarah rempah di Indonesia, sudut pandang ini selalu dijadikan dasar untuk merekonstruksi sejarah Nasional Indonesia.

Pandangan dan perspektif sejarah dengan mendasarkan pada titik awal kolonialisme Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, tentu menghilangkan proses panjang yang membentuk jalur rempah berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa. Cara melihat kosmopolis rempah yang demikian, bisa jadi karena sudut pandang kolonial-sentris yang masih kuat dalam tradisi penulisan sejarah modern Indonesia. Sejarah rempah yang menjadi salah satu pembentuk identitas keindonesiaan tidak pernah menjadi bagian penting dalam menjelaskan konstruksi awal keindonesiaan.

Di sinilah penempatan sejarah rempah sebagai konstruksi kosmopolis rempah yang kemudian disusul dengan proses hibridisasi dapat menjadi penjelas kuatnya jejaringan antarbangsa dan antarwilayah yang pernah

hadir dengan jejaring yang rumit dan unik. Berbagai media dan unsur telah membentuk pola jejaring dengan karakter yang kuat. Hibridisasi kemudian menjadi *taken for granted* ketika proses-proses kosmopolis telah membuka pertemuan antarbangsa yang akhirnya membentuk budaya tempatan yang khas.

Lepas dari perdebatan dominasi dan hegemonisasi, hibridisasi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan identitas. Pembacaan artefak dengan unsur-unsur Cina-Jawa, Arab-Cina, dan Eropa-Jawa, misalnya, menunjukkan relasi-relasi identitas yang terbangun tanpa batas dan halus (de Graaf dan Pigeaud, 1984). Situs, *medalion*, benteng sampai berbagai motif seni ukir menjadi karakter kuat identitas Jepara bukan karena dibangun atas dasar ke-lokal-an, tetapi justru terbentuk dari berbagai pengaruh tanpa sekat-sekat yang jelas. Peleburan identitas dalam berbagai media kemudian menjadikan dasar bahwa kosmopolis rempah secara tegas menjadi cara yang tepat untuk merunut lokalitas dan tradisi tempatan.

Kecenderungan untuk menempatkan budaya tempatan sebagai ekspresi lokalitas dengan atau tanpa melibatkan budaya *liyan (the others*) sudah seharusnya menjadi cara menguji apa yang disebut kearifan lokal (*local wisdom*). Atau, kearifan lokal itu sendiri merupakan hasil proses panjang sejarah yang membangun karakter lokalitas. Jika demikian, identitas sebagai penguatan lokalitas dapat dirujuk dari proses terbentuknya lokalitas dengan berbagai konsekuensi dan risikonya. Pertanyaan yang sulit dijawab tentu saja, batas-batas mana yang dianggap merupakan pembentuk lokalitas? Jepara dalam konteks ini, terutama dikaitkan dengan pembentukan kosmopolis rempah sampai munculnya modernitas pada tingkat lokal berproses bukan pada poros budaya yang tunggal. Jepara menjadi daya konsentris dari berbagai budaya yang menempel pada berbagai unsur dan media. Bahkan, dalam kasus seni ukir, misalnya, lokalitas tidak hanya tidak mungkin dipilah-pilah, tetapi justru menjadi penguat proses kosmopolis dalam pembentukan identitas Jepara.

Hal yang berbeda ketika Jepara mengalami kolonialisme Eropa. Sebuah proses yang sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum secara resmi sebagai periode kolonial. Temuan dan kunjungan orang Eropa ke Karimunjawa, Jepara, yang dimulai jauh sebelum masa kolonial, dan berlanjut sampai masa kolonial. Sebenarnya pertanyaan besarnya tertuju pada apa batas-batas suatu wilayah sudah dikatakan terkolonialisasi. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian kosmopolis rempah tentu saja membutuhkan kajian lebih lanjut dan luas. Apalagi kosmopolis rempah sejak prakolonial yang kemudian dilanjutkan masa kolonial memberikan sisa-sisa yang membentuk budaya hibrida.

Budaya hibrida ini yang kemudian terdefinisi sebagai budaya saling adaptif dan berkelindan dengan berbagai unsur menjadi narasi lain

dari kolonialisme yang menjadi persoalan dalam proses hibridisasi. Kolonialisme kemudian menjadi "hal lain" yang tidak relevan dalam konteks kosmopolis rempah. Bahkan, dalam proses kosmopolis dan hibridisasi justru menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang sering ditujukan pada kolonialisme. Pada awal abad XX, kolonialisme menjadi satu-satunya bentuk ideologi politik yang tidak pernah ditempatkan dalam proses hibridisasi. Dengan demikian, hibridisasi yang juga berproses pada masa kolonial tidak pernah menjadi bagian penting bagaimana lokalitas terbentuk. Paling tidak Kartini menolak bahwa kolonial adalah *liyan* (*the others*), sehingga Kartini mencoba membangun hibridisasi melalui cara berpikir modern dengan mengambil ide modernitas kolonial untuk merekonstruksi lokalitas yang feodalistik. Akan tetapi, tetap tidak mudah untuk lepas dari ikatan feodalisme Jawa.

Lepas dari dua himpitan, kolonial dan feodal, Kartini memiliki kemampuan mengadopsi dan sekaligus beradaptasi dengan modernitas yang justru dibawa oleh kolonial yang menjadi beban dalam struktur budayanya.

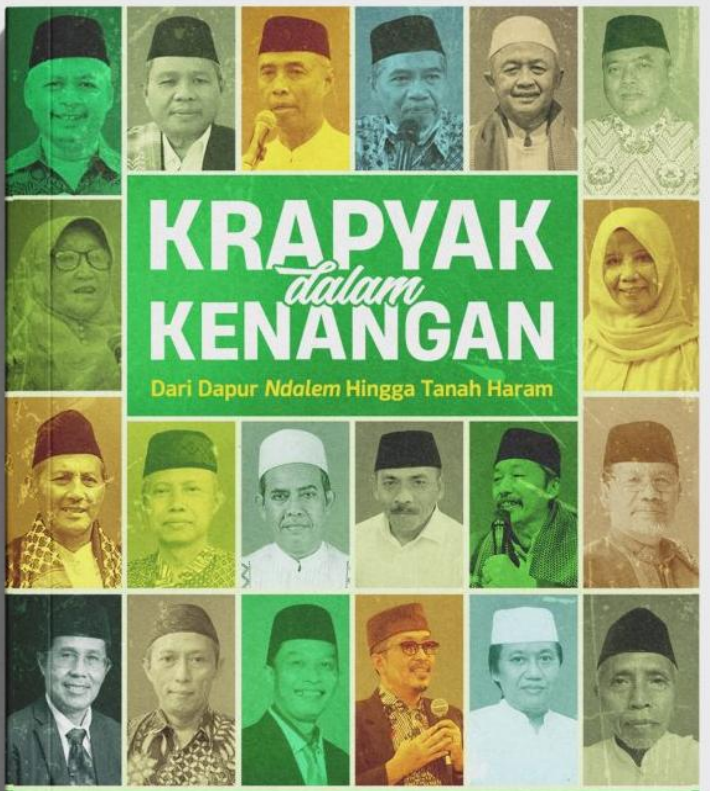

KRAPYAK *dalam* KENANGAN

Dari Dapur *Ndalem* Hingga Tanah Haram

Arif Akhyat, dkk. (ed.)

Drs. KH. Asyhari Abta, M.Pd. | Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, M.Hum. | Drs. KH. Henri Sutopo | Dr. KH. M. Habib Abdusy Syakur, M.Ag. | KH. Ihsanuddin Muslim, Lc., M.Pd.I. | Drs. KH. Haidar Idris | Nyai. Hj. Ida Fatimah, M.Si. | Drs. KH. Mas'ud Masduqi | Drs. KH. Muhtarom Busyro, M.Si. | KH. R. Abdul Hamid Abdul Qodir | Drs. KH. Maimun Mabarun | Drs. KH. Shodiq Mubasyir | Dra. Nyai Hj. Ida Rufaida | Dr. KH. Muhtarom Ahmad, M.Si. | Prof. dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK | K.H. Afif Muhammad, M.A. | Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. | Prof. Dr. H. Mustaqim, M.Ag | KH. Afifudin Chanif Al Hasani | Drs. KH. Moh. Adib

BAB V
Kesimpulan

Jepara yang terletak di Pantai Utara Jawa sebagai kota kecil yang dilalui jalur rempah mengalami proses kosmopolitanisme yang kemudian berlanjut proses hibridisasi. Relasi-relasi kosmopolis yang dibangun jauh sebelum kolonial memberi dasar-dasar dinamika dan dialektika sosial budaya yang kemudian menghasilkan budaya hibrida. Jepara dibangun bukan pada tataran lokal, tetapi sebuah jaringan global yang membentuk pola-pola hibrida selaras dengan munculnya berbagai karya seni, arsitektural dan ukir, bahkan beberapa kasus masuk dalam persoalan hibridisasi agama.

Transnasional dan konglomerasi sebagaimana yang dipahami sebagai "*a big project*" imperalisme Eropa bukanlah kesimpulan yang merujuk pada proses dan jaringan jalur rumpah di Nusantara. Jepara telah membangun relasi-relasi ekonomi yang jauh sebelum Jawa menjadi wilayah dan pusat pemerintah kolonial Belanda. Sebagai jalur rempah tidak langsung, Jepara sendiri memberikan stimulus perkembangan ekonomi di Pantai Utara Jawa. Hal ini dikarenakan adanya kekuatan pengaruh dari letak yang strategis. Berbagai bangsa hadir tidak hanya melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga mereka melakukan eksplorasi sumber-sumber budaya untuk dapat masuk dalam budaya tempatan yang khas.

Aktivitas ekonomi yang dimulai abad VIII dan berlangsung sampai masa kolonial, menunjukkan posisi Jepara telah melampaui wilayah lain dalam merespons perkembangan jaringan global di Pantai Utara Jawa. Adaptasi, resepsi, dan hibridisasi menjadi konsekuensi bagaimana Jepara melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan "kosmopolisme" pada tingkat lokal. Suatu hal yang tidak pernah dipikirkan para sejarawan bahwa memperhatikan proses dan jejaring ekonomi (rempah) pada masa prakolonial telah ditemukan berbagai pembuktian yang kuat adanya pembentukan wilayah kosmopolis dan emporium pada tingkat lokal.

Kosmopolitanisme dan hibridisasi adalah dua hal yang terbentuk jauh sebelum masa kolonial. Pandangan kolonial-sentris yang selama ini

mengikuti alur kosmopolis rempah sejak masa kolonial di Nusantara sudah harus dibaca ulang. Ada proses yang hilang dalam merekonstruksi kosmopolis rempah di Nusantara. Aspek-aspek prakolonial yang justru menjadi latar belakang dan pemerkuat konglomerasi yang jelas, tidak pernah menjadi perhatian ketika merekonstruksi jalur rempah.

Kasus Jepara pada khususnya dan Pantai Utara Jawa pada umumnya, menunjukkan adanya proses yang tidak hanya berupa terbentuknya kosmopolis rempah, tetapi lebih jauh telah melahirkan budaya hibrida yang kompleks. Berbagai bentuk seni arsitektural Hindu-Islam, Islam-Jawa, Indis, komunitas Indo, simbol dan budaya keberagamaan yang sangat jelas. Hibridisasi kemudian tidak hanya menjadi media bagaimana kompleksitas lokalitas bertemu dengan unsur-unsur asing. Pertemuan unsur-unsur lokal dan asing dalam berbagai bentuk telah membentuk karakter Jepara dengan budaya terbuka, dan saling memengaruhi.

Keserasian proses kultrural dan bahkan keagamaan tersebut menjadikan budaya Jepara tidak mudah melahirkan konflik. Pada masa kolonial, gerakan resistansi yang sering tergambarkan dalam sejarah perdesaan Jawa, tidak dialami Jepara. Kosmopolitanisme yang dikemas dalam budaya hibrida, paling tidak menjadi jalan menuju terbentuknya komunitas lokal kosmopolis dengan tidak serta merta menghilangkan karakter budaya tempatan yang khas.

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

IKAPETE DIY

Mutamar
PEMIKIRAN K.H. HASYIM ASY'ARI
Tentang Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat

JUM'AT
20 September 2024

Pukul
13.00 WIB

Auditorium Gedung K.H.A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu UII

Keynote Speaker :

K.H. Abdul Hakim Mahfudz
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng

Pemateri :

Alissa Wahid, S.Psi., M.Psi.
Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia

Prof. Dr. **Zuhri,** S.Ag. M.Ag.
Dosen UIN Sunan Kalijaga

Dr. **Arif Akhyat,** M.A.
Dosen Universitas Gajah Mada

Dr. **Muhammad Roy Purwanto,** S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII

LIVE STREAMING
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

UII

fiai_uii
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Tautan Pendaftaran: bit.ly/halaqah-ikapete-diy
Kontak Person: 0881 667 0575 (UII)

Daftar Pustaka

A Collection of Voyages undertaken by Dutch East India Company, Terjemahan, British: W. Freeman, 1703

Abdurrahman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe; Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Agustinus Supriyono, 2007, "Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-Pemogokan pada zaman Kolonial Belanda, Revolusi dan Republik 1900-1965", *Proefschrift Ph.D. Thesis*, Amsterdam: Vrije Universiteit.

---------, 2013, "Tinjauan Historis Jepara sebagai Kerajaan Maritim dan Pelabuhan", *Paramita*, vol. 23, no. 1, Januari.

Alamsyah, 2015, "Aktivitas Perdagangan di Karesidenan Jepara, 1843-1891", *Paramita*, vol. 25 (1).

Angst, Walter, 2007, *Wayang Indonesia : The Fantastic World of Indonesian Puppet Theatre*, Konstanz, Verlag Stadler.

ANRI, *Citra Kabupaten Jepara dalam Arsip*, Jakarta: ANRI, 2017.

Arif Akhyat, 2015, "Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990-an", *Humaniora*, vol. 27, no. 2, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Arif Akhyat, 2020, "Komunitas Pertanian Kota Semarang, 1880-an-1940-an", *Disertasi Doktoral* Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Arsip Daerah Jawa Tengah, De Hoofd Inspectuer Chef v/d Dients, V/H Boschwezen, *Naturlijke Rebioisatie of Het Moeriagebergte, Residentie Japara*, Batavia: F.B. Smits, 1902

---------, "*Geillustreerd Bendingblad*", vor het Huisgezin, orgaan van het Java Comite, Januari dan Februari 1873

----------,"Harleian" of "Dauphin", Mappemonde Dauphin-French Dieppe

School (London: British Museum Library Collection)

Arsip Daerah Jawa Tengah, I,Z., "*Opium* de Smokkelhandel ter Zee", t.t.

Atlas van Tropisch Nederland: Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in Samenwerking met den Topografischen Dients in Nederlandsch-Indie

Bambang Purwanto, " The Economy of Indonesian Smallholder Rubber, 1890-1940", dalam Linblad, Th. J., *ed*., *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890-1990s, Proceedings of the Colloquium*, Amsterdam: 1994.

Bhabha, Homi K., 1984, "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse", *Discipleship: A Special Issue on Psychoanalysis*, vol. 28, Massachussette: MIT Press.

---------, 1994, *Location of Culture*, London and New York: Routledges Classic.

Boeke, J.H., 1953, *Economics and Economic Policy of Dual Societies; As Exemplified by Indonesia*, Harlem: H.D. Tjeenk Willink N.V.

---------., 1926, "Inlandsche Budgeten", overdruk uit "koloniale Studien", no. 2, jaargang 10, April.

Boomgaard, Peter, 2001, *Frontiers of Fear, Tiger and People in The Malay World*, 1600-1950, New Heaven & London.

---------, 199, "Non-Agricultureal Side of an Agricultural Economy Java, 1500-1900", dalam Alexander, P., Boomgaard, White, B., et al., *In The Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in The Javanese Economy, Past and Present*, Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Breman, J., 2015, *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market Profits from Unfree Work Regime in Colonial Java*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Braudel, F., 1966, *Mediterrannean and The Mediterrannean World in The Age of Philip II*, Berkeley: University of California Press.

Burger, D.H., "Desa Ngablak (Kabupaten Pati) pada tahun 1869 dan 1929", dalam S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi, *eds*.., *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, edisi revisi, Jakarta: Ya*yasan* Obor Indonesia, 2008.

Carey, P., 2008, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and The End of an Old Order in Java, 1785-1855*, Leiden: KITLV

Celson, R.E., 1997,*The End of The Peasantry in Southeast Asia: A Social and Economic History of`Peasant Livelhood 1800-1990's*, Canberra: Australian National University.

Chambert-Lior, Henri dan Guillot, Claude, *eds., 2007, Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris.

Claver, A., 2014, *Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java, Colonial Relationship in Trade and Finance, 1800-1942*, Leiden, Boston: Brill.

Colombijn, F.,2010, *Under Construction; The Politics of Urban Space and Housing during The Decolonization of Indonesia 1930-1960*, Leiden: KITLV.

Cortesao, A., 1967, *The Suma Oriental of Tome Pires*, Lichtenstein: Kraus Reprinted, 1967

Cote, Joose, 2003, " A Conglomeration of (...) often Conflicting Ideas: Resolving of the "Native Question" in Java and The Outer Islands in The Dutch East Indies, 1900-1925", *Itinerario*, Vol. 27, Edisi khusus 3-4.

De Graaf, H.J., t.t., "*De Kraton Plered en Voornamste Ambtenaren" dalam De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646- 1677* , di akses melalui Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs4bs.5

de Graaf, Th. dan Pigeaud, 1984, *Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th centuries: The Malay Annals of Sĕmarang and Cĕrbon* (Monash papers on Southeast Asia).

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1931, *Volkstelling 1930*, voorlopige uitkomsten 1e gedeel te Java en Madoera, Bataviacentrum: Landrukkerij.

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1931, *Volkstelling 1930*, deel II, Bataviacentrum: Landrukkerij.

Djoko Soekiman dan Bambang Purwanto, 2018, "The Indis *Style*: The Transformation and Hibridization of Building Culture in Colonial Java, Indonesia", *Paramita (Historical Studies Journal)*, vol. 28, no. 2

Djoko Suryo, 1989, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta:Pusat Antar Studi Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada.

F. A.Sutjipto Tiptoadmodjo, 1983, "Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX)", disertasi doctoral, Universitas Gadjah Mada.

Fasseur, C., 1977, "Organisatie en social economische betekenis van de gouvernementssuikerkultuur in enekele residentie op Java omstreeks 1850", BKI, vol, 133 (2/3).

Fernando, M.R. dan Bulbeck, David, 1992, *Chinese Economic Activity in Netherlands-India, Selected Translations from Dutch*, Singapore:

ISEAS.

Fernando, M.R. 1996, " Growth of Non-Agricultural Economic Activities in Java in the Middle Decade of the Nineteenth Century", *Modern Asia Studies*, vol. 30, no. 1,Cambridge: Cambridge University Press.

Flieringa, G., 1930, "De Zorg voor de Volkshuisvesting in de Stads*Gemeente*n in Nederlandsch Oost Indië in het bijzonder in Semarang", Rotterdam: Rotterdamsche Boek- en Kunstdrukkerij Rotterdam, *Proefschrift Ph.D. Thesis*, Delft: Technische Hoogeschool Delft.

Flecker, M., 2001, "A Ninth-Century AD Arab or Indian Shipwreck in Indonesia: First Evidence for Direct Trade with China" , *World Archeology*, vol. 32, no. 3.

Furnivall, J.S., 1944, *Netherlands India, A Study of Plural Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.

Geertz, C., 1960,*The Religion of Java*, Chicago dan London: Chicago University Press.

Guillot, S., 1981, *Kiai Sadrach: Riwayat Kristenisasi di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers

Gustami, SP., 2000, *Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: kajian Estetik Melalui Pendekatan Multidisiplin*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Hall, Kenneth R., 2011, *A History of Early Southeast Asia, Maritime Trade and Societal Development*, 100-1500, New York, Lanham, Boulder, Toronto, Plymouth : Rowman and Littlefield.

Handinoto dan Samuel Hartono, 2007, "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Mesjid Kuno di Jawa abad 15-16", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, vol. 35, no. 1.

Hitti, Philip K, 2006, *History of The Arabs, Terjemahan*, Jakarta: Serambi.

Houben, V.J.H., 1994, *Kraton and Kumpeni: Suarakata dan Yogyakarta 1830-1870*, Leiden: KITLV.

Husken, F. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman; Sejarah Diferensisasi Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980, Terjemahan*, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

---------., "Declining Welfare in Java: Government and Private Inquires, 1903-1914", dalam R. Cribb, *ed., The Late Colonial State in Indonesia; Political and Economic Foundations of the Netehrlands Indies 1880-1942*, Leiden: KITLV Press, 1994.

Indische Verslag, 1920

Ingleson, J., 1983, "Life and Work in Colonial Cities: Harbour Workers in Java in the 1910's and 1920's ", *Modern Asian Studies*, vol. 17., no. 3., 1983.

---------, 1986, *In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926*, Singapore, Oxford New York: Oxford University Press.

J. Schmalts, "*Carte* de La Rade de Japara", 5 Agustus, 1800.

Jacquet, F.G.P, ed., 1987, K*artini: Brieven Aan Mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en Haar Echtgenoot met Andere Documenten*, Dordrecht-Holland/Providence-USA: Foris Publication,

Jun, Kimura, 2015, "Maritime Archaeological Perspectives on Seaborne Trade in the South China Sea and East China Sea between the Seventh and Thirteenth Centuries", *Crossroads*, 11 (April)

Kaur, M., Isa, M., eds., 2020, *Between The Bay Bnegal and The Java Sea: Trade Route, Ancient Port & Cultural Commonalities in Southeast Asia*, Singapore: Marshall Cavendish.

Kayoko, F., Shiro, M., Reid, A., et al., 2013, *Offshore Asia: Maritime Interactions in Eastern Asia Before Steamship*, Singapore: ISEAS

Kian, Hui Kwee, 2006, *The Political Economy of Java's Northeast Coast, c. 1740-1800: Elite Synergy*, Leiden, Boston: Brill.

Kolonial Studien , 1867, "De Gouvernement-Koffij-cultuur op Java" 's-Gravenhage: bij van wewlden & Mingelen.

Kolonial Tijdschrift, 1912

Kolonial Tijdschrift,1912, uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnelandsch Bestuur in Nederlandsch Indie, Eesrte Jaargang, Batavia: Kolff & Co.

Kuntowijoyo, 2004, *Raja, Priyayi dan Kawula, Surakarta 1900-1915*, Yogyakarta: Ombak

Kurasawa, A., 1996, "Rice Shortage and Transportation", *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, deel 152, 4e Aflevering, Leiden: KITLV.

Kolonial Verslag, 1890

Lekkerkerker, C., *Het Nederlandsche Java-Instituut: Javaansche Geographische Namen als Spiegels van de Omgeving en de Denkwijze van het Volk uitspraak en schrijvwijze van Geografische namen in Nederlands-Indie*, Mededeeling, no. 8, Februari 1931.

Lichtenstein, N., 2013, *A Contest of Ideas :Capital, Politics, Labor*, Urbana, Chicago, Springfield: University of Illinois Press.

Lombard, Dennys, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 3 jilid, Jakarta :Gramedia.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 1962, *Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague: Martinus Nijhoff.

Memori van Overgave (*MvO*) *1921-1930, Memori van Resident Semarang P.J. Bijleveld*, 2 Juni 1930

Mohanda, L., 2020, "Jalur Rempah: Jejak Niaga Nusantara dalam Sumber Sejarah", webinar Jalur Rempah, Desember.

Muhajir, 2018, "Respon Adaptif Masyarakat Perajin Seni Ukir Jepara", disertasi Program Studi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.

Mudjahirin Thohir, 2006, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo.

Nagtegaal, Luc, 1996, *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and The Northeast Coast of Java, 1680-1743*, Leiden: KITLV.

Nas, Peter, 1986, *ed., The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*, Dotdecht-Holland/Cinnaminson-USA: Foris Publication.

Nederlandsch Indie Oud & Nieuw, veered jaargang 1919-1920

Parthesius, Robert, 2010, *Dutch Ships in Tropical Waters, The Development of Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia, 1595-1660* (Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pigeaud, Theodore G. Th. , de Graaf, H., J., 1976, *Islamic State in Java, 1500-1700*, The Hague: Martinus Nijhoff.

Pires, Tome, 2015, *Suma Oriental*, disunting oleh Armando Cortesao, terbit ulang oleh Ombak, Yogyakarta: Ombak.

Purcell, Victor, 1981,The Chinese in Southeast Asia, 2nd edition, Oxford, Kuala Lumpur, New York, Melbourne: Oxford University Press.

Pramoedya Ananta Toer, 2006, *Panggil Aku Kartini Saja*, Jakarta: Lentera Dipantara

Ptak, Roderich, 1993, "China and the Trade in Cloves, Circa 960-1435", *Journal of the American Oriental Society* , Vol. 113, No. 1.

Reid, A., 1993, *Southeast Asia in the Early Modern Era* : *Trade, Power, and Belief*, Ithaca: Cornell University Press.

----------., 2015, *A History of Southeast Asia: Critical Crossroad*, West Sussex, Wiley Blackwell.

Ricklefs, M.C. , 2012, *Islamisation and Its Opponents in Java*, c. 1930 to the Present, Honolulu: University of Hawaii Press.

---------, 2006, *Mystic Synthesis in Java, A History of Islamization from The Fourteenth to The Early Nineteenth Centuries*, USA: EastBridge Norwalk.

Rush, James, 1990, *Opium to Java, Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1869-1910*, Ithaca, London: Cornell University Press.

Sartono Kartodirdjo, A. Sudewo, Suhardjo H., *et al*., 1987, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Schmalts, J., "*Carte* de La Rade de Japara", 5 Agustus, 1800.

Schrieke, B., ed., 1929, *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*, Batavia: G. Koff & Co.

---------, *ed*., 1960, *Indonesian Sociological Studies*, Part. 1, Bandung: N.V. Mij Vorkink-van Hoeve.

Statistiek der Residentie Japara, 1861, KITLV.

Sutherland, H., 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Terjemahan, Jakarta : Sinar Harapan.

Th. Sumartana,1993, *Mission at The Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-Religious Change in Java, 1812-1936*, Jakarta: BPK Gunung Agung.

Thohir, Mudjahirin, 2006, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo

Ulst, Ingrid, 2005, *Linkages of Financial Groups in The European Union: Financial Conglomeration Developments in the Old and New Member States*, New York, Budapest: Central European University Press.

Van Eysinga, R., P.P., 1842, *Handboek der Land-en Volkenkunde Geschied Taal- Aardrijks, Staatkunde van Nederlandsce- Indie*, Amsterdam: van Bakkenes.

Van Niel, Robert, 2005, *Java's Northeast Coast, 1740-1840*, Leiden: CNWS Pub.

Van Niel, Robert,1960, The Emergence of The Modern Indonesia Elite, 'S-Gravenhage: van Hoeve.

van Schaik, A., 1986, "Colonial Control and Peasants Resources in Java, Agricultural Involution Reconsidered", *Proofschrift Ph.D. Thesis* , Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Vickers, Adrian, 2009, *Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*, Denpasar: Pustaka Larasan dan Udaya University Press.

Vissia Ita Yulianto, *ed*., 2004, *Feminisme dan Nasionalisme: Surat-Surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar*, 1899-1903, Jakarta: irbPress dan Kompas.

Vlekke, Bernard H.M., 1959, *Nusantara, A History of Indonesia*, 's-Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve.

Wade, G., ed., *Asian Expansions, A Historical Experiences of Polity Expansion in Asia*, London and New York: Routledge, 2015.

---------, "An Asian Commercial Ecumene, 900-1300 CE" dalam Kayako, F., Shiro,M., Reid, A., *et. al*., *Offshore Asia, Maritime Interaction in*

Eastern Asia Before Steamships, Singapore: ISEAS, 2013

Warren, James F., 1981, T*he Zulu Zone, 1768-1898, The Dynamic of External Trade, Slavery, and Ethnicity in The Transformation of a Southeast Asian Maritime State*, Singapore: Singapore University Press.

Weber, T., 2018, *Embracing'Asia' in China and Japan, Asianism Discourse and The Contest for Hegemony, 1912-1933*, Tokyo: Palgrave Macmillan.

Wisseman, J., 1978, "Market and Trade Pre-Majapahit", dalam. Hutterer, Karl J., *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia*, Michigan : Michigan University Press.

Wolterbeek, J.D., 1995, *Babad Zending di Pulau Jawa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen

Woodward, Mark R., 1999, *Islam Jawa: Kesalehan Noramtif versus Kebatinan, Terjemahan*, Yogyakarta :LKiS

Young, Robert, J.C., 1995, *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*, London & New York: Routledge.

UNIVERSITAS
JOGJAKARTA

Rempah sebagai komoditas perdagangan antarbangsa telah menghadirkan dinamika, jejaring serta proses kesejarahan yang rumit jauh sebelum adanya proses kolonialisasi Eropa di Asia, termasuk Nusantara. Jejaring rempah yang bermula bersifat lokal, regional dan kemudian tumbuh menjadi komoditas dunia mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di seluruh kawasan, baik Nusantara, Asia, bahkan Eropa. Buku ini mendeskripsikan jejaring rempah sejak pra-kolonial Eropa yang berdampak di Kota Jepara dengan pendekatan *post-colonial*. Sebuah upaya akademik untuk mendekonsruksi pendekatan Indonesia-sentris yang masih menempatkan kolonial Eropa menjadi penggerak utama, *primum mobile*, dalam sejarah rempah di Nusantara. Memang, Jepara secara historis tidak dilalui jalur rempah secara langsung, namun peran Jepara sebagai kota pelabuhan telah memberikan daya dorong pertumbuhan jejaring perdagangan dunia termasuk rempah yang membentuk pola-pola baru yang disebut budaya hibrida. Sebuah konstruksi modernitas yang berproses dan melahirkan modernitas lain dengan karakter berbeda, yaitu budaya kritis.

ISBN 978-602-244-933-1 (PDF)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI